



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1246 -



**Kementerian Keuangan**

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2022, Kementerian Keuangan telah menetapkan 6 sasaran strategis dengan 21 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2022, dari 21 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, sebanyak 15 indikator kinerja (71,43%) memiliki capaian melebihi target, 3 indikator kinerja (14,29%) sesuai target, dan 3 indikator kinerja (14,29%) tidak mencapai target.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2022.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Pengelolaan keuangan negara yang optimal guna mendukung perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan serta mendukung pemulihan ekonomi nasional	Tingkat pertumbuhan ekonomi	5,2%	5,31%	102,12%
		Indeks kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran terbuka	4 (skala 5)	3,33 (skala 5)	93,33%
		- Tingkat kemiskinan	4 (skala 5)	3 (skala 5)	75%
		- Indeks ketimpangan	4 (skala 5)	3 (skala 5)	75%
		- Tingkat pengangguran terbuka	4 (skala 5)	4 (skala 5)	100%
		Indeks capaian kesinambungan fiskal	100	139,08	139%
		- Rasio defisit terhadap PDB	-4,85%	-2,38%	152,99%
		- Rasio utang terhadap PDB	44,2%	39,42%	110,81%
		- Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB	8,42%	10,41%	123,63%
		- Debt Dynamic	-2,67%	-4,78%	120%
2	Kebijakan Fiskal yang Prudent, serta Manfaat Kerja sama Internasional dan Presidensi G-20 yang Optimal	Indeks efektivitas kebijakan fiskal	85	94,28	110,92%
		Persentase communique G-20 usulan Indonesia yang disepakati	70%	94,05%	134,36%



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1247 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3	Penerimaan negara yang optimal	Persentase realisasi penerimaan negara	100% (Rp2.265,62 T)	116,07% (Rp2.629,67 T)	116,07%
		Indeks efisiensi pelayanan ekspor-impor dan logistic	82	93,43	113,93%
4	Belanja negara yang berkualitas	Indeks kualitas belanja pemerintah	86,32	90,58	104,58%
5	Pengelolaan <i>treasury</i> pemerintah dan neraca keuangan pusat yang modern, <i>prudent</i> , produktif, inovatif, dan akuntabel secara terintegrasi	Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang	3,10	3,50	112,90%
		Indeks opini BPK atas LKPP dan LK BUN	4	4	100%
		Tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara	100%	117,53%	117,53%
6	Dukungan Program Kementerian Keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel	Indeks kepuasan pengguna layanan	4,32 (skala 5)	4,38 (skala 5)	101,39%
		Nilai evaluasi reformasi birokrasi	83,8	88,69	105,84%

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

No	Jenis Belanja	Pagu (Miliar Rp)	Realisasi (Miliar Rp)	%
1	Belanja Pegawai	22.161,6	21.966,3	99,10
2	Belanja Barang	52.869,3	51.566,7	97,50
3	Belanja Modal	2.572,1	2.368,5	92,10
	Jumlah	77.603,0	75.901,5	97,80

Hambatan atau permasalahan dalam pencapaian kinerja Kementerian Keuangan antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

- Hambatan yang dialami dalam mencapai target tingkat pertumbuhan ekonomi adalah:
  - Meningkatnya risiko ketidakpastian serta melemahnya prospek pertumbuhan global akibat konflik geopolitik yang perlu terus diantisipasi.
  - Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur global sudah mulai berada pada zona kontraksi dalam beberapa bulan terakhir di akhir tahun 2022.
  - Adanya tekanan inflasi global yang berkepanjangan khususnya di kawasan Eropa dan Amerika Serikat, akan memicu pengetatan kebijakan moneter yang lebih agresif yang berpotensi menimbulkan guncangan di pasar keuangan, khususnya di negara berkembang.
  - Aliran modal ke luar meningkat dan menimbulkan tekanan besar pada nilai tukar lokal.
- Hambatan yang dialami dalam mencapai target target indeks efektivitas kebijakan fiskal adalah:
  - BKF
    - Terkait dengan BMTDP: pemulihan atas produktivitas dan tenaga kerja akibat dampak covid 19, perlu dukungan insentif perpajakan diantaranya melalui BMDTP.
    - Terkait dengan Perlinsos:
      - Untuk per programnya angka efektivitas PIP masih jauh dibawah target yaitu sebesar 52,8 persen, sedangkan untuk program lain seperti PKH sebesar 99,9 persen, kartu sembako sebesar 123,1 persen, dan subsidi LPG 3 Kg sebesar 151,7 persen.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1248 -

- b. Pertanyaan terkait PIP di kuesioner 2022 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya sehingga datanya tidak konsisten.
  - c. Perubahan struktur PIP di Susenas yang sebelumnya per rumah tangga, menjadi per individu, membuat data penerima PIP menjadi lebih kecil dari yang ditargetkan dan diprediksikan. Padahal jika dilihat dari data pip. kemdikbud.go.id jauh lebih besar dari data yang ada di Susenas 2022.
- b. DJA
- 1) Objek pengukuran IKU berbeda dengan tahun 2021, sehingga diperlukan penyusunan rencana pencapaian target yang sesuai dan berbeda dari tahun 2021.
- c. DJPK
- 1) Waktu pelaksanaan kegiatan yang singkat sehingga terdapat kegiatan selesai sampai melewati tahun anggaran. Penandatanganan perjanjian terjadi pada kuartal terakhir sebagai salah satu yang menyebabkan waktu untuk melaksanakan kegiatan terbatas khususnya yang memerlukan pengadaan barang dan jasa.
  - 2) Kendala teknis banyak ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan Pinjaman PEN, diantaranya kendala curah hujan yang tinggi, masalah sosial di lapangan dan masalah kepemilikan lahan.
  - 3) Kurangnya pemahaman SDM atas mekanisme teknis pengelolaan Pinjaman PEN Daerah. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan dalam proses pencairan (keterlambatan pencairan) serta tidak dapat dilakukan reimbursement atas tagihan beberapa kegiatan yang pelaksanaannya mendahului penandatanganan pinjaman PEN.
  - 4) Terdapat 4 daerah Pinjaman PEN Daerah dan 3 daerah Pinjaman Daerah dalam rangka Mendukung Program PEN yang tidak efektif karena tidak mendapat pertimbangan Menteri Dalam Negeri.
- d. DJBC
- 1) Ekspor KB mengalami tren penurunan s.d. Desember 2022, penurunan tertinggi terjadi pada Bulan Mei 2022 dari ekspor KB yang disebabkan adanya larangan ekspor CPO dan pengurangan hari kerja akibat Hari Raya Idul Fitri.
  - 2) Secara agregat, tenaga kerja KB mengalami penurunan dari Q3 ke Q4 tahun 2022. Hal tersebut disebabkan banyaknya PHK yang dilakukan oleh perusahaan akibat COVID-19.
  - 3) Beberapa Kantor vertikal tidak menyampaikan data tenaga kerja. Hal tersebut dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu tidak adanya IKU penunjang yang diambil oleh kantor vertikal sehingga data tidak disampaikan kepada Direktorat Fasilitas Kepabeanaan atau data penunjang tidak dikirimkan tepat waktu (karena adanya rolling PIC yang menyebabkan kurangnya awareness PIC selanjutnya).



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1249 -

- e. DJPPR
- 1) Terkait penjaminan korporasi, terdapat keterlambatan proses pembahasan antar penjamin maupun antara Penjamin dan Perbankan.
  - 2) Terkait dengan penjaminan UMKM:
    - a. proses penyusunan regulasi dan Perjanjian Kerja sama memerlukan waktu yang cukup lama.
    - b. terdapat kendala pada sistem aplikasi E-JamKU pada saat input data debitur dimana terdapat menu validasi NIK dan nama. Dalam hal terdapat perbedaan data, perlu dilakukan perbaikan data secara manual sebelum dapat mengakses e-Jamku.
    - c. terdapat ketentuan dimana UMKM yang telah memanfaatkan fasilitas KUR atau memiliki status aktif penjaminan GEN 1, tidak dapat mengikuti penjaminan GEN 2.
- f. DJKN
- 1) Kondisi pandemi yang belum pulih sepenuhnya sehingga berdampak pada perekonomian dan pergerakan masyarakat.
  - 2) Perubahan alokasi penggunaan PMN PEN.
  - 3) Terdapat proyek/program yang feasibility study nya belum final.
3. Hambatan yang dialami dalam mencapai target Persentase realisasi penerimaan negara adalah:
- a. DJP (Penerimaan Pajak)
    - i. Implementasi peraturan-peraturan terkait UU HPP yang memerlukan waktu untuk bisa diterapkan secara efektif.
    - ii. Mulai melambatnya pertumbuhan harga komoditas pada periode semester II tahun 2022.
    - iii. Phasing out beberapa kebijakan terkait insentif COVID-19.
    - iv. Tren restitusi yang semakin meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
  - b. DJBC (Penerimaan Bea dan Cukai)
    - i. Kepatuhan importir, eksportir, dan pengusaha Barang Kena Cukai dalam membayar Bea Masuk, Bea Keluar dan Cukai.
    - ii. Kebijakan pemerintah terkait pengendalian ekspor komoditi yang dikenakan Bea Keluar.
    - iii. Fluktuasi harga komoditas ekspor.
    - iv. Peredaran Barang Kena Cukai ilegal.
4. Hambatan yang dialami dalam mencapai target indeks efisiensi pelayanan ekspor-impor dan logistic adalah:
- a. Impor
    - 1) Dari Segi Waktu Impor
      - a) Pre clearance  
Kinerja terminal operator dalam pergerakan barang yang lambat dan sarana prasarana pelabuhan yang minim serta kelambanan importir/PPJK dalam pengajuan PIB.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1250 -

- b) Customs Clearance

Keterlambatan penyerahan dokumen pelengkap oleh importir, minimnya sarana dan prasarana pemeriksaan fisik termasuk Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), gangguan sistem (CEISA), dan lamanya penyiapan barang untuk diperiksa. Selain itu, adanya Surat Pemberitahuan Pengeluaran Barang (SPPB) Hold akibat penerapan Single Submission Quarantine Customs (SSmQC) juga berpengaruh terhadap peningkatan waktu Customs Clearance dimana atas barang impor telah selesai proses kepabeanan namun belum terbit SPPB karena menunggu proses pemeriksaan pihak karantina selesai.
- c) Post Clearance

Delivery Order Online yang belum optimal, waktu dan lokasi pelayanan pihak pelayaran yang tidak sama dengan operasional pelabuhan, keterbatasan ketersediaan buffer area dan kelambanan importir dalam mengeluarkan barang impor yang telah mendapatkan SPPB.
- 2) Dari Sisi Biaya Impor
  - a) Biaya PPJK

Belum diatur penetapan tarif untuk jasa Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK).
  - b) Biaya Perizinan

regulasi yang sering berubah-ubah sehingga persyaratan perizinan juga berubah-ubah yang menimbulkan ketidakpastian.
  - c) Biaya Handling Port

Banyaknya jenis biaya pergerakan barang dan sarana prasarana yang sering rusak menyebabkan pengurusan container menjadi lebih lama dan biaya meningkat. Selain itu, pengaturan tarif batas atas dan batas bawah biaya handling port belum dilakukan.
  - d) Biaya Trucking

Jalanan yang rusak dan macet membuat biaya trucking lebih mahal karena konsumsi BBM yang besar.
  - e) Biaya Freight

Biaya ini setiap tahun mengalami kenaikan dan meningkat signifikan sejak adanya pandemic Covid-19 yang diantaranya dikarenakan dampak dari kelangkaan kontainer dan berkurangnya schedule kapal.
- b. Ekspor
  - 1) Dari Segi Waktu Ekspor
    - a) Pre clearance



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1251 -

- i) Masih sering terjadi gangguan jaringan yang menyebabkan terhambatnya pengiriman data Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari Modul PEB ke CEISA Ekspor.
  - ii) Permintaan dokumen lartas dalam hal barang ekspor terkena lartas namun eksportir belum memenuhi ketentuan pemenuhan dokumen lartas.
  - iii) Penelitian lartas oleh petugas analyzing point.
  - iv) ditemukan pada salah satu kantor pelayanan yang memiliki waktu sejak penelitian di SINSW selesai sampai PEB diterima di SKP membutuhkan waktu lebih dari satu jam. Sedangkan pada kantor-kantor lain pada proses tersebut hanya membutuhkan waktu hitungan menit.
- b) Customs Clearance
- i) Proses pemeriksaan fisik atas komoditi tertentu: Lama waktu pada proses customs clearance apabila dipecah berdasarkan penjalurannya maka terlihat bahwa jalur merah menyumbang porsi waktu yang cukup besar. Pemeriksaan fisik jalur merah atas komoditi tertentu (misal CPO dan turunannya, kayu dan mineral logam) merupakan komoditi yang memerlukan pengawasan pemuatan dan pengambilan sampel barang untuk dilakukan pengujian laboratorium sehingga atas layanan ekspor atas komoditi tersebut membutuhkan waktu penelitian yang lebih banyak.
  - ii) Lokasi pemeriksaan fisik: Jauhnya jarak antara kantor pelayanan yang melakukan pemeriksaan fisik dengan lokasi Gudang milik eksportir tempat dilakukannya pemeriksaan mempengaruhi lamanya waktu untuk PEB jalur merah.
- c) Post Clearance
- i) Praktek pemasukan peti kemas ke dalam Kawasan Pabean tempat pemuatan menjelang closing time.
  - ii) Terhambatnya pelayanan TPS akibat lonjakan volume ekspor.
  - iii) Faktor Geografis dan Cuaca: Cepat atau lambatnya waktu pemuatan barang ekspor ke kapal tergantung pada letak geografis dari Pelabuhan. Selain itu faktor cuaca yang buruk pada masing- masing pelabuhan juga menyebabkan terlambatnya kedatangan kapal dan pada akhirnya juga mempengaruhi proses sandar kapal dan muat barang ekspor ke kapal di dermaga Pelabuhan seperti badai dan ombak tinggi.
- 2) Dari Sisi Biaya Ekspor
- a) Biaya PPJK  
Sebagian besar responden menyampaikan bahwa biaya PPJK masih sama seperti tahun sebelumnya dikarenakan beberapa responden membuat kontrak berjangka



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1252 -

dengan pihak PPJK. Sebagian responden menyampaikan adanya kenaikan biaya pengurusan PPJK yang terdampak atas kenaikan biaya handling.

b) Biaya Perizinan

Sebagian responden menyampaikan bahwa biaya masih sama seperti tahun lalu dan pengurusan lebih efisien dikarenakan pembayaran resmi dengan nota/invoice (menggunakan billing) dan dilakukan via online. Sisanya menyampaikan biaya lebih mahal dikarenakan adanya kenaikan pajak PPN.

c) Biaya Handling Port

Sebagian responden kurang mengetahui biaya ini dikarenakan pengurusan diserahkan ke pihak ekspedisi. Sebagian responden menyampaikan bahwa biaya masih sama dengan tahun sebelumnya. Sebagian responden mengeluhkan kenaikan biaya handling serta kenaikan pajak PPN namun beberapa mengatakan biaya tersebut sesuai dengan keadaan di lapangan.

d) Biaya Trucking

Mayoritas responden menyatakan biaya trucking tahun ini lebih murah, tidak memberatkan perusahaan dan tidak terdapat kenaikan harga sejak 2 tahun terakhir. Walaupun beberapa eksportir menyatakan bahwa biaya trucking tahun ini lebih mahal daripada tahun sebelumnya karena dipengaruhi kenaikan harga BBM.

e) Biaya Freight

Sebagian besar responden mengeluhkan kenaikan biaya freight yang drastis sejak pandemi COVID-19 dan kelangkaan kontainer yang terjadi di pelabuhan.

5. Hambatan yang dialami dalam mencapai target indeks kualitas belanja pemerintah adalah:

a. DJA

- i. Pada beberapa K/L masih terdapat sasaran strategis yang perlu direvisi karena telah tidak digunakan, hal ini dapat mengakibatkan terhambatnya pengisian capaian pada aplikasi SMART.
- ii. Masih terdapat kecenderungan satuan kerja menunda pelaksanaan pengisian sasaran strategis yang telah ada rumahnya (uraian target dan satuan tidak diisi). Hal ini dapat mengurangi nilai NKA.
- iii. Kepatuhan K/L dalam menginput SMART sesuai dengan ketentuan masih rendah.

b. DJPK

- i. Adanya kewajiban daerah untuk menganggarkan 2% dari DTU (DAU Oktober – Desember 2022 dan Penyaluran DBH Triwulan IV TA 2022) untuk Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi TA 2022.
- ii. Kemampuan fiskal daerah dalam pemenuhan Belanja Wajib DTU yang belum merata terutama di masa Pandemi Covid-19 dan dampak inflasi sehubungan dengan kebijakan pengalihan subsidi BBM.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1253 -

- iii. Masih terdapat pemerintah daerah yang belum mengalokasikan belanja wajib sesuai ketentuan perundang undangan sehingga kualitas belanja Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur masih perlu ditingkatkan.
  - iv. Laporan Realisasi Belanja Wajib DTU 25% bukan lagi merupakan syarat penyaluran DAU.
  - v. Daerah yang belum menginput syarat penyaluran DAK Fisik sampai tanggal 21 Juli, maka penyaluran tahap I nya untuk bidang di luar pendidikan dan kesehatan tidak dapat ditindaklanjuti.
6. Hambatan yang dialami dalam mencapai target tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara adalah:
- a. Kondisi ekonomi global yang masih volatile berdampak terhadap realisasi APBN maupun terhadap kondisi keuangan pihak terjamin menjadi tidak sehat.
  - b. Terdapat potensi risiko klaim penjaminan kredit sebesar Rp4,9 triliun di Semester II-2021; DSCR PT PLN diproyeksikan sebesar 0,67 kali.
  - c. Terhentinya pembangunan proyek penerima penugasan akibat adanya pembatasan aktivitas dalam masa pandemik yang akan berdampak pada kenaikan biaya pembangunan dan tambahan beban APBN atas kebutuhan PMN pihak terjamin untuk pemenuhan kewajiban kepada kreditor.
  - d. Penurunan sumber penerimaan dan cash mismatch Pemda sebagai pihak borrower, sehingga meningkatkan potensi gagal bayar.
  - e. Isu over supply listrik bagi PLN karena IPP dengan kapasitas tinggi akan masuk dalam sistem, yang dapat berdampak pada berkurangnya pembebanan pada pembangkit PLN yang menjadi berkurang yang pada akhirnya akan berimbas pada kinerja pembangkit PLN.
  - f. Keterlambatan pengadaan lahan pada proyek tol KPBU.
  - g. Terdapat penambahan penugasan dan perluasan mandat PT PII, serta meningkatnya potensi klaim penjaminan akibat dari dampak pandemi Covid-19.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan dalam mencapai target kinerja adalah sebagai berikut.

1. Upaya yang dilakukan Kementerian Keuangan dalam mencapai target tingkat pertumbuhan ekonomi adalah:
  - a. Pemantauan perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia dan global.
  - b. Pemantauan kondisi perekonomian global dan dampak terhadap perekonomian Indonesia.
  - c. Pemantauan kondisi sektor riil dan keuangan Indonesia.
  - d. Pemantauan kebijakan pemerintah (kebijakan fiskal) untuk meringankan dampak negatif untuk masyarakat.





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1254 -

2. Upaya yang dilakukan Kementerian Keuangan dalam mencapai target Indeks efektivitas kebijakan fiskal adalah:
  - a. BKF
    - i. Rapat koordinasi dan Focus Group Discussion dalam rangka menggali data dan informasi untuk penyusunan rekomendasi kebijakan terkait dengan perlinsos dengan stakeholder internal maupun eksternal.
    - ii. Kajian-kajian tertentu yang dilakukan untuk mempertajam input penyusunan rekomendasi kebijakan.
    - iii. Koordinasi dengan K/L teknis terkait dengan kebijakan tersebut untuk menentukan perbaikan dan pengembangan dari kebijakan tersebut.
    - iv. Skema bantuan terkait dengan perlinsos dilakukan dengan lebih tepat sasaran sehingga kemiskinan bisa menurun.
  - b. DJA
    - 1) Terkait Peningkatan Kualitas SDM (Kualitas SDM) Tarif Rp. 0 di bidang pendidikan
      - a. Melakukan Persiapan tahapan awal survei.
      - b. Menyusun timeline pelaksanaan survei.
      - c. Rapat Persiapan Pelaksanaan Survei Efektivitas Kebijakan Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN).
      - d. Koordinasi dengan PTN/PTKN dalam pelaksanaan survei efektivitas kebijakan tarif s.d. Rp0.
      - e. Telah dilaksanakan rapat koordinasi internal DJA (Rapat pembahasan mengundang Kemenristek Dikti dan Kemenag).
      - f. Telah disampaikan surat penyampaian survey ke Kemenag.
      - g. Survey untuk Kemenag disampaikan ke Ditjen Pendidikan Islam untuk didistribusikan kepada 5 PTKIN yang sudah ditentukan untuk menjadi objek survey dan survey dibuka s.d. tgl 31 Mei 2022.
      - h. Telah dilakukan rekapitulasi hasil survey dan diperoleh nilai 89,6.
      - i. Survei terkait Efektivitas Kebijakan Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) (S-43/ AG.7/2022). Survei dilaksanakan pada bulan Mei s.d. 10 Juni 2022 secara daring melalui kuesioner.
      - j. Telah dilakukan rekapitulasi hasil survey dan diperoleh nilai 92.
    - 2) Terkait Standarisasi KRO
      - a. Telah dilakukan pengumpulan data KRO seluruh satker Kementerian/Lembaga.
      - b. (On progress) pemetaan dan identifikasi KRO.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1255 -

- c. Saat ini dalam proses identifikasi KRO standar pada Program Dukman, selanjutnya proses untuk pengukuran implementasi KRO standar pada Program Dukman akan dilakukan setelah penyusunan RKA-K/L berdasarkan pagu anggaran (bulan Juli - Agustus).
  - d. Telah dilakukan perhitungan capaian iku dan capaian target telah tercapai 107,5 melebihi target yang telah ditetapkan.
- c. DJBC
- i. Melakukan koordinasi secara kontinu dengan unit vertikal terkait ketepatan waktu penyampaian data pendukung.
  - ii. Melakukan analisis terkait Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang mengalami penurunan ekspor dan tenaga kerja secara signifikan.
  - iii. Inisiasi kegiatan gemar monitoring dan evaluasi perusahaan penerima fasilitas TPB untuk melakukan asistensi kepada unit vertikal dan perusahaan penerima fasilitas TPB.
  - iv. Menentukan batas waktu penyampaian data pendukung dan reminder ke unit vertika.
- d. DJPPR
- i. koordinasi dengan penjamin dan perbankan untuk melakukan identifikasi permasalahan dan menyusun rencana tindak lanjut bersama untuk mempercepat dan meningkatkan realisasi penjaminan PEN Korporasi Gen-2.
  - ii. telah dilakukan penyempurnaan sistem e-JamKU secara berkala, dan sinkronisasi data antara sistem e-jamku dengan SIKP secara berkala.
- e. DJKN
- i. Melakukan Koordinasi dengan pihak pihak terkait seperti, Kementerian BUMN, BUMN/Lembaga dan Pelaksana Investasi.
  - ii. Monitoring dan evaluasi penggunaan PMN PEN dan IP PEN.
3. Upaya yang dilakukan Kementerian Keuangan dalam mencapai target persentase realisasi penerimaan negara adalah:
- a. DJP (Penerimaan Pajak)
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendorong unit vertikal melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP
  - ii. Penurunan data dan panduan pelaksanaan kegiatan penelitian kenaikan angsuran yang dapat digunakan Kanwil dalam melakukan penelitian dan pengawasan kenaikan angsuran.
  - iii. Penelitian dan tindak lanjut hasil data matching.
  - iv. Melakukan manajemen restitusi dengan menggunakan dashboard restitusi.
  - v. Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor usaha.
  - vi. Meningkatkan produktivitas dan success rate (melibatkan pemeriksa, penyidik, dan penilai) atas penerbitan SP2DK di Approweb.
  - vii. Pengawasan transaksi afiliasi yang terindikasi transfer pricing.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1256 -

- viii. Optimalisasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS).
  - ix. Sinergi pengawasan dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Pemerintah Daerah.
- b. DJBC (Penerimaan Bea dan Cukai)
- i. Melaksanakan Dialog Pengelolaan Basis Penerimaan/Dialog Pengamanan Penerimaan baik secara daring maupun luring bersama unit vertikal terkait.
  - ii. Melakukan monitoring realisasi Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) dan pelunasannya melalui koordinasi dengan satker-satker utama CHT.
  - iii. Melakukan analisis dan evaluasi penerimaan secara periodik, termasuk indepth interview dengan kontributor utama untuk mengkalibrasi hasil proyeksi, mengetahui kondisi pasar, serta kendala yang dihadapi oleh industri.
  - iv. Pemetaan Basis Penerimaan Ekspor (Pemetaan produk baru CPO dan turunannya).
  - v. Menerbitkan regulasi pendukung, misalnya relaksasi waktu pelunasan cukai melalui PMK-74/PMK.04/2022.
  - vi. Extra effort penerimaan melalui:
    - 1. Keberatan dan Banding;
    - 2. Audit kepastian dan cukai;
    - 3. Penelitian ulang;
    - 4. Penerbitan dokumen penetapan.
  - vii. Melakukan pemantauan harga internasional komoditi terkena bea keluar secara periodik.
  - viii. Melakukan penagihan secara optimal berdasarkan peraturan yang berlaku.
4. Upaya yang dilakukan Kementerian Keuangan dalam mencapai target indeks kualitas belanja pemerintah adalah:
- a. DJA
- i. Pengembangan aplikasi SMART K/L (telah selesai di akhir bulan Februari 2022).
  - ii. Pengujian aplikasi SMART tahun 2022 untuk level Satker, Unit eselon I dan K/L (dilakukan pada tanggal 1 s.d. 7 Maret 2022).
  - iii. Rakornas K/L pada tanggal 12-14 April bersinergi dengan DJPb untuk seremoni penghargaan, penyampaian hasil monev TA 2021, dan penyampaian kebijakan TA 2022.
  - iv. Pelaksanaan bimbingan teknis dan monev triwulan I terkait Nilai Kinerja Anggaran telah dilaksanakan pada tanggal 20 April 2022.
  - v. Bimbingan Teknis terkait pengisian Nilai Kinerja Anggaran K/L kepada 83 K/L pada tanggal 18 Oktober 2022.
  - vi. Monitoring aplikasi dan pengisian oleh K/L dan Satker secara berkala.
  - vii. Pendampingan/asistensi baik secara daring maupun luring.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1257 -

- b. DJPK
  - i. Pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan monitoring dan bimbingan teknis kebijakan DAU dan DAK Fisik dilakukan secara daring (virtual conference). Dengan pelaksanaan kegiatan secara virtual maka frekuensi pelaksanaan kegiatan menjadi lebih banyak dan efisien untuk mencapai sasaran atau output dari IKU tersebut.
  - ii. Pembahasan pengolahan data dengan pihak penyedia data dilakukan secara online sehingga dapat menghemat waktu dan biaya.
  - iii. Proses pengolahan data, penetapan pagu nasional, alokasi pagu lebih banyak dilakukan pihak internal sehingga tidak diperlukan anggaran terkait honor tim.
5. Upaya yang dilakukan Kementerian Keuangan dalam mencapai target tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara adalah:
  - a. Monitoring terhadap pembayaran kewajiban jatuh tempo setiap bulannya pada program penjaminan pemerintah.
  - b. Koordinasi secara berkala di Forum Komite Bersama dengan Kementerian ESDM dan SMV terkait membahas progres dan risiko pengembangan proyek Panas Bumi.
  - c. Telah dilakukan monitoring melalui one-on-one meeting kepada BPJS Kesehatan dan BP Jamsostek.
  - d. Pemutakhiran data dan analisis perubahan cadangan devisa dan utang valas secara bulanan.
  - e. Secara berkala melakukan sosialisasi aplikasi Sepatuh kepada seluruh K/L sekaligus mengingatkan K/L untuk terus melakukan update data.
  - f. Monitoring secara berkala terhadap kondisi likuiditas LPS.
  - g. Rapat koordinasi terkait Jalan Tol Serang Panimbang yang diinisiasi oleh Menkomarves tanggal 5 April 2022 membahas progres pembebasan lahan dan loan agreement pada proyek.
  - h. Penyampaian hasil monitoring proyek-proyek yang mendapat jaminan pemerintah pada program penjaminan PDAM.
  - i. Penyampaian usulan indikasi kebutuhan dana kewajiban penjaminan pada APBN TA 2023 kepada KPA.
  - j. Melakukan sosialisasi PMK 222/2021 dan KMK 105/2022 untuk tingkat UE I Kemenkeu.
  - k. Penetapan KMK Pokja Risiko AKN pada KMK Nomor 839/KMK.1/2022.
  - l. Telah disusun regulasi baru PMK 80/2022 untuk akselerasi proses penerbitan fasilitas PISP.
  - m. Mengikuti mekanisme yang diatur dalam UU 2 Tahun 2020, PP 33 Tahun 2020 dan PMK 88 Tahun 2020, yaitu mengenai mekanisme bagi LPS untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya: (a) melalui penjualan SBN milik LPS kepada BI, (b) transaksi Repo SBN milik LPS dengan BI, (c) penerbitan surat utang, (d) pinjaman kepada pihak ketiga, dan (e) pinjaman kepada pemerintah.
  - n. DJPPR berupaya melakukan pengelolaan risiko nilai tukar dengan mengoptimalkan pasar keuangan dalam negeri melalui penerbitan SBN domestik riil, serta penerbitan SBN valas dan pinjaman dengan porsi yang terukur Penyusunan strategi pengelolaan risiko keuangan negara.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1258 -

- o. Pengembangan sistem aplikasi dan basis data terkait penerapan kerangka kerja RKN.
- p. Updating data analisis risiko SALM 2022.
- q. Penyempurnaan sistem EJAMKU dan SIKP.
- r. Koordinasi dalam forum SOP Link untuk penugasan pembiayaan infrastruktur daerah.
- s. Penyusunan dan penetapan metode Internal Credit Rating untuk korporasi sebagai tools pemantauan risiko penjaminan.
- t. Penyampaian evaluasi risiko default melalui metode Internal Credit Rating untuk program penjaminan PDAM.

Rencana ke depan yang akan dilaksanakan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut.

1. Untuk mendukung pencapaian target indeks efektivitas kebijakan fiskal 2023, akan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut.
  - a. BKF
    - 1) Penyusunan regulasi mengenai Pemberian Dukungan Fiskal Melalui Kerangka Pendanaan dan Pembiayaan dalam Rangka Percepatan Transisi Energi di Sektor Ketenagalistrikan.
    - 2) Penyusunan Kajian Lingkungan dan Sosial Strategis (Strategic Environmental and Social Assessment/ SESA) termasuk Penyelenggaraan SESA Consultative Forum. Kegiatan ini akan diselenggarakan sebanyak 4 sesi dan rencananya akan diadakan di Bogor, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan.
    - 3) Penyusunan kajian carbon market, new asset class, dan green taxonomy ETM.
    - 4) Penyusunan kajian pengembangan industri pertambangan (nikel) dalam mendukung pembangunan industri baterai sebagai upaya untuk mewujudkan lingkungan bersih sesuai target komitmen Nationally Determined Contribution 2030 dan Nett Zero Emission 206.
  - b. DJPK
    - 1) Melaksanakan penyempurnaan kebijakan, melaksanakan monitoring dan evaluasi atas output kegiatan serta melakukan evaluasi atas Laporan Akhir Pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah.
  - c. DJBC
    - 1) Melakukan koordinasi dengan Kanwil DJBC dan KPPBC agar Pemberian Fasilitas Kepabeanan dapat berjalan efektif.
    - 2) Melakukan pengumpulan dan analisis data terkait Pemberian Fasilitas Fiskal dan data perekonomian nasional.
    - 3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.
  - d. DJPPR
    - 1) berkoordinasi dengan para stakeholder terkait efektivitas kebijakan pembiayaan.
    - 2) melaksanakan penerbitan sesuai dengan strategi pembiayaan yang telah disusun.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1259 -

- 3) melakukan langkah proaktif dalam rangka pengembangan dan pendalaman pasar SUN.
- e. DJKN
  - 1) Melanjutkan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan PMN PEN dan IP PEN.
  - 2) Berkoordinasi dengan BUMN penerima PMN PEN dan IP PEN.
2. Untuk mendukung pencapaian target persentase realisasi penerimaan negara tahun 2023, akan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut.
  - a. DJP (Penerimaan Pajak)
    - i. Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak termasuk tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta data WP dengan membentuk Komite Kepatuhan Wajib Pajak, sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan;.
    - ii. Menyusun kebijakan dan strategi pengamanan penerimaan pajak nasional tahun 2023 serta petunjuk teknisnya untuk menghadapi tantangan pencapaian target penerimaan pajak sesuai amanat UU APBN Tahun 2023.
    - iii. Penetapan target penerimaan pajak per jenis pajak dan per Kantor Wilayah DJP yang andal.
    - iv. Melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional untuk koordinasi kebijakan dan strategi pencapaian penerimaan tahun 2023.
    - v. Menetapkan Compliance Improvement Plan (CIP).
  - b. DJBC (Penerimaan Bea dan Cukai)
    - i. Melaksanakan dialog terkait pengamanan target penerimaan.
    - ii. Intensifikasi dan ekstensifikasi cukai melalui pemberlakuan pengenaan cukai plastik dan penyesuaian tarif cukai MMEA.
    - iii. Intensifikasi dan ekstensifikasi bea keluar melalui pengenaan Bea Keluar atas produk mineral untuk mendorong hilirisasi dan mengoptimalkan struktur tarif Bea Keluar antara CPO dan RBD Oil (memiliki selisih tarif yang tinggi : Tarif BK CPO avg USD155/MT > RBD Oil avg USD73/MT).
    - iv. Perluasan basis penerimaan kepabeanan dan cukai.
    - v. Pengembangan layanan kepabeanan dan cukai berbasis digital yang berfokus pada user experience dan user friendly serta pengembangan layanan e-commerce.
    - vi. Penyempurnaan proses bisnis di bidang pemeriksaan dan pengelolaan penerimaan kepabeanan dan cukai.
    - vii. Penguatan kerja sama dengan KIL serta Aparat Penegak Hukum (APH) dalam rangka pengamanan penerimaan negara.
    - viii. Sinkronisasi data ekspor dan percepatan pelayanan ekspor.
    - ix. Penguatan proses bisnis keberatan dan peningkatan kemenangan sengketa banding di pengadilan pajak.
    - x. Peningkatan efektivitas audit kepabeanan dan cukai.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1260 -

3. Rencana Aksi ke depan yang akan dilaksanakan dalam mencapai target indeks efisiensi pelayanan ekspor-impor dan logistic diantaranya adalah melakukan penilaian kembali efisiensi waktu dan biaya pelayanan ekspor dan impor melalui survei dengan melakukan:
  - a. Permintaan dan pengambilan data terkait waktu (Pre Clearance-Customs Clearance-Post clearance);
  - b. Permintaan dan pengambilan data terkait biaya atas kegiatan impor dan ekspor.
4. Rencana aksi dalam mencapai target indeks kualitas belanja pemerintah yang akan dilakukan pada tahun 2023 adalah:
  - a. DJPK
    - i. Melaksanakan penyempurnaan kebijakan dengan melakukan penyusunan PMK dan PP TKD serta melaksanakan sosialisasi kebijakan DAU.
    - ii. Meningkatkan kualitas data baik ketepatan waktu maupun validitasnya melalui peningkatan kapasitas SDM yang menangani data, antara lain berupa peningkatan koordinasi dengan unit penyedia data, baik di lingkungan internal maupun eksternal DJPK.
    - iii. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan DAK Fisik dan DAK Non Fisik TA 2023.
    - iv. Meningkatkan kualitas data melalui ketepatan waktu ketersediaan data dan validitasnya.
5. Rencana aksi ke depan dalam mencapai target tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara adalah:
  - a. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan operasional pada proyek KPBU yang memperoleh penjaminan bersama.
  - b. Melakukan upaya mitigasi risiko default pada proyek KPBU yang mendapatkan penjaminan Pemerintah melalui upaya koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka monitoring untuk proyek yang mendapatkan penjaminan bersama.
  - c. Implementasi pelaksanaan manajemen risiko keuangan negara sesuai PMK 222/2021 dan KMK 105/2022.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1261 -



**Kementerian Perindustrian**

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2022, Kementerian Perindustrian telah menetapkan 13 sasaran strategis dengan 49 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2022, dari 49 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, sebanyak 31 indikator kinerja (63,27%) memiliki capaian melebihi target, 4 indikator kinerja (8,16%) sesuai target, dan 14 indikator kinerja (28,57%) tidak mencapai target.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2022.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas	Tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas	20,84 Juta Orang	19,11 Juta Orang	91,7%
		Persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan non migas terhadap total pekerja	14,96%	14,23%	94,45%
		Produktivitas tenaga kerja sektor industri nonmigas	Rp115,77 juta/orang/ tahun	Rp114,33 juta/orang/ tahun	98,76%
		Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas	Rp334,9 triliun	Rp457,62 triliun	136,64%
		Utilisasi Sektor Industri	64,46%	69,53%	107,87%
		Efisiensi sumber daya industri dalam rangka peningkatan daya saing industri hijau	5%	7,09%	141,80%
		Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	79%	100%	126,58%
		Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi	27.600 Orang	27.769 Orang	100,61%
2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0	44 Perusahaan	59 Perusahaan	134,09%
		Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi	13,51%	11,81%	89,81%
		Tumbuh dan berkembangnya IKM start up berbasis teknologi	100 IKM	162 IKM	162%





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1262 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		Kemampuan sektor Industri Kecil Menengah melalui penerapan Making Indonesia 4.0	1.500 IKM	4.247 IKM	283,13%
		SDM Industri 4.0 yang meningkat kompetensinya	400 Orang	483 Orang	120,75%
3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa serta Industri Halal Dalam Negeri	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Kemenperin	80%	85,7%	107,13%
		Substitusi Impor Produk Industri Pengolahan Nonmigas	35%	-5,72%	-16,34%
		Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang)	50,9%	49,8%	97,84%
		Produk tersertifikasi TKDN > 25% yang masih berlaku	7.130 Produk	30.163 Produk	433,04%
		SNI bidang industri yang diterapkan dan diberlakukan	10%	5,6%	56%
		Tingkat efektivitas pelaksanaan promosi dan kampanye industri halal	3 Skala 1-4	3 Skala 1-4	100%
		Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	65%	98,61%	151,71%
4	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri	Nilai ekspor produk industri pengolahan nonmigas	US\$145,5 Miliar	US\$206,35 Miliar	141,82%
		Pertumbuhan ekspor industri pengolahan nonmigas	8,35%	16,45%	197,01%
		Kontribusi ekspor produk industri pengolahan nonmigas terhadap total ekspor	75,47%	70,67%	93,64%
		Penambahan jenis produk industri pengolahan nonmigas yang diekspor	29%	41%	141,38%
		Rasio impor bahan baku sektor industri terhadap PDB sektor industri nonmigas	38,05%	48,09%	73,61%
5	Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas	19,2%	21,17%	110,26%
		Wirausaha industri kecil yang tumbuh	12.000 WUB	20.592 WUB	171,60%
		IKM yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya	120 IKM	149 IKM	124,17%
		Proporsi nilai penyaluran pinjaman perbankan kepada IKM	3,35%	10,22%	305,07%
6	Meningkatnya Persebaran Industri	KI prioritas di luar Jawa yang beroperasi dan meningkatkan investasi	15 KI	14 KI	93,33%
		KI yang dikembangkan	26 KI	26 KI	100%
		KI dengan zona tematik yang beroperasi	3 KI	3 KJ	100%



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1263 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		Persentase nilai tambah sektor industri yang diciptakan di luar Jawa	31,5%	31,96%	101,46%
		Sentra industri kecil dan menengah (IKM) di luar Jawa yang beroperasi	29 Sentra IKM	37 Sentra	127,59%
7	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Kemenperin	76%	77,48%	101,95%
		Persentase kesesuaian jumlah peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian yang ditetapkan dengan program penyusunan peraturan perundang-undangan	65%	66,67%	102,56%
8	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya saing dan Berkelanjutan	Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH)	46 Perusahaan	66 Perusahaan	143,48%
		Infrastruktur kompetensi industri	10 SKKNI	7 SKKNI	70%
9	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Batas toleransi temuan pengawasan eksternal	1,3%	0,033%	197,64%
		Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	92%	86,52%	94,04%
		Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian	3 Level	2,85 Level	95%
10	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Profesional dan Berkepribadian	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Kemenperin	73 Indeks	56,87 Indeks	77,9%
		Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik	85%	96,91%	114,01%
11	Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas	Data dan informasi sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan	3,12 Skala	3,34 Skala	107,05%
		Tingkat ketepatan waktu penyampaian informasi baku secara periodik	83%	100%	120,48%
12	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Tingkat akuntabilitas laporan keuangan dan BMN	Opini WTP	Opini WTP	100%
		Indeks RB Kementerian Perindustrian	78,6	79,2	100,76%
13	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel	Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan prioritas nasional	95,9%	97,96%	102,15%
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian	78,2	78,7	100,38%

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2022 adalah sebagai berikut.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1264 -

No	Program	Pagu (Rp.000)	Realisasi (Rp.000)	%
1	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	482.342.061	475.617.095	98,61
2	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industr	745.867.747	732.213.934	98,17
3	Program Dukungan Manajemen	1.406.090.418	1.377.234.331	97,95
	Jumlah	2.634.300.226	2.585.065.361	98,13

Hambatan atau permasalahan dalam pencapaian kinerja Kementerian Perindustrian antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut

1. Pandemi Covid-19 yang masih terus berlangsung sejak awal tahun 2020 mengakibatkan terjadinya pelemahan ekonomi yang mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat dan lesunya pasar.
2. Pertumbuhan Tiongkok yang terus menurun dan resesi di Negara-negara Eropa berdampak pada industri yang berorientasi ekspor maupun yang mendapatkan bahan baku dari Negara tersebut.
3. Adanya Automatic Adjustment (AA) berpengaruh pada perencanaan target output kegiatan, proporsi kegiatan dan outputnya, dan capaian kinerja.
4. Kasus cemaran pada obat sirup yang menyebabkan gagal ginjal akut pada anak berdampak pada penurunan permintaan sehingga utilisasi industri farmasi menurun.
5. Terdapat beberapa KBLI yang belum disepakati dalam forum koordinasi evaluasi PP 78/2019 dan beberapa usulan pos tarif dalam lampiran Permenperin 32 tahun 2020 yang masih membutuhkan konfirmasi dan pembahasan lebih lanjut dari pelaku industri dan sektor pembina industri.
6. Terkait capaian program substitusi impor yang belum tercapai sesuai target, beberapa kendala yang masih menghambat antara lain belum optimalnya: 1) penerapan dan pengawasan tata niaga impor; 2) pemberlakuan dan pengawasan SNI wajib produk; 3) penyerapan TKDN; 4) pemanfaatan forum hulu-hilir (supply-demand); dan 5) pemutakhiran dan pemanfaatan data industri melalui SIINas.
7. Pelaksanaan harmonisasi rancangan peraturan dengan Kementerian Hukum dan HAM terhambat karena padatnya jadwal tim harmonisasi Kementerian Hukum dan HAM. Juga rancangan peraturan yang sudah diharmonisasikan dengan Kementerian Hukum dan HAM tidak segera diperbaiki oleh pemrakarsa, sehingga penetapannya menjadi lebih lama.
8. Adanya perubahan metode penilaian pada penilaian SAKIP 2021 berdasarkan PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adanya peraturan-peraturan baru yang memerlukan koordinasi mengenai implementasi pada internal Kemenperin seperti peraturan mengenai SPIP dan Manajemen Risiko, peraturan pertanggungjawaban anggaran, dan peraturan terkait jabatan fungsional bidang keuangan. Selain itu adanya update terhadap aplikasi pengelolaan dan pelaporan keuangan menyebabkan perlu adanya penyegaran pemahaman dan pelatihan secara teknis bagi SDM.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1265 -

9. Terputusnya kerjasama layanan jasa antara balai dengan beberapa industri dikarenakan banyak industri dan IKM yang tutup/tidak berproduksi sebagai dampak belum normalnya aktivitas industri pasca pandemi.
10. Sebagian besar pengadaan belanja barang berupa pembelian bahan kimia, dan belanja modal berupa pembelian alat laboratorium adalah barang impor yang membutuhkan izin yang rata-rata diperoleh Bulan Juni 2023.
11. Adanya kebijakan pembatasan sertifikasi luar negeri yang berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PNBP balai.
12. Rendahnya tingkat keikutsertaan ASN Kemenperin dalam diklat/pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pegawai menyebabkan target indikator rata-rata indeks profesional ASN belum dapat dicapai.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Perindustrian sebagai strategi untuk mempercepat pertumbuhan sektor industri adalah sebagai berikut.

1. Indonesia kembali dipercaya untuk menjadi partner country pada Hannover Messe 2023, suatu event pameran teknologi industri terbesar dunia, pada 17-21 April 2023 di Hannover, Jerman. Hannover Messe 2023 tidak hanya sebagai ajang promosi bagi Indonesia, tetapi juga untuk menunjukkan kesiapan dan kapabilitas sektor manufaktur Indonesia menuju era digital. Event ini juga membuka jalan yang lebar bagi masuknya investasi ke dalam negeri maupun kemitraan pelaku industri pada jaringan rantai suplai global (global supply chain).
2. Program restrukturisasi mesin/peralatan industri tekstil akan mendapat perhatian khusus sebagai upaya mengakselerasi peningkatan kinerja industri TPT di pasca pandemi Covid-19. Disamping itu, fokus program juga diarahkan pada industri penyempurnaan kain dan pencetakan kain dengan memberikan penggantian/reimburse potongan harga senilai 10% dari total investasi mesin/peralatan yang berasal dari impor atau 25% untuk mesin/ peralatan produksi dalam negeri.
3. Kementerian Perindustrian akan mengembangkan dan memperkuat program kemitraan yang saling menguntungkan antara industri pengolahan susu dengan koperasi atau peternak sapi perah lokal. Program ini didukung juga oleh digitalisasi rantai pasok susu. Ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian industri pengolahan susu dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor.
4. Pembangunan fasilitas produksi fitofarmaka di Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia Farmasi & Kemasan Jakarta yang mencakup gedung fasilitas produksi fitofarmaka; peralatan proses produksi fitofarmaka; dan Peralatan pendukung dan utilitas fasilitas. Fasilitas produksi fitofarmaka dimaksudkan untuk menuju kemandirian obat tradisional terstandar dan mendukung program substitusi impor.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1266 -

5. Kementerian Perindustrian melalui Pusat P3DN kembali memberikan fasilitasi sertifikasi secara gratis kepada perusahaan industri dalam negeri meliputi tetapi tidak terbatas pada produk industri alat kesehatan, alsintan, farmasi, permesinan, elektronika dan telematika, logam, kelistrikan, kimia, pupuk, otomotif dan komponennya, keramik, semen, tekstil, dan produk IKM. Fasilitasi sertifikasi TKDN pada tahun 2023 diberikan sekurang-kurangnya untuk 2.000 sertifikat produk.
6. Untuk mengakselerasi KBLBB, Kementerian Perindustrian akan melakukan pengembangan road map industri KBLBB secara komprehensif, percepatan pengembangan komponen utama dan komponen pendukung industri KBLBB, percepatan produksi peralatan pengisian daya (*charging station*) dan komponen penunjang industri KBLBB; dan penguatan kemampuan proses dan pengukuran presisi pada tier 2 dan tier 3 rantai suplai industri KBLBB.
7. Kementerian Perindustrian juga akan memperkuat penumbuhan dan pengembangan IKM startup berbasis teknologi. Sebanyak 40 IKM startup ditargetkan tumbuh pada tahun 2023. Beberapa program terkait antara lain Indonesia Food Innovation (IFI) di sektor pangan, Bali Creative Industry Center (BCIC) di sektor kriya dan fesyen, Startup 4 Industry, dan Inkubator Bisnis Teknologi Alas Kaki. Program restrukturisasi mesin/peralatan IKM, sertifikasi produk, pengembangan produk, kemitraan, dan e-smart IKM juga akan diintensifkan.
8. Kementerian Perindustrian telah membangun Pusat Industri Digital Indonesia 4.0 atau PIDI 4.0 yang saat ini telah memiliki ekosistem transformasi digital sebanyak 35 perusahaan industri, penyedia teknologi, integrator, accelerator, Start Up, universitas dan lembaga litbang. Pada tahun 2023, PIDI 4.0 bersama dengan partner ekosistemnya akan menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan kepada industri dalam proses transformasi di perusahaan industri, serta penumbuhan dan Pengembangan start up teknologi.

Rencana ke depan yang akan dilaksanakan Kementerian Perindustrian untuk meningkatkan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut.

1. Kementerian Perindustrian berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan memperkuat sektor industri di Indonesia. Salah satu langkah strategisnya adalah menyediakan sumber daya manusia (SDM) atau tenaga kerja industri yang adaptif terhadap perkembangan teknologi terkini. Kementerian Perindustrian menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis teknologi untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri di era digitalisasi industri 4.0. Kementerian Perindustrian menyelenggarakan program-program best practice kemitraan yang *link and match* antara dunia pendidikan dan dunia Industri sehingga ketimpangan *supply* dan *demand* di unit pendidikan dan pelatihan industri tidak terjadi. Kemitraan dengan industri menjadi faktor kunci suksesnya penyelenggaraan program vokasi industri.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1267 -

2. Melakukan pelatihan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan non-migas berupa diklat 3 in 1 yang memiliki jenis diklat berupa *skilling*, *up-skilling* dan *re-skilling*.
3. Memperkuat penerapan teknologi industri 4.0. Salah satu upaya dalam meningkatkan penerapan teknologi 4.0 adalah dengan menerapkan Internet of Things (IoT) pada lini produksi, program restrukturisasi mesin dan peralatan industri. Transformasi Industri 4.0 bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas internal di bidang digital pada aspek *people* sehingga dapat mengoptimalkan *revenue sharing*.
4. Perluasan produksi maupun investasi baru di arah hilir dan *midstream industry* untuk mengisi kekosongan pada pohon industri.
5. Mendorong Penghargaan Industri Hijau untuk diselenggarakan tiap tahun sehingga industri akan menyusun laporan manajemen dan efisiensi sumberdaya secara rutin; pengumpulan data secara individual menjadi kunci untuk mendapatkan data yang akurat dan lengkap. Kunjungan lapangan ataupun kunjungan industri secara virtual dapat dilaksanakan bersamaan dengan Green Recovery inhouse training, dan Database efisiensi sumberdaya industri dapat diintegrasikan ke dalam SIINas
6. Melakukan optimalisasi dan efisiensi dengan anggaran yang ada; melakukan *tracing study* dan menjalin kerja sama industri lebih luas; melakukan tracing alumni dan meningkatkan kerja sama dengan industri terkait rekrutmen alumni; dan meningkatkan koordinasi dengan dunia industri.
7. Melakukan diklat *on-site/* di perusahaan terkait; melakukan Kerja sama dengan LSP yang memiliki kompetensi dan peralatan yang dibutuhkan.
8. Mereviu aplikasi pencatatan pengadaan dalam hal pemilihan sumber produk pengadaan serta melakukan pengadaan melalui platform e-purchasing. Disamping itu, juga mendorong satuan kerja untuk memenuhi capaian belanja produk dalam negeri, mengoptimalkan belanja produk UMKM yang ditargetkan 40% dari total anggaran Kementerian/Lembaga secara nasional, dan memaksimalkan capaian belanja produk dalam negeri di aplikasi Siswas P3DN oleh BPKP yang rencananya akan beralih pada aplikasi MonSAKTI.
9. Berkoordinasi secara intensif guna mengawal pengembangan KI dan menyelesaikan kendala yang masih ada.
10. Penyusunan insentif pembentukan KI Halal, mendorong sertifikasi dan standarisasi produk halal, penyusunan Roadmap Pengembangan Industri Halal, pembangunan Indonesia Halal Integrity Community dengan Halal Traceability System, perumusan insentif baik fiskal maupun non fiskal bagi KIH dan perusahaan didalamnya agar KIH semakin berkembang dan okupansinya meningkat, penyusunan petunjuk teknik rincian program pembangunan, salah satunya juga terkait insentif penerapan KI yang berwawasan lingkungan, serta berkoordinasi ke calon Kawasan Industri Halal (KIH) di Jababeka, Makassar, dan NTB.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1268 -

11. Meningkatkan koordinasi antar unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian serta mendorong penguatan substansi dan percepatan tindak lanjut hasil harmonisasi, meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM dan Sekretariat Kabinet, mendorong pemrakarsa agar rancangan peraturan perundang-undangan yang tidak selesai dalam tahun 2022 agar dimasukkan ke Progsun Kementerian Perindustrian tahun 2023.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1269 -



**Kementerian Perdagangan**

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2022, Kementerian Perdagangan telah menetapkan 9 sasaran strategis dengan 23 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2022, dari 17 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, sebanyak 9 indikator kinerja (52,94%) memiliki capaian melebihi target, 4 indikator kinerja (23,53%) sesuai target, dan 4 indikator kinerja (23,53%) tidak mencapai target.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2022:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non Migas yang Bernilai Tambah	Neraca Perdagangan Barang	31,4 – 31,7 USD miliar	54,53 USD miliar	172,02%
		Pertumbuhan Ekspor Riil Barang dan Jasa	5,1 – 5,5 Persen	16,28 Persen <sup>3)</sup>	295,6%
		Pertumbuhan Ekspor Non Migas	0,8 – 1,2 Persen	25,8 Persen <sup>2)</sup>	2,150
		Rasio Ekspor Jasa Terhadap PDB	1,6 – 2,0 Persen	2,0 Persen <sup>4)</sup>	100%
		PTA/FTA/CEPA yang disepakati	30 Kesepakatan (kumulatif)	34 Kesepakatan (kumulatif)	113,33%
2	Terwujudnya Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok	Inflasi Pangan yang Bergejolak	2,1 – 4,1 Persen	5,61 persen	63,17%
3	Terwujudnya Konsumen Berdaya dan Pelaku Usaha yang Bertanggung jawab	Indeks Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Indeks 50	Indeks 56,71	113,42%
		Persentase Penyelesaian Layanan Pengaduan Konsumen yang Melakukan Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik	100 Persen	99,96 Persen	99,96%
4	Meningkatkan Pasar Produk Dalam Negeri	Pertumbuhan PDB Sub-sektor Perdagangan Besar dan Eceran, bukan Mobil dan Sepeda Motor	5,3 Persen	6,55 Persen	123,58%





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1270 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		Kontribusi Produk Dalam Negeri Terhadap Konsumsi Rumah Tangga Nasional	94,5 Persen	97,10 Persen	101,72%
5	Optimalnya Peranan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, Dan Pasar Lelang Komoditas	Pertumbuhan Nilai Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK)	10 Persen	20,22 Persen	202,20%
		Pertumbuhan Nilai Resi Gudang yang Diterbitkan	9 Persen	1.046,45 Persen	11.627,26%
		Pertumbuhan Realisasi Nilai Transaksi Pasar Lelang Komoditas	75 Persen	-65,48 Persen	-87,31%
6	Meningkatnya Kinerja Perdagangan yang Bersih, Akuntabel dan Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai 80	Nilai 80,09 <sup>1)</sup>	100,11%
		Unit Kerja yang Mendapatkan Predikat "Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)" dan/atau "Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)"	7 Unit Kerja	12 Unit Kerja	171,43%
		Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Predikat BB	Predikat BB	100%
		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	WDP	75%
		Tingkat Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Predikat Baik	Predikat Baik <sup>5)</sup>	100%
7	Meningkatnya Kapabilitas SDM Perdagangan	Indeks Profesionalisme SDM Perdagangan	Predikat Sedang	Predikat Sedang	100%
8	Optimalisasi Pemanfaatan Forum G20 untuk Peningkatan Perdagangan dan Sukses Penyelenggaraan Side Events G20	Persentase Posisi Kepentingan Perdagangan Indonesia yang diterima dalam Deklarasi Presidensi G20	75 Persen	100 Persen	133%
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Side Events G20	75 Indeks	88,67 Indeks	118,2%
9	Meningkatnya Kualitas Ekosistem Perdagangan Digital	Pertumbuhan UMKM yang Memasarkan Produk melalui Perdagangan Sistem Elektronik	5 Persen	22 Persen	446%

Keterangan:

- 1) Target yang tercantum dalam dokumen RKP 2021
- 2) Angka kumulatif/pertumbuhan Januari – November 2021 dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
- 3) Angka pertumbuhan Januari – September 2021 dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
- 4) Angka Sementara (Data Periode Januari – Juni 2021).
- 5) Hasil Pengukuran Indeks SPBE Tahun 2019. Pengukuran dilakukan 2 tahun sekali oleh Kementerian PAN-RB, dimana hasil pengukuran tahun 2021 baru akan diumumkan pada triwulan I tahun 2022.

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Sekretariat Jenderal	764.880.907.000	749.259.730.5179	97,96



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1271 -

2	Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam negeri	633.159.654.000	597.998.098.193	94,45
3	Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri	101.955.052.0000	99.340.688.621	97,44
4	Direktorat Perundingan Perdagangan Internasional	105.863.211.000	103.944.218.008	98,19
5	Inspektorat Jenderal	35.261.692.000	34.817.763.386	98,74
6	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional	194.756.928.000	189.730.880.080	97,42
7	Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	48.919.597.000	47.851.419.341	97,82
8	Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan	29.051.025.000	28.777.026.652	99,06
9	Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	230.476.318.000	225.881.793.523	98,01
Jumlah		2.144.324.384.000	2.077.601.618.322	96,89

Hambatan atau permasalahan serta upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja Kementerian Perdagangan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kendala Peningkatan Pertumbuhan Ekspor Nonmigas

Kondisi ekspor pada tahun 2022 tetap menghadapi berbagai tantangan. Pandemi Covid19 dan invasi Rusia ke Ukraina semakin menyumbat disrupsi pasokan energi dan pangan dunia. Kedua hal ini secara simultan berdampak buruk pada meningkatnya biaya hidup dari sektor energi dan pangan. Besarnya kontribusi ekspor Rusia dan Ukraina menyebabkan substitusi supply global dan normalisasi harga komoditas membutuhkan waktu lebih lama. Tekanan inflasi global di tahun 2022 masih tinggi dibandingkan tahun 2021 walaupun di akhir tahun inflasi melemah. Inflasi Indonesia per November 2022 mencapai 5,42 persen, naik 3,67 persen dibandingkan November 2021. Kenaikan inflasi ini menyebabkan daya saing barang ekspor berkurang, hal ini terjadi karena harga barang ekspor semakin mahal.

Selain itu, kondisi ekonomi pasca pandemi Covid-19 yang berfluktuasi mengganggu stabilitas output global dan menyebabkan pertumbuhan negatif di bidang perdagangan. Shock suatu negara dapat menyebar ke negara lain karena terhubung ke dalam Global Value Chain (GVC). Kondisi GVC yang belum berjalan baik menyebabkan terganggunya kinerja ekspor. Masih tingginya biaya logistik juga menambah biaya ekspor atas beberapa produk unggulan Indonesia. Menurut Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia biaya logistik di Indonesia mencapai 24 persen dari total PDB atau senilai Rp1.820 triliun per tahun merupakan biaya logistik paling tinggi di dunia. Biaya logistik di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Malaysia yang hanya 15 persen, serta AS dan Jepang masing-masing sebesar 10 persen. Selain itu, menurut Kementerian Perhubungan, prasarana logistik Indonesia yang masih konvensional, seperti jalan pelabuhan, dan hubungan antarmoda, belum terbangunnya konektivitas antara satu lokasi dengan lainnya, serta pengiriman kontainer ke daerah jauh lebih mahal apabila dibandingkan dengan mengirim 35 kontainer ke luar negeri. Selain biaya bongkar muat di pelabuhan yang tinggi, akses jalan dari dan menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara selalu macet dan tidak pernah terselesaikan. Akibatnya, sangat sulit bagi perusahaan angkutan barang untuk mengoptimalkan perputaran kendaraannya



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1272 -

Salah satu strategi Kementerian Perdagangan dalam mendorong pertumbuhan ekspor non migas adalah dengan melihat posisi produk ekspor Indonesia terhadap permintaan dunia.

Terdapat 4 (empat) posisi produk Indonesia terhadap permintaan dunia, yaitu:

1. Kuadran 1 *Winners in Growing Global Market*, yaitu: produk Indonesia yang mengalami trend ekspor positif dan trend impor dunia juga positif. Produk-produk tersebut adalah: Besi dan Baja (HS 72), produk kertas (HS 48), produk TPT/ Rajutan (HS 61), dan produk tembaga (HS 74).
2. Kuadran 2 *Winners in Declining Global Market*, yaitu: produk Indonesia yang mengalami trend ekspor positif, namun memiliki trend impor dunia yang negatif. Produk-produk tersebut adalah kendaraan bermotor dan suku cadangnya (HS 87) dan produk pulp/kayu (HS 47).
3. Kuadran 3 *Losers in Growing Global Market*, yaitu: produk Indonesia yang mengalami trend ekspor negatif, namun memiliki trend impor dunia yang positif. Produk-produk tersebut adalah produk minyak nabati (HS 15), produk mesin dan peralatan (HS 84), produk TPT/ bukan rajutan (HS 62), dan produk karet (HS 40).
4. Kuadran 4 *Losers in Declining Global Market*, yaitu: produk Indonesia yang mengalami trend ekspor negatif dan trend impor dunia juga negatif. Produk ini sangat sulit untuk dikembangkan. Produk-produk tersebut adalah produk benang dan serat fiber (HS55), produk timah (HS 80), dan produk kapas (HS 52).

Dari posisi produk ekspor Indonesia tersebut, maka Kementerian Perdagangan melakukan strategi untuk fokus kepada produk-produk yang terdapat **pada kuadran 3, yaitu fokus pada** produk Indonesia yang mengalami trend ekspor negatif, namun memiliki trend impor dunia yang positif antara lain melalui:

1. Merevisi kebijakan yang menghambat.
  2. Melakukan promosi dan misi dagang secara gencar.
  3. Melakukan diversifikasi pasar.
  4. Pengembangan dan adaptasi produk.
  5. Inisiasi/ implementasi perjanjian.
2. Kendala Pencapaian Target Rasio Ekspor Jasa Terhadap PDB
- Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian perjanjian perdagangan internasional pada tahun 2021 disebabkan beberapa negara mitra perundingan berfokus pada pemulihan ekonomi negaranya dari dampak Covid-19 sehingga melakukan penundaan putaran perundingan.
3. Kendala Pencapaian Target Pertumbuhan Nilai transaksi Perdagangan Berjangka komoditi (PBK). Dalam pelaksanaannya, pencapaian Nilai Transaksi PBK mengalami beberapa kendala seperti:
- a. Kontrak-kontrak berjangka yang ditawarkan oleh Bursa Berjangka masih terbatas sehingga transaksi PBK masih didominasi oleh transaksi SPA;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1273 -

- b. Jumlah partisipasi yang minim dari masyarakat maupun pihak terkait dalam perdagangan seperti produsen, processor, pedagang, dan konsumen;
  - c. Masih terbatasnya informasi dan edukasi tentang perdagangan berjangka komoditi;
4. Kendala Pencapaian Target Pertumbuhan Nilai Resi Gudang yang Diterbitkan

Tantangan utama dalam menggerakkan gudang-gudang Sistem Resi Gudang (SRG) yang telah dibangun dan saat ini terhenti atau masih belum operasional SRG adalah:

- a. Pemda selaku pemilik aset Gudang dan Sarprasnya, kesulitan dalam menemukan badan usaha berbadan hukum yang memenuhi persyaratan dan memiliki kapasitas untuk menjadi Pengelola Gudang SRG;
- b. Biaya sewa untuk gudang SRG diatur melalui Perda dengan nilai yang sangat tinggi sehingga memberatkan Pengelola Gudang potensial / aktif;
- c. Kondisi gudang atau sarana gudang memerlukan perbaikan untuk dapat digunakan;
- d. Ketersediaan Lembaga Penilaian Kesesuaian Uji Mutu Komoditas atau Lembaga Pembiayaan yang berada jauh dari lokasi Gudang;

Tindak lanjut yang dilakukan guna lebih mengoptimalkan peranan SRG, Bappebti telah dan terus melakukan beberapa hal seperti:

- a. Memberikan Pelatihan Kompetensi kepada Calon Pengelola Gudang terkait dengan pengembangan usaha berbasis SRG serta memberikan sosialisasi dan edukasi SRG kepada para petani dan pelaku usaha, termasuk memberikan pelatihan pengujian mutu komoditas untuk Pengelola Gudang sehingga membuka peluang Pengelola Gudang dapat menjadi Lembaga Penilaian Kesesuaian Uji Mutu Barang;
- b. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dalam hal pengalokasian anggaran daerah guna dukungan teknis terhadap pelaksanaan SRG yang dituangkan dalam Pedoman Penyusunan APBD. Selain itu, Bappebti bersama Kemendagri membuka ruang konsultasi Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, agar kendala pemanfaatan Gudang SRG dapat teratasi;
- c. Bekerja sama dengan Bank Indonesia dan OJK untuk memperkenalkan SRG kepada perbankan dalam kegiatan yang diselenggarakan baik oleh Bapp4,i, Bank Indonesia maupun OJK, seperti: sosialisasi, pelatihan, pertemuan tahunan perbankan dengan OJK, pembangunan cluster BI, dll;
- d. Melakukan pembahasan revisi Skema Subsidi Resi Gudang dengan Kementerian Keuangan agar plafon pembiayaan subsidi menjadi lebih tinggi, jangka waktu lebih lama dan mencakup juga subsidi margin pembiayaan berbasis syariah;
- e. Membentuk Tim Kelompok Kerja SRG yang beranggotakan K/L dan stakeholder terkait untuk akselerasi implementasi SRG melalui sinergi program kerja / kegiatan dan anggaran;
- f. Perluasan pemanfaatan SRG melalui:



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1274 -

- 1) Optimalisasi Gudang SRG Pemda (yang dibangun kemendag) khususnya untuk komoditas Gabah/Beras dan Jagung melalui koordinasi dengan Pemda yang melibatkan kepala daerah
  - 2) Melakukan bimbingan teknis kepada pengelola gudang SRG, pelaku usaha dan aparatur pemda (penyuluh pertanian)
  - 3) Koordinasi dengan K/L terkait untuk sinergi program kerja dan mendorong perluasan pelaksanaan SRG.
  - 4) Mengkomunikasikan dengan perwakilan perdagangan di luar negeri (atase perdagangan / ITPC) untuk perluasan akses pasar ekspor.
  - g. Melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Daerah guna mengaktifkan gudang-gudang SRG yang belum pernah beroperasi, termasuk membantu mencari calon Pengelola Gudang potensial dan mendorong Pengelola Gudang SRG yang profesional dan yang memiliki permodalan cukup untuk mengelola Gudang SRG lain yang masih idle.
  - h. Melakukan percepatan pelaksanaan Lembaga Penjamin Resi Gudang melalui perubahan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 2014 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang. Dengan perubahan Peraturan Pemerintah ini diharapkan Lembaga Pelaksana Penjaminan SRG yang baru dapat segera ditetapkan dan berfungsi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang.
5. Kendala Pencapaian Target Pertumbuhan Realisasi Nilai Transaksi Pasar Lelang Komoditas Dalam pelaksanaannya, pasar lelang komoditas mengalami beberapa kendala seperti:
- a. Penyelenggara lelang mengalami kesulitan dalam menarik partisipasi para pelaku usaha komoditas (dan pabrikan) potensial dalam bertransaksi melalui PLK;
  - b. Kurangnya prasarana dan SDM yang memadai untuk menyelenggarakan lelang secara online;
  - c. Frekuensi dan kontinuitas penyelenggaraan lelang yang masih belum terjadwal secara teratur sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi para anggota lelang (pelaku usaha);
  - d. Maraknya praktek perdagangan tidak sehat misalnya tengkulak, pengijon, penimbunan ilegal;
  - e. Kualitas komoditas yang tidak standar dan ketersediaan komoditas yang tidak berkesinambungan dalam perdagangan di PLK, serta belum mengoptimalkan perdagangan untuk komoditas unggulan daerah;
  - f. Kurangnya publikasi dan literasi guna meningkatkan minat pelaku usaha untuk memanfaatkan pasar lelang;
  - g. Pengembangan PLK di daerah masih bergantung pada Dana Dekon (APBN) Kementerian Perdagangan.

Tindak lanjut yang dilakukan guna lebih mengoptimalkan peranan pasar lelang komoditas:



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1275 -

- a. Optimalisasi pemanfaatan sistem pasar lelang terpadu untuk pelaksanaan PLK secara online sehingga dapat mewujudkan tata niaga komoditas yang lebih efektif dan efisien.
  - b. Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait:
    - 1) Pengembangan PLK di daerah untuk komoditas unggulan
    - 2) Percepatan proses Revitalisasi PLK di daerah
    - 3) Sosialisasi PLK kepada para pelaku usaha
  - c. Optimalisasi pemanfaatan Dana Dekonsentrasi Kementerian Perdagangan untuk pengembangan PLK di daerah dengan merumuskan arah kebijakan Dana Dekonsentrasi pada beberapa aspek, antara lain:
    - 1) Peningkatan partisipasi pelaku usaha dalam PLK
    - 2) Penyelenggaraan PLK difokuskan pada komoditas unggulan daerah
    - 3) Perencanaan proses revitalisasi yang terukur
    - 4) Perluasan pemanfaatan SPLT melalui program bimtek ke pelaku usaha
  - d. Menambah jumlah penyelenggara PLK dari pihak swasta melalui pemberian persetujuan
6. Kendala Pencapaian Target Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan
- Terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi dalam tercapainya WTP pada Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan:
- a. Koordinasi dengan Satuan Kerja Daerah, dimana Kementerian Perdagangan turut mengalokasikan anggaran Dekonsentrasi (DK) bagi pemerintah tingkat propinsi serta Tugas Pembantuan (TP) bagi pemerintah tingkat kabupaten/kota dengan metode pelaksanaan anggaran DK/TP bersifat independen dilaksanakan oleh pemda sendiri namun wajib dilaporkan dalam Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan. Hingga saat ini turnover SDM pada lingkungan pemerintah daerah terus terjadi di mana staf/pejabat pengelola anggaran DK/TP alokasi Kemendag yang telah dilatih dan berpengalaman mendapat penugasan di dinas/bidang lain sehingga perlu dilakukan pelatihan/sosialisasi/monev secara berkala.
  - b. Pandemi Covid 19, dimana adanya pembatasan pergerakan sosial yang turut mempengaruhi upaya-upaya pelatihan/sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta koordinasi penyampaian data terkait dengan pelaporan ataupun pemeriksaan.
  - c. Adanya kondisi pandemic COVID-19 yang dimulai pada Maret s.d Desember 2020 mempengaruhi realisasi penerimaan PNBP pada satker PNBP di lingkungan Kementerian Perdagangan.
- Upaya yang telah dilakukan dan perlu untuk dilanjutkan adalah sebagai berikut:
- a. Penyediaan aturan/petunjuk teknis bidang pengelolaan dan pelaporan keuangan dan BMN yang dipandang perlu untuk lingkup Kementerian Perdagangan.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1276 -

- b. Pelaksanaan Sosialisasi/Forum Konsultasi Teknis bidang pengelolaan dan pelaporan keuangan dan BMN dalam rangka penyebarluasan peraturan/informasi baru, menjaring permasalahan serta penyamaan persepsi.
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang pengelolaan dan pelaporan keuangan dan BMN secara berkala untuk memantau implementasi pelaksanaan di lapangan serta menjaring informasi.
- d. Pembentukan tim Ad-Hoc untuk menangani permasalahan terkait bidang pengelolaan dan pelaporan keuangan dan BMN yang membutuhkan koordinasi lintas unit Pembina baik internal Kementerian Perdagangan maupun lintas Kementerian/Lembaga.

Rencana ke depan yang akan dilaksanakan Kementerian Perdagangan untuk meningkatkan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Melakukan edukasi dan literasi kepada pelaku usaha ataupun masyarakat umum secara berkesinambungan dan tepat sasaran;
2. Melakukan reviu terhadap peraturan di bidang PBK agar peraturan yang diberlakukan dapat menyesuaikan dengan perkembangan industri berjangka;
3. Melakukan analisis terhadap produk yang layak ditransaksikan di Bursa Berjangka;
4. Melakukan reviu terhadap penyederhanaan perizinan di bidang PBK untuk mempermudah pelaku usaha yang ingin turut serta dalam PBK.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1277 -



**Kementerian Pertanian**

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2022, Kementerian Pertanian telah menetapkan 5 sasaran strategis dengan 18 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2022, dari 18 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, sebanyak 13 indikator kinerja (72,22%) memiliki capaian melebihi target, 1 indikator kinerja (5,56%) sesuai target, 3 indikator kinerja (16,67%) tidak mencapai target, dan 1 indikator kinerja (5,56%) belum dihitung capaian kerjanya.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2022.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis dalam Negeri (%)	3,64	6,40	175,82%
		Peningkatan Akses Pangan (%)	5,17	n/a	n/a
		Peningkatan Konsumsi Pangan Berkualitas (%)	2,27	5,25	231,28%
		Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan (%)	85,25	91,26	107,05%
		Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani (%)	70,20	84,25	120,01%
		Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (%)	80,50	80,03	99,42%
		Persentase Tindak Lanjut terhadap Temuan OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati yang tidak Memenuhi Persyaratan Karantina di Tempat Pemasukan/ Pengeluaran yang Ditetapkan (%)	100	100	100%
		Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaaan yang Diselesaikan (%)	43	100	232,56%





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1278 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian (%)	56,77	57,94	102,06%
		Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian (%)	88,14	95,53	108,18%
2	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian (%)	85,33	91,90	107,70%
		Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional (%)	9,21	6,90	74,92%
3	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Dimanfaatkan (%)	70	113,42	162,03%
		Persentase petani yang menerapkan teknologi (%)	80	80,83	101,04%
4	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional	Persentase SDM Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya (%)	80	90,88	113,60%
		Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya (%)	20	20,25	101,25%
5.	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian (Nilai)	81,46	79,40	97,47
		Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian (Nilai)	91,98	95,05	103,34%

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	996.638.241.000	976.908.225.660	98,02
2	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1.670.264.263.000	1.640.546.750.916	98,22
3	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	9.072.152.553.000	8.419.154.139.551	92,90
4	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	110.718.523.000	91.812.800.589	82,92
5	Program Dukungan Manajemen	4.603.170.404.000	4.521.737.594.437	98,23
Jumlah		16.442.614.461.000	15.645.607.042.565	95,15

Berbagai keberhasilan telah dicapai Kementerian Pertanian pada tahun 2022. Namun demikian pembangunan pertanian masih menghadapi beberapa permasalahan terutama dalam pencapaian produksi atas target untuk beberapa komoditas pangan strategis. Permasalahan tersebut mencakup: (1) penurunan beberapa produksi komoditas strategis; (2) keterbatasan luas kepemilikan lahan petani, (3) penurunan harga beberapa komoditas strategis di tingkat petani/peternak, (4) terjadinya wabah PMK, (5) serangan hama dan penyakit dan kondisi alam ekstrim akibat dampak perubahan iklim, (6) Refocusing/Penghematan anggaran yang dilakukan pada pertengahan tahun.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1279 -

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, maka tahun 2022 Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai upaya perbaikan guna meningkatkan kinerja pembangunan pertanian ke depan, seperti: pengembangan korporasi petani; penguatan regulasi; pengembangan kawasan komoditas; meningkatkan produksi dan kualitas komoditas prospektif ekspor; pengendalian serangan OPT serta mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim; dan pemetaan potensi pengembangan lahan.

Rencana ke depan yang akan dilaksanakan Kementerian Pertanian untuk meningkatkan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut.

1. Membangun nursery benih bawang merah melalui teknologi seedling soil block di 34 provinsi pada tahun 2023 dimana masing-masing provinsi akan diproduksi 1 juta benih bawang merah siap tanam.
2. Penguatan data Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi serta pengembangan Early Warning System, serta pengendalian OPT komoditas strategis.
3. Pengembangan Kampung Hortikultura dalam upaya mengonsolidasikan lahan-lahan dalam satu kawasan kesatuan administratif yaitu kampung atau desa dengan luasan minimal 10 ha untuk komoditas strategis dengan fasilitasi sarana produksi, seperti: benih bermutu, pupuk, mulsa, ikat kuning dan lain-lain, dalam jumlah yang memadai.
4. Bersinergi dengan direktorat terkait agar kegiatan pengembangan kawasan mendapat dukungan pengembangan pada lokasi tersebut terkait bantuan dan pendampingan pasca panen, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian.
5. Mendorong perubahan Permentan 46 Tahun 2019 dengan mengembalikan kembali ketentuan pertanaman awal bawang putih sebagai syarat penerbitan RIPH, diharapkan benih yang dihasilkan dapat diserap oleh importir yang akan mengajukan RIPH bawang putih.
6. Penambahan alokasi anggaran untuk kegiatan pengembangan aneka kacang dan umbi.
7. Meningkatkan dukungan sarana pengolahan hasil dan pemasaran produk olahan aneka umbi dan kacang.
8. Mendorong pertumbuhan eksportir baru dan ragam komoditas ekspor.
9. Melakukan koordinasi dengan Kedutaan Besar dan Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Keuangan dalam rangka mempercepat penyelesaian hambatan tarif dan non tarif antar negara.
10. Pembinaan/Pendampingan Investasi dan Pengembangan Usaha.
11. Mendorong petani dan peternak membentuk korporasi, sehingga akan lebih mudah membuka peluang pasar global. Disamping itu juga mendorong eksportir untuk terus memperkuat kemitraan.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1280 -



**Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2022, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan 4 sasaran strategis dengan 19 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2022, dari 19 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, sebanyak 13 indikator kinerja (68,42%) memiliki capaian melebihi target, 2 indikator kinerja (10,53%) sesuai target, dan 4 indikator kinerja (21,05%) tidak mencapai target.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2022.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang Berkualitas serta Tanggap Terhadap Perubahan Iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,22 poin	72,42 poin	104,62%
		Penurunan Emisi GRK pada Sektor Kehutanan dan Limbah	17,22%	56,83%	330,02%
		Penurunan Laju Deforestasi	0,20 juta Ha	0,11 juta Ha	181,82%
		Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	65 Poin	50,70 poin	78%
		Luas Lahan dalam DAS yang Dipulihkan	30.850 Ha	30.712 Ha	99,55%
		Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi	10,4 juta Ha	12,20 juta Ha	117,22%
2	Tercapainya Optimalisasi Manfaat Ekonomi Sumberdaya Hutan dan Lingkungan sesuai dengan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan	Kontribusi Sektor LHK terhadap PDB Nasional	109 triliun Rp	130,92 triliun Rp	120,11%
		Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting	14 miliar US\$	15,25 miliar US\$	108,9%
		PNBP Fungsional KLHK	4,90 triliun Rp	6,38 triliun Rp	139,38%
3	Terjaganya Keberadaan, Fungsi dan Distribusi Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan	Luas Kawasan Hutan dengan Status Penetapan	5,90 juta Ha	6,51 juta Ha	110%
		Luas Kawasan Hutan yang Dilepaskan untuk TORA	94,75 ribu Ha	113,66 ribu Ha	119%
		Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat	180 ribu Ha	427,45 ribu Ha	237,41%
4	Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik, serta Kompetensi	Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan	2,3 Poin	2,4 Poin	104,35%
		Jumlah Kasus LHK yang Ditangani Melalui Penegakan Hukum	981 kasus	1.370 kasus	139,65%



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1281 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	SDMLHK yang Berdaya Saing	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	3,81 Poin	2,73 Poin	75,83%
		Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK	75 Poin	89,98 Poin	119,97%
		Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi	81 Poin	76,14 Poin	94%
		Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Kementerian	WTP	WTP	100%
		Maturitas SPIP Kementerian	3 Level	3 Level	100%

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	2,489 Triliun	2,421 Triliun	97,27
2	Program Dukungan Manajemen	3,150 Triliun	3,081 Triliun	97,79
3	Program Kualitas Lingkungan Hidup	598,504 Miliar	589,108 Miliar	98,43
4	Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	175,248 Miliar	165,749 Miliar	94,58
5	Program Pendidikan dan Latihan Vokasi	89,597 Miliar	89,122 Miliar	99,47
	Jumlah	6,503 Triliun	6,346 Triliun	97,59

Kendala yang menyebabkan tidak terealisasinya importasi sepenuhnya yaitu:

- 1) Dari 16 importir BPO yang mendapatkan alokasi impor pada tahun 2022, terdapat 1 importir yang tidak melakukan realisasi impor BPO jenis HCFC-22 yaitu PT Citra Bersaudara Chemindo karena adanya konflik di internal perusahaannya.
- 2) Keterlambatan dalam memproduksi bahan HCFC-123 menyebabkan importir PT Brenntag tidak mendapatkan lisensi ekspor dari negara produsen (Cina).
- 3) Kekurangan bahan TCE (Trikloroetilen) yang merupakan bahan baku HCFC 123 dan daya listrik yang tidak mencukupi untuk proses produksi sehingga pihak supplier membatalkan pemesanan HCFC 123 dari PT Global Cool sebesar 15.000 KGM

Kegiatan program inventarisasi dan verifikasi tidak terlepas dari kendala, diantaranya:

- a. Pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan nilai kehati tinggi di UPT masih belum terstruktur;
- b. UPT belum seluruhnya melaporkan hasil kegiatan inventarisasi dan verifikasi lapangan;
- c. Alokasi anggaran pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan nilai kehati tinggi yang masih dinilai belum mencukupi dalam melaksanakan pengambilan data lapangan;
- d. Belum adanya panduan pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan nilai kehati tinggi sejak awal periode renstra 2020 hingga triwulan kedua tahun 2022;
- e. Data dan informasi hasil kegiatan belum terintegrasi secara utuh dalam suatu sistem database;
- f. Adanya automatic adjustment pada anggaran pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan nilai kehati tinggi; dan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1282 -

- g. Masih terdapat gap kompetensi pada SDM pelaksana, baik untuk pengetahuan ekologi tumbuhan satwa liar maupun terkait analisis data spasial.

Upaya peningkatan kualitas air terus dilakukan, namun masih terdapat beberapa kendala yang perlu pelibatan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota antara lain:

- a. Pengawasan terhadap pembuangan air limbah dari industri,
- b. Pemberian ijin pembuangan air limbah ke badan air yang belum mempertimbangkan alokasi beban pencemaran,
- c. Penanganan pengendalian pencemaran air yang bersifat parsial,
- d. Penegasan kebijakan terkait industri yang pembuangan air limbahnya ke badan air yang sudah melebihi daya tampung beban pencemaran air diwajibkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan air limbah atau alternatif kompensasi

Upaya peningkatan kualitas air dilakukan dengan beberapa kegiatan, antara lain:

- a. Melakukan pemantauan kualitas air sungai pada 34 provinsi dengan sistem onlino. Onlino adalah sistem pemantauan kualitas air secara online dan realtime menggunakan unit sensor yang terintegrasi dengan unit data logger, unit transmisi data dan sistem software. Onlino dapat diterapkan untuk pemantauan kualitas air baik di sungai, danau, waduk, pantai maupun di perairan laut atau untuk memantau air limbah di industri. Parameter yang diukur adalah Salinitas, NO<sub>3</sub>, ORP, pH, NH<sub>4</sub>, Conductivity, COD, TDS, BOD, SWSG, DO, Turbidity, dan Temperatur. Onlino dibangun sebagai upaya untuk menyediakan data dan informasi status dan kualitas air.
- b. Membangun fasilitas rumah kompos, Biodigester dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) baik domestik dan usaha kecil. Pembangunan IPAL Domestik dapat mengurangi mengurangi pencemaran air sebesar 701 ton BOD/tahun dan IPAL usaha skala kecil telah mengurangi pencemaran air sebesar

Strategi peningkatan kualitas air laut diwujudkan dengan penetapan Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut dengan beberapa strategi antara lain:

1. Gerakan Nasional Peningkatan Kesadaran Para Pemangku Kepentingan;
2. Pengelolaan Sampah yang Bersumber dari Darat;
3. Penanggulangan Sampah di Pesisir dan Laut;
4. Mekanisme Pendanaan, Penguatan Kelembagaan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum;
5. Penelitian dan Pengembangan. Strategi tersebut dilakukan dengan beberapa rangkaian kegiatan yakni :
6. Menyelenggarakan gerakan nasional sosialisasi mengenai dampak negatif sampah di laut, terutama plastik bagi kesehatan dan ekosistem, serta sosialisasi terkait pengelolaan sampah terpadu di 58 kabupaten/kota;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1283 -

7. Menyelenggarakan pelatihan pemilahan dan pemanfaatan sampah plastik di 11 kabupaten/kota;
8. Membentuk 10 program kolaborasi dengan dunia usaha, media massa, kelompok masyarakat, dan lembaga adat/agama;
9. Melakukan pemantauan sampah laut;
10. melakukan pemulihan ekosistem terumbu karang;
11. Penanggulangan pencemaran tumpahan minyak dan kejadian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut;
12. Membangun fasilitas pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut;
13. Melakukan evaluasi pengelolaan lingkungan di kawasan pelabuhan;
14. Melakukan pemantauan izin pembuangan air limbah ke laut



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1284 -



**Kementerian Ketenagakerjaan**

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2022, Kementerian Ketenagakerjaan telah menetapkan 2 sasaran strategis dengan 4 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2022, dari 4 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, seluruh indikator kinerja tidak mencapai target.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Tenaga Kerja yang Kompeten, Tangguh, Lincah, Produktif, dan Berdaya Saing dalam Hubungan Industrial yang Kondusif yang Mendukung Indonesia yang Maju, Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong	Kontribusi terhadap Produktivitas tenaga Kerja Nasional	2,88%	2,70%	93,75%
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	81,25	75,85	93,35%
		Opini BPK	WTP	WDP	75%
		Indeks SPBE	3	2,84	94,67%

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dukungan Manajemen Internal	1.158.606.474.000	1.086.064.060.582	93,74
2	Pembinaan Ketenagakerjaan	8.820.195.895.000	8.332.775.338.513	94,47
3	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	3.092.098.943.000	2.966.362.500.713	95,93
4	Riset dan Inovasi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	50.665.947.000	50.665.947.000	100
	Jumlah	13.121.567.259.000	12.435.867.846.808	94,77

Berikut upaya dan strategi Kementerian Ketenagakerjaan dalam mencapai SS-1 berdasarkan program, sebagai berikut:

1. Pembinaan pendidikan dan pelatihan vokasi;
2. Pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
3. Pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
4. Pembinaan pengawasan ketenagakerjaan dan K3



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1285 -

Hambatan atau permasalahan dalam pencapaian kinerja Kementerian Ketenagakerjaan antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Akurasi identifikasi kebutuhan pelatihan sebagai dasar penyelenggaraan pelatihan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan industri;
- b. Keterlambatan dalam memperoleh data hasil pelatihan disebabkan karena masih adanya peserta pelatihan yang tidak terdaftar dalam SIAPkerja (*recruitment* secara manual);
- c. Proses validasi data calon penerima program bantuan yang sudah melakukan pendaftaran pada sistem aplikasi Bizhub memerlukan waktu cukup lama;
- d. Tingkat pengangguran yang tinggi sekaligus tidak diimbangi dengan tingkat pendidikan, keterampilan, dan kompetensi kerja yang diinginkan pemberi kerja luar negeri, berakibat tidak "siap saji" nya *supply* tenaga kerja yang ingin bekerja ke luar negeri;
- e. Masih ditemukan perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke dalam seluruh program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PDS Program) untuk menghindari *labour cost* dengan besarnya persentasi jumlah iuran yang harus dibayarkan oleh pengusaha kepada badan penyelenggara;
- f. Belum berjalannya sistem pelaporan hasil kegiatan pengawasan oleh pengawas ketenagakerjaan daerah.

Upaya-upaya kedepan yang akan dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dalam mencapai target kinerja antara lain sebagai berikut:

- a. Memanfaatkan identifikasi kebutuhan pelatihan dan analisis pasar kerja dalam menentukan kejuruan pelatihan yang diselenggarakan BPVP;
- b. Penetapan jenis pelatihan berdasarkan analisis pasar kerja sehingga menghasilkan calon tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri;
- c. Penyelesaian petunjuk teknis di triwulan pertama untuk seluruh kegiatan yang membutuhkan petunjuk teknis. Hal ini untuk mencegah terlambatnya pelaksanaan kegiatan;
- d. Peningkatan kualitas sistem tata kelola program pelatihan melalui penggunaan SIAPkerja untuk mempermudah pendataan peserta pelatihan dan pelacakan status kebjkerjaan dari peserta tersebut;
- e. Mengoptimalkan penggunaan SIAPkerja untuk emlaksanakan komunikasi interaktif dengan masyarakat dan kelompok masyarakat calon penerima bantuan, khususnya melalui aplikasi Bizhub;
- f. Penguatan sistem pengawasan ketenagakerjaan melalui harmonisasi regulasi dan penyusunan *Grand Design* Pengawasan Ketenagakerjaan dalam rangka memberikan kepastian dan keseragaman dalam pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan baik di tingkat Pusat maupun Provinsi dan Pengawas Ketenagakerjaan di seluruh Indonesia.





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1286 -



**Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2022, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menetapkan 5 sasaran strategis dengan 15 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2022, dari 15 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, sebanyak 12 indikator kinerja (80%) memiliki capaian melebihi target, dan 3 indikator kinerja (20%) tidak mencapai target.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2022.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air	Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan pusat	68,74%	69,63%	101,29%
		Persentase peningkatan perlindungan banjir di wilayah sungai kewenangan pusat	60,28%	60,53%	100,41%
		Kapasitas tampung per kapita	59,49 m3/kapita	59,50 m3/kapita	100,02%
		Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi	21.263 m3/tahun/hektar	26.390 m3/tahun/hektar	124,11%
2	Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional	Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau	2,09	2,20	95,00%
3	Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau	Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan smart living	80,07	76,41	95,43%
		Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	58,02	57,73	99,50%
4	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	6	11,32	188,62%
		Persentase lulusan pendidikan vokasi yang kompeten dan siap kerja	80	98,49	123,11%
5	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya	Tingkat kualitas tata kelola Kementerian PUPR	77,97	80,66	103,45%
		Tingkat pemenuhan investasi/pembiayaan infrastruktur PUP yang didukung sistem, kebijakan dan strategi	100,00	107,57	107,57%



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1287 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		pembiayaan yang efisien dan efektif			
		Persentase kualitas pengawasan intern dalam penyelenggaraan infrastruktur	82	88	107,32%
		Indeks pengembangan kompetensi SDM aparatur PUPR	72	84,89	117,91%
		Tingkat keselarasan dukungan infrastruktur di kawasan strategis	70	81,12	115,89%
		Tingkat keandalan sumber daya konstruksi	57	70,33	123,39%

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	100.200.855	93.364.547	93,18
2	Program Ketahanan Sumber Daya Air	46.743.352.176	43.774.443.993	93,65
3	Program Infrastruktur Konektivitas	55.769.061.019	52.186.585.989	93,58
4	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	24.818.739.787	23.683.847.610	95,43
5	Program Dukungan Manajemen	7.984.538.501	7.620.746.627	95,44
	Jumlah	135.415.892.338	127.358.988.767	94,05

Hambatan atau permasalahan dalam pencapaian kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

1. kesiapan pelaksanaan kegiatan konstruksi yang belum optimal, terutama akibat masalah ketersediaan lahan serta proses perizinan pembebasan lahan.
2. proses pengadaan barang dan jasa yang memerlukan waktu relatif lama.
3. rendahnya komitmen pemerintah daerah dalam memberikan dukungan pelaksanaan kegiatan.
4. pasokan material yang masih belum terjaga secara konsisten sepanjang pelaksanaan kegiatan konstruksi.
5. berbagai kegiatan konstruksi terdampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM), yang mengakibatkan diperlukannya penyesuaian terhadap pengalokasian anggaran dan waktu pelaksanaan.
6. beberapa kegiatan terdampak pembekuan anggaran melalui mekanisme automatic adjustment, yang antara lain mengakibatkan diperlukannya relaksasi atau penundaan pencapaian output pekerjaan pada tahun berikutnya.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mencapai target kinerja adalah sebagai berikut.

1. sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat terkena dampak pembangunan oleh pemerintah daerah.
2. pengembangan sistem pengadaan secara elektronik agar proses tender/seleksi lebih efektif dan transparan.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1288 -

3. pemanfaatan *automatic adjustment* dan pengembalian rupiah murni ke bendahara umum negara dalam rangka optimalisasi anggaran.
4. penyiapan *readiness criteria* yang dilakukan sejak awal.
5. meneruskan kebijakan lelang dini.
6. penggunaan metode dan peralatan yang mendukung transformasi digital 4.0 di dunia konstruksi.
7. koordinasi intens dengan *stakeholders* terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan rapat koordinasi lintas sektor.
8. memitigasi risiko pada penugasan-penugasan khusus dan kondisi yang dapat berdampak negatif pada Kementerian PUPR.
9. optimalisasi indeks sistem merit dan indeks profesionalitas ASN melalui pengelolaan kinerja, penilaian potensi dan kompetensi, serta pengembangan karir.
10. pengembangan metode pembelajaran dan program pengembangan kompetensi, seperti penerapan full e-learning.
11. peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan para pihak dalam ekosistem investasi bidang PUPR (dalam dan luar negeri), khususnya terkait dengan pembiayaan alternatif atau kreatif lainnya.

Rencana ke depan yang akan dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk meningkatkan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut.

1. peningkatan sinkronisasi antara proses perencanaan, pemrograman, penganggaran, dan pelaksanaannya, guna memastikan kegiatan yang dianggarkan merupakan kegiatan-kegiatan yang benar-benar telah siap dilaksanakan.
2. meneruskan strategi pelaksanaan kegiatan dengan mekanisme lelang dini, antara lain guna mengantisipasi waktu proses pengadaan barang dan jasa yang memerlukan waktu yang lebih lama.
3. melakukan koordinasi aktif dengan pemda dalam pelaksanaan anggaran dan keberlanjutan program dari infrastruktur yang telah terbangun.
4. perlunya memastikan ketersediaan pasokan material sesuai dengan waktunya dan melakukan pemetaan terhadap material yang dapat disubstitusi apabila terdapat kendala.
5. meningkatkan koordinasi secara intensif dengan institusi/stakeholder terkait pada lokasi pekerjaan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pekerjaan, pemantauan, dan evaluasi pekerjaan.
6. mengoptimalkan penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan kegiatan, guna mengantisipasi kendala yang akan dihadapi.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1289 -



**Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2022, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah telah menetapkan 1 sasaran strategis utama dan 8 sasaran strategis dengan 21 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2022, dari 4 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, sebanyak 9 indikator kinerja (42,86%) memiliki capaian melebihi target, 2 indikator kinerja (9,52%) sesuai target, 6 indikator kinerja (28,57%) tidak mencapai target, dan 4 indikator kinerja (19,05%) belum dihitung capaian kinerjanya.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2022.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Kontribusi Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing Dalam Mendukung Perekonomian Nasional	Persentase Kontribusi Koperasi terhadap PDB	5,3%	6,07%	114,53%
		Persentase Kontribusi UMKM terhadap PDB	63%	*)	*)
		Rasio Kewirausahaan Nasional	3,17%	2,86%	90,22%
2.	Terwujudnya koperasi yang berkualitas dan modern	Persentase koperasi berkualitas	7,5%	8,5%	113,3%
		Pertumbuhan volume usaha koperasi	10%	8,51%	85,1%
		Jumlah koperasi modern	150 unit	150 unit	100%
3.	Transformasi usaha mikro dari informal ke formal	Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	4%	4,62%	115%
		Proporsi umkm yang mengakses kredit Lembaga keuangan formal	27,80%	21,41%	77,01%
4.	Transformasi umkm masuk ke dalam rantai pasok	Persentase kontribusi umkm terhadap ekspor non migas	15,80%	*)	*)
		Tingkat implementasi kemitraan strategis umkm	65%	150%	230,77%
5.	Pertumbuhan wirausaha produktif	Persentase pertumbuhan wirausaha	2,57%	1,34%	52,14%



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1290 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		Penumbuhan start-up	100 start-up	125 start-up	125%
6.	Terwujudnya kebijakan KUMKM yang berkualitas	Indeks kualitas kebijakan	80	59,53	74,41%
		Indeks kepuasan masyarakat	85	96	112,94%
7.	Terwujudnya pemberdayaan KUMKM yang efektif	Persentase SDM KUMKM yang meningkat kapasitas dan kompetensinya	70%	71,7%	102,43%
		Tingkat penerapan implementasi model bisnis KUMKM	75%	77,78%	103,71%
8.	Terwujudnya data dan informasi KUMKM yang andal dan terintegritas	Tingkat kualitas data dan informasi KUMKM	95%	95%	100%
9.	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi yang Berintegritas dan Berkinerja Tinggi	Indeks Reformasi Birokrasi	BB	**)	**)
		Indeks profesionalitas ASN	Sedang	**)	**)
		Indeks sistem merit ASN	Baik (250)	Baik (258)	103,2%
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90	88,59	98,43%

Keterangan: \*) Masih dalam proses perhitungan

\*\*\*) Hasil belum diterima dari instansi penilai

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Koperasi	917.594.115.000	861.512.971.074	93,89
2	Program Dukungan Manajemen	358.681.605.000	340.332.032.807	94,88
	Jumlah	1.276.275.720.000	1.201.845.003.881	94,17

Secara garis besar, kendala yang dihadapi dalam upaya memulihkan dan meningkatkan kinerja usaha koperasi, dalam hal ini terkait kontribusi koperasi dalam PDB, antara lain mencakup:

- 1) Pandemi covid-19 yang masih melanda dan masih terdapat pembatasan mobilitas menjadi faktor penghambat walaupun optimalisasi kegiatan telah dilakukan melalui penyelenggaraan kegiatan secara daring;
- 2) Kurangnya pemahaman pengurus dan anggota koperasi tentang tata kelola koperasi yang baik;
- 3) Partisipasi anggota koperasi dalam usaha koperasi juga belum pulih sepenuhnya;
- 4) Belum optimalnya penginputan data koperasi; dan
- 5) Koperasi sektor produksi yang masih belum optimal pengembangannya.
- 6) Struktur usaha di Indonesia didominasi oleh usaha mikro yang karakteristik pelakunya menjalankan usaha untuk bertahan hidup (survival) bukan untuk mengembangkan usahanya;
- 7) Pelaku UMKM mayoritas belum memiliki legalitas usaha sehingga berdampak pada keterbatasan terhadap akses pembiayaan;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1291 -

- 8) Masih rendahnya pengetahuan dan akses terhadap digitalisasi UMKM sehingga upaya scaling-up belum optimal; dan
- 9) Belum adanya sistem basis data tunggal UMKM sehingga berpengaruh pada kualitas kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Dalam rangka peningkatan kontribusi UMKM dalam PDB nasional tahun selanjutnya, akan dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program yang mendukung UMKM secara nyata, seperti implementasi KUR klaster, UMKM onboarding digital, 40% belanja pengadaan barang/jasa pemerintah dengan 1 juta produk UMKM masuk e-katalog pemerintah, perluasan kemitraan UMKM dengan usaha besar, dan penyaluran dana bergulir melalui koperasi sektor riil;
2. Pendampingan secara masif bagi para pelaku UMKM;
3. Dukungan dan sinergi, terutama pada sektor digital, untuk membantu UMKM mengoptimalkan pemasaran dan penjualan produknya; dan
4. Sinergi dengan para *stakeholders* berkaitan dengan inovasi dan teknologi, literasi digital, produktivitas, legalitas atau perizinan, pembiayaan, branding dan pemasaran, sumber daya manusia, standardisasi dan sertifikasi, pemerataan pembinaan, pelatihan, dan fasilitasi, serta basis data tunggal.

Selanjutnya untuk kendala dalam implementasi model bisnis skala usaha kecil dan menengah, antara lain:

- 1) Rumitnya persyaratan dan tingginya standar yang diajukan oleh BUMN;
- 2) Skema pembayaran oleh BUMN kepada UKM terlalu lama lebih dari 3 bulan sehingga menyulitkan UKM untuk perputaran modalnya;
- 3) Produk UKM sering dibandingkan dengan produk impor; dan
- 4) Tidak ada pre-financing serta pembinaan kepada UKM untuk metode proses yang dipersyaratkan.

Untuk meningkatkan kinerja pencapaian tingkat implementasi model bisnis pada tahun 2023, beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) Replikasi model tersebut kepada Koperasi lainnya;
- 2) Peningkatan kerja sama dan dukungan berbagai pihak bagi pengembangan model Koperasi;
- 3) Dukungan sumber pembiayaan secara berkesinambungan, seperti dari LPDB-KUMKM dan kredit perbankan dalam KUR petani untuk mengembangkan bisnis hortikultura lebih luas lagi;
- 4) Menghadirkan usaha besar untuk berdiskusi langsung dengan UKM untuk melihat kesiapan UKM baik dari sisi produksi, pemenuhan standarisasi dan sertifikasi; dan
- 5) Perlu adanya sinergi dan komitmen para stakeholder baik K/L yang membina UKM, Pemerintah Daerah, Asosiasi dan UKM sehingga program kemitraan UKM dengan usaha besar dapat dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan, berdampak luas, serta menjadi lokomotif yang menggerakkan UMKM kita dalam mengakses rantai pasok industri besar.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1292 -



### **Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi**

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2022, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah menetapkan 14 sasaran strategis dengan 28 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2022, dari 28 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, 19 indikator kinerja (67,85%) memiliki capaian melebihi target, 2 indikator kinerja (7,15%) sesuai target, 7 indikator kinerja (25%) tidak mencapai target.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2022.

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
1	Berkembangnya status pembangunan desa (versi IDM)	Jumlah desa mandiri	3.944 desa	6.238 desa*	158,16%
		Jumlah desa berkembang	56.791 desa	54.151 desa*	95,35%
		Jumlah desa tertinggal	14.152 desa	14.566 desa*	97,07%
2	Meningkatnya status perkembangan Kawasan Perdesaan	Nilai rata-rata indeks perkembangan 62 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)	55,50	58,83	106%
		Nilai rata-rata indeks perkembangan 30 Kawasan Perdesaan Prioritas Kementerian	54,00	54,64	101,19%
3	Menurunnya angka kemiskinan di pedesaan	Persentase kemiskinan di pedesaan	11,60%	12,36%	93,45%
4	Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)	Jumlah BUM Desa berkembang	7.500 BUM Desa	7.662 BUM Desa	102,16%
		Jumlah BUM Desa Maju	1150 BUMDesa	1208 BUMDesa***	105,04%



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1293 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
5	Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma)	Jumlah Bumdes Bersama (Bumdesma) berkembang	245 Bumdesma	331 Bumdesma	135,10%
		Jumlah Bumdes Bersama (Bumdesma) maju	155 Bumdesma	373 Bumdesma	240,65%
6	Meningkatnya investasi di pedesaan mendukung transformasi ekonomi	Persentase kenaikan investasi di pedesaan	1,75%	7,59%	433,71%
7	Meningkatnya status perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi	Nilai rata-rata indeks perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi	53,12	53,66	101,02%
		Nilai rata-rata indeks perkembangan 100 Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi	39,28	39,94	101,68
8	Berkurangnya jumlah daerah tertinggal	Jumlah kabupaten daerah tertinggal	44	44	100%
9	Menurunnya penduduk miskin di daerah tertinggal	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	24,80%	24,56%	100,97
10	Meningkatnya rata-rata IPM di daerah tertinggal	Nilai rata-rata Indeks Pembangunan Manusia di daerah tertinggal	61,00	61,27	100,44%
11	Meningkatnya kapasitas SDM desa dan pedesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi	Persentase Pejabat yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	85%	93,30%	109,76%
		Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan yang mampu melakukan pendampingan masyarakat pedesaan	85%	93,30%	109,76%
12	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan kapasitas organisasi	Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Desa, PDTT	76	78,79	103,67%
		Indeks Kesehatan Organisasi	76	78,79	103,67%





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1294 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		Indeks penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3	2,75	91,67%
		Indeks Penerapan Sistem Merit	0,75	0,69	92%
13	Meningkatnya pengawasan, pengendalian dan akuntabilitas aparatur yang baik serta aturan yang efektif	Opini BPK RI atas penyajian Laporan Keuangan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi (Bagian anggaran 067)	WTP	WTP	100%
		Indeks Integritas Organisasi	70	92	131,43%
		Nilai SAKIP Kementerian Desa, PDTT	76	64,89	85,38%
		Tingkat maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)	3	3,149	104,97%
14	Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan yang berbasis pada ilmu pengetahuan, inovasi, serta data dan informasi dalam keterpaduan rencana untuk meningkatkan daya saing pembangunan desa, perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi	Persentase dokumen pengembangan kebijakan dan perencanaan induk yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan kebijakan	85%	42,86%	50,42%
		Persentase layanan data dan sistem informasi yang terintegrasi	85%	98%	115,29

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Peningkatan dan Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	40.791.803.000	40.791.803.000	97,98%
2	Pembangunan Desa dan Perdesaan	175.007.596.000	169.508.714.893	96,86%
3	Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	311.235.151.000	242.235.559.676	77,83%
4	Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	68.835.963.000	66.644.131.656	96,82%



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1295 -

5	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	281.804.286.000	277.325.072.691	98,41%
6	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	1.782.979.394.000	1.766.177.419.645	99,06%
7	Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	210.546.974.000	209.172.786.488	99,35%
8	Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	106.846.804.000	101.649.940.365	95,14%
<b>Jumlah</b>		<b>2.978.047.971.000</b>	<b>2.872.680.558.957</b>	<b>96,46%</b>

Hambatan atau permasalahan dalam pencapaian kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Masih rendahnya akses ke pelayanan dasar, kapasitas SDM, akses ke Lembaga keuangan, pasar, dan aktivitas ekonomi, serta aksesibilitas dan konektivitas wilayah ke pusat-pusat pertumbuhan;
2. Belum terbangunnya kolaborasi antar sektor dalam mewujudkan desa mandiri. Sinkronisasi kesepahaman pengukuran status desa oleh stakeholder dengan menggunakan alat ukur yang masih berbeda, sehingga terdapat penafsiran yang berbeda dalam mengukur peningkatan status desa (IDM, IPD dan Indeks Desa);
3. Intervensi program kemiskinan belum optimal dalam menurunkan beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, dan meminimalkan jumlah kantong-kantong kemiskinan;
4. Pemberian bantuan dari pemerintah belum optimal karena terdapat berbagai sumber data yang dijadikan dasar untuk menentukan keluarga penerima manfaat, seperti DTKS (Kementerian Sosial), SDGs Desa (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi), dan data keluarga (BKKBN). Hal ini menyebabkan keluarga penerima manfaat mendapatkan bantuan ganda, sementara ada keluarga lainnya yang belum mendapatkan bantuan;
5. Adanya restrukturisasi program dan kegiatan;
6. Belum optimalnya implementasi Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 terhadap pembangunan dan perkembangan kawasan transmigrasi;
7. Kurangnya dukungan anggaran akibat refocusing;
8. Keterlambatan pengesahan STRANAS PPDT 2020-2024 sehingga menghambat pengesahan dari dokumen perencanaan tahunan PPDT. Hal ini menyebabkan kurang optimalnya upaya untuk mendorong penurunan kemiskinan di daerah tertinggal;
9. Infrastruktur manajemen talenta yang belum lengkap;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1296 -

10. Kualitas implementasi reformasi birokrasi di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi belum merata, terutama pada masing-masing unit kerja;
11. Pemantauan terhadap aksi yang dilakukan belum dilaksanakan secara intensif baik oleh pimpinan maupun oleh Tim RBI, sehingga belum memberikan peningkatan perbaikan yang signifikan terhadap peran agen perubahan dalam mendorong perubahan di masing-masing unit kerja;
12. Kebijakan yang sudah disusun maupun sedang dalam tahap penyusunan belum sepenuhnya teridentifikasi, terpetakan, dan dievaluasi dengan baik dan berkala, sehingga masih terdapat kebijakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang belum harmonis dengan kebijakan lain khususnya kebijakan yang dibuat oleh instansi terkait;
13. Penyesuaian peta bisnis proses belum dilakukan untuk menindaklanjuti penyederhanaan birokrasi terkait penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional;
14. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang belum optimal, hal ini ditunjukkan dari beberapa aplikasi manajemen internal maupun pelayanan kepada masyarakat/stakeholder yang belum terintegrasi satu sama lain antara level Kementerian dengan unit kerja;
15. Penguatan sistem manajemen SDM yang belum optimal, karena belum dilakukannya pemetaan talenta sebagai dasar penempatan jabatan kritikal/suksesi serta penyusunan perencanaan pengembangan kompetensi pegawai yang belum dilakukan secara menyeluruh;
16. Indikator kinerja individu sebagai turunan dari kinerja organisasi di atasnya belum dijabarkan dengan optimal dan belum sepenuhnya berorientasi pada hasil, sehingga pemberian reward dan punishment bagi masing-masing pegawai belum sepenuhnya didasarkan pada capaian kinerja;
17. Penguatan kebijakan pengawasan internal dan integritas, serta peningkatan kebijakan benturan kepentingan dan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
18. Implementasi pelayanan publik khususnya pada unit kerja di daerah masih perlu ditingkatkan;
19. Penerapan manajemen SPBE dan audit TIK yang dinilai kurang;
20. Penggunaan aplikasi belum seluruhnya diterapkan secara optimal;
21. Penerapan SAKIP belum mampu sepenuhnya menggambarkan efektivitas penggunaan anggaran yang dikaitkan dengan kinerja yang dihasilkan;
22. Penjabaran kinerja dari level Kementerian hingga level jabatan terendah belum memperhatikan kesesuaian dengan tugas, fungsi, dan peran yang diemban oleh setiap jenjang jabatan;
23. Perjanjian kinerja yang disusun hingga level organisasi terendah belum sepenuhnya menjanjikan kinerja atau kondisi terukur yang seharusnya diwujudkan dalam satu periode;
24. Rumusan kinerja yang dituangkan dalam dokumen perencanaan pada unit kerja belum sepenuhnya menggambarkan kriteria terukur (measurable), relevan dan cukup;
25. Pemanfaatan aplikasi perencanaan, penganggaran, dan pemantauan kinerja belum optimal digunakan sebagai alat untuk memonitor pencapaian kinerja seluruh unit kerja;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1297 -

26. Evaluasi internal yang telah dilakukan belum memberikan dampak perbaikan dalam penerapan SAKIP unit kerja;
27. Laporan kinerja yang telah disusun masih perlu disempurnakan, terutama pada kedalaman analisis atas capaian kinerja dan efisiensi penggunaan sumber daya, sehingga belum sepenuhnya dapat dijadikan sebagai dasar dalam perbaikan dan peningkatan kinerja;
28. Dokumen pengembangan kebijakan dan perencanaan induk yang sudah disusun belum diimplementasikan oleh masing-masing Unit Kerja terkait di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi karena disusun bersamaan dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam mencapai target kinerja adalah sebagai berikut.

1. Mainstreaming SDGs desa dalam Rencana Kerja Kementerian dan RKP Desa, serta APBDes;
2. Revitalisasi indikator perkembangan desa dan kawasan perdesaan;
3. Menanggulangi kemiskinan secara komprehensif untuk menjangkau seluruh level kemiskinan;
4. Memperkuat koordinasi dan kolaborasi multipihak dalam sinkronisasi kebijakan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pembangunan desa dan perdesaan;
5. Optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk mendorong kegiatan produktif dan memberdayakan desa sesuai ketentuan prioritas penggunaan dana desa;
6. Membangun ekosistem digital desa sebagai bagian dari adaptasi kebiasaan baru (new normal);
7. Diperlukan intervensi kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan kawasan;
8. Monitoring dan evaluasi bersama lintas Kementerian/Lembaga ke kawasan transmigrasi;
9. Koordinasi secara intensif dengan para pemangku kepentingan;
10. Melakukan pematangan penyusunan dokumen perencanaan di tingkat internal dengan tetap meningkatkan komunikasi dengan stakeholder terkait dalam percepatan pengesahan dokumen perencanaan tahunan PPDT;
11. Menyelesaikan infrastruktur terkait pelaksanaan manajemen talenta sesuai dengan regulasi;
12. Internalisasi Reformasi Birokrasi dan komitmen bersama oleh seluruh pimpinan;
13. Melakukan penetapan pedoman pelaksanaan, seleksi, peningkatan kapasitas, dan monitoring serta evaluasi agen perubahan;
14. Melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan melibatkan Kemenkumham dan K/L lain, menyusun matrik identifikasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tahun 2021, serta evaluasi berkala;
15. Penyusunan bisnis proses yang didampingi langsung oleh KemenPAN-RB serta melakukan identifikasi SOP;
16. Integrasi aplikasi sesuai arsitektur SPBE, seperti sistem informasi manajemen kepegawaian yang sudah terintegrasi dengan MySAPK;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1298 -

17. Analisis jabatan dan analisis beban kerja serta pedoman reward dan punishment yang telah diformalkan dengan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kebijakan terkait manajemen talenta sesuai dengan PermenPan 3/2020 telah selesai, assessment terhadap 200 pegawai telah dilakukan, standar kompetensi jabatan telah selesai, dan penyusunan SKP tahunan;
18. Penyusunan indikator kinerja individu yang selaras dengan level di atasnya serta Sasaran Kinerja Pegawai berjenjang dan selaras dengan IKU organisasi;
19. Penyusunan pedoman tentang Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, monthly audit, pelaporan LHKASN dan LHKPN, serta penangan Whistle Blowing System (WBS) di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang telah diterapkan dan terkoneksi dengan server KPK;
20. Penyusunan pedoman penanganan pengaduan masyarakat, koordinasi dengan K/L terkait pengaduan masyarakat dan WBS, pelaporan berkala semester kepada Inspektorat Jenderal atas Tindakan gratifikasi, MoU terkait penanganan pengaduan dalam upaya pemberantasan korupsi dengan KPK, serta sosialisasi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
21. Pelaksanaan supervisi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penerapan manajemen SPBE. Serta, melakukan pengawasan terkait penggunaan TIK;
22. Pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis yang intensif terkait penggunaan aplikasi yang sudah dibangun oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
23. Melakukan reviu kembali seluruh dokumen perencanaan yang telah disusun serta memastikan indikator kinerja yang terdapat dalam dokumen perencanaan dari level Kementerian sampai level unit kerja telah berorientasi hasil/outcome;
24. Menyusun peta strategis/kerangka logis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk menyempurnakan kembali proses cascading kinerja yang telah disusun dengan memperhatikan kesesuaian tugas, fungsi dan peran yang diemban oleh setiap jenjang jabatan;
25. Mereviu indikator kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi, serta dijadikan acuan dalam penyusunan SKP individu. Penyusunan SKP individu harus sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
26. Mengembangkan aplikasi e-kinerja dan e-Sakip untuk mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi yang sudah ada, sehingga memudahkan pimpinan untuk melakukan pemantauan kinerja unit kerja maupun individu serta dapat dijadikan dasar untuk pengukuran kinerja individu;
27. Meningkatkan kualitas evaluasi internal dan memastikan rekomendasi hasil evaluasi ditindaklanjuti oleh masing-masing unit kerja;
28. Melakukan reviu secara berkala terkait efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program maupun kegiatan, dengan lebih memfokuskan kepada hasil yang diharapkan serta menyusun peta risiko



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1299 -

strategis , organisasional dan operasional untuk mengidentifikasi kemungkinan risiko kegagalan pencapaian target kinerja;

29. Menyempurnakan laporan kinerja sesuai rekomendasi yang diberikan oleh Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Kementerian PANRB;
30. Melakukan koordinasi dan konsolidasi kepada masing-masing Unit Kerja Eselon I terkait dokumen perencanaan induk yang disusun serta melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi dari masing-masing dokumen dimaksud

Rencana ke depan yang akan dilaksanakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk meningkatkan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan desa, kawasan perdesaan, daerah Tertinggal dan kawasan transmigrasi yang berorientasi pada 18 Tujuan SDGs Desa;
2. Penguatan peran koordinasi lintas Kementerian/Lembaga dan mitra pembangunan dalam melaksanakan pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi;
3. Mendorong pencapaian kinerja atas IKU Jumlah Desa Berkembang dan Jumlah Desa Tertinggal, melalui:
  - a. Pemenuhan layanan dasar;
  - b. Peningkatan akses pembiayaan untuk kegiatan ekonomi di desa; dan
  - c. Peningkatan kapasitas masyarakat desa dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang dimiliki;
4. Meningkatkan capaian kinerja atas IKU persentase kemiskinan di perdesaan, melalui:
  - a Mendorong intervensi program/kegiatan yang mendukung penurunan beban pengeluaran, peningkatan produktivitas masyarakat miskin di perdesaan dan penurunan kantong-kantong kemiskinan di desa;
  - b Melakukan kolaborasi dan integrasi program/kegiatan yang mendukung percepatan penghapusan kemiskinan, khususnya di perdesaan; dan
  - c Melakukan integrasi data sasaran penerima manfaat agar pemberian bantuan lebih tepat sasaran.
5. Mendorong pencapaian kinerja atas IKU persentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan dengan mengoptimalkan pelaksanaan pemetaan kompetensi dan potensi pegawai bersama Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan mitra lainnya;
6. Meningkatkan capaian kinerja atas IKU nilai pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui penguatan dan penajaman program reformasi birokrasi pada level Kementerian hingga unit kerja, serta menuangkan program-program ke dalam road map reformasi birokrasi Kementerian yang disertai dengan rencana kerja pada level unit kerja, sehingga dapat fokus pada upaya-upaya konkret untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih efektif dan efisien, bersih dan akuntabel, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1300 -

7. Mendorong tercapainya kinerja atas IKU Indeks Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui;
  - a. Perbaikan seluruh referensi dan domain arsitektur (mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional) serta mengatur seluruh muatan Peta Rencana sesuai pedoman SPBE;
  - b. Penyusunan Peta Rencana yang mencakup semua aspek dan ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal. Seluruh muatan Peta Rencana SPBE diterapkan sesuai pedoman;
  - c. Peningkatan keamanan dan audit TIK melalui penyusunan SMKI yang mengacu pada Peraturan BSSN No 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE, penyusunan pedoman audit TIK, audit TIK dilakukan sesuai dengan standar dan tata cara pelaksanaan audit infrastruktur dan aplikasi SPBE (BRIN) dan audit keamanan SPBE (BSSN) serta pembentukan SK tim audit;
  - d. Penguatan tata kelola dan manajemen SPBE melalui penyusunan kebijakan internal (SOP) terkait SPBE, penerapan manajemen data, penerapan manajemen aset TIK, penerapan kompetensi sumber daya manusia, penerapan manajemen pengetahuan, penerapan manajemen perubahan, penerapan manajemen keamanan informasi, dan penerapan manajemen layanan SPBE; dan
  - e. Penguatan sinergi dan komitmen anggota tim koordinasi SPBE dalam penyelenggaraan dan evaluasi SPBE.
8. Meningkatkan capaian kinerja atas IKU indeks Penerapan Sistem Merit melalui penyelesaian integrasi sistem informasi kepegawaian dengan modul/sistem informasi lainnya seperti e-presensi, e-kinerja dan sistem informasi manajemen talenta;
9. Meningkatkan capaian kinerja atas IKU nilai SAKIP Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
10. Mendorong pencapaian kinerja atas IKU persentase dokumen pengembangan kebijakan dan perencanaan induk yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan kebijakan melalui:
  - a. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap penyelesaian dokumen perencanaan induk dan pengembangan kebijakan agar sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga dapat segera dijadikan rujukan oleh masing-masing unit kerja eselon I; dan
  - b. Melakukan pengendalian pemanfaatan dokumen pengembangan kebijakan dan dokumen perencanaan induk dengan menyusun berita acara yang berisi komitmen unit kerja eselon I terkait untuk memanfaatkan hasil rekomendasi kebijakan dan dokumen perencanaan induk yang telah disusun.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1301 -



**Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2022, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah menetapkan 4 sasaran strategis dengan 7 (tujuh) indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2022, dari 7 (tujuh) indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, sebanyak 6 (enam) indikator kinerja (85,71%) memiliki capaian melebihi target dan 1 indikator kinerja (14,29%) tidak mencapai target.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2022.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	85	93,78	110,33%
2	Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional	88 – 91,9%	99,75%	108,54%
3	Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	91 – 93,9%	99,65%	106,12%
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	85 – 89,9%	99,78%	110,99%
4	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas	90	85,68	95,20%
		Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan ( <i>Stakeholder</i> ) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional	90	90,79	100,88%
		Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	90%	97,98%	108,87%

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Perencanaan Pembangunan Nasional	726.936.291.220	701.135.462.569	96,45
2	Dukungan Manajemen	680.888.147.780	659.148.048.599	96,81
	Jumlah	1.407.824.439.000	1.360.283.511.168	96,62





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1302 -

Hambatan atau permasalahan dalam pencapaian kinerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

1. Belum optimalnya capaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional dikarenakan tingkat kepatuhan K/L dalam melakukan sinkronisasi melalui revisi antara Renja dan RKA K/L melalui sistem Krisna dan Sakti, serta terdapat perbedaan satuan yang digunakan pada sistem KRISNA dan SAKTI. Selain itu, masih minimnya partisipasi aktif PJ (Penanggung Jawab) PN RKP mengarahkan K/L supaya segera menyesuaikan Renja dan RKAny
2. Kendala pelaksanaan sasaran strategis 2 - Terwujudnya Efektivitas Pengendalian Pembangunan Nasional dikarenakan adanya keterbatasan anggaran, dimana tidak semua rincian output Prioritas Nasional dan kegiatan strategis dilakukan evaluasi dan pemantauan secara langsung ke lapangan.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam mencapai target kinerja adalah sebagai berikut.

1. Tercapainya kinerja Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2022 merupakan kerja keras seluruh komponen di Kementerian PPN/Bappenas melalui koordinasi, komunikasi dan kerjasama yang baik antara Kementerian PPN/Bappenas dengan seluruh Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah.
2. Upaya dalam mempertahankan dan meningkatkan hasil capaian kinerja pengendalian pembangunan nasional adalah:
  - a. Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan mitra Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembangunan nasional secara berkelanjutan.
  - b. Menggunakan teknologi dan informasi secara intensif dan efisien dalam koordinasi dengan mitra K/L/D.
  - c. Melakukan koordinasi rutin dalam rangka antisipasi potensi tantangan/risiko yang perlu dikelola di kemudian hari.
3. Pencapaian indikator Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L diwujudkan dalam pelaksanaan kajian terhadap Proyek Prioritas Nasional dan penerapan reviu kesiapan Proyek Prioritas Strategis/Major Project sebagai bagian dari Clearing House pembangunan yang dilaksanakan dalam lingkup bidangnya.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1303 -

Rencana ke depan yang akan dilaksanakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk meningkatkan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan dan menguatkan koordinasi, komunikasi dan kerja sama yang tidak hanya dilakukan secara eksternal namun juga dilakukan secara internal Kementerian PPN/Bappenas dalam rangka mewujudkan optimalisasi sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional sesuai amanat PP 17/2017.
2. Meningkatkan dan menguatkan peran pengendalian pelaksanaan pembangunan nasional baik melalui koordinasi, komunikasi, dan kerjasama maupun peningkatan fungsi dari aplikasi pendukung peran pengendalian Kementerian PPN/Bappenas.
3. Meningkatkan pelaksanaan sistem meritokrasi dan talent manajemen sesuai kaidah.
4. Melakukan terobosan inovasi pengukuran kinerja kelembagaan dan pegawai berbasis IT.
5. Melakukan evaluasi terhadap pengelolaan organisasi dalam rangka mewujudkan Agile Government sebagai upaya mendukung Bureaucratic Reform.
6. Melakukan koordinasi rutin dalam rangka antisipasi potensi tantangan/risiko yang perlu dikelola di kemudian hari.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1304 -



**Kementerian Badan Usaha Milik Negara**

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2022, Kementerian Badan Usaha Milik Negara telah menetapkan 9 sasaran strategis dengan 20 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2022, dari 20 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, sebanyak 13 indikator kinerja (65,00%) memiliki capaian melebihi target, 5 indikator kinerja (25,00%) sesuai target, dan 2 indikator kinerja (10,00%) tidak mencapai target.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2022.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Menciptakan SDM yang Unggul dan Profesional	Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN	85,56 (Tinggi)	83,19 (Tinggi)	97,18%
		Produktivitas Tenaga Kerja BUMN	Rp3,25M/Org	Rp7,49M/Org	230,46%
		Rasio Keterwakilan Perempuan Dalam Direksi BUMN	18,00%	15,80%	87,8%
		Rasio Keterwakilan Talenta Muda Dalam Direksi BUMN	8,00%	9,20%	115,00%
2	Menciptakan organisasi yang kuat, sehat dan akuntabel	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3,20	3,84	120%
		Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian BUMN	WTP	WTP	100%
3	Meningkatnya Tata Kelola BUMN sebagai korporasi	Rasio BUMN dengan tingkat Kesehatan Kategori Sehat	70,00%	76,6%	109,43%
		Harmonisasi Regulasi Tata Kelola BUMN	90,00%	100,00%	111,11%
		Tingkat Kepatuhan BUMN dalam menindaklanjuti Regulasi dan Kebijakan	100,00%	100%	100%
4	Penguatan Kapasitas BUMN	Jumlah BUMN dan Anak Usaha yang telah melakukan IPO	36 BUMN/anak	36 BUMN/anak	100%
		Penyelesaian Restrukturisasi Hutang BUMN (RDI/SLA, Hutang tidak produktif, BUMN tidak sehat)	50,00%	83,30%	166,60%
5	Meningkatnya Daya Saing BUMN	Peningkatan Pasar BUMN ke Luar Negeri	42 Negara	117 Negara	278,57%



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1305 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		BUMN yang telah mengimplementasikan roadmap/ rekomendasi perbaikan level INDI 4.0 BUMN berdasarkan hasil assesment INDI 4.0	12 BUMN/anak	12 BUMN/anak	100%
6	BUMN Unggul di Kancah Global	Jumlah BUMN yang Masuk Peringkat Global	5 BUMN	5 BUMN	100%
		Pembentukan Holding BUMN	2 Holding	4 Holding	200%
7	Kontribusi BUMN Terhadap Penerimaan Negara	Kontribusi BUMN Kepada Negara (Dividen, Pajak, PNBPN)	Rp 403,71 T	Rp571,98 T	141,68%
8	Kontribusi BUMN Sebagai Agen Pembangunan Nasional	Realisasi Belanja Modal (CAPEX)	Rp 212,71 T	Rp249,38 T	117,24%
		Kontribusi BUMN pada Pengembangan Energi Baru Terbarukan	15,70%	36,90%	235,03%
9	Kontribusi BUMN dalam Peningkatan Value BUMN untuk Pemegang Saham	Net Profit	Rp75,37 T	Rp 303,74 T	403 %
		Kapitalisasi Saham BUMN	Rp 2.043,59 T	Rp 2.201,00 T	107,70%

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Pengembangan dan Pengawasan BUMN	46.591.231.000	*	*
2	Program Dukungan Manajemen	151.835.290.000	*	*
Jumlah		198.426.521.000	196.555.127.045	99,06

\*tidak tersedia datanya di LKjIP

Hambatan atau permasalahan dalam pencapaian kinerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

1. Hambatan Terkait Kinerja

- a. Banyak BUMN yang mengalami peningkatan tingkat kesehatan, tetapi ada pula beberapa BUMN yang mengalami penurunan tingkat kesehatan dari tahun sebelumnya. Turunnya tingkat kesehatan disebabkan kinerja perusahaan dari sisi pendapatan mengalami penurunan dan kerugian serta belum pulih sepenuhnya dari dampak pandemi Covid-19.
- b. Dalam pencapaian peningkatan pasar BUMN ke Luar Negeri dalam rangka peningkatan daya saing BUMN dan strategi BUMN *Go Global* masih terdapat beberapa hambatan seperti terbatasnya akses pendanaan untuk ekspansi global, rendahnya informasi dan jaringan *global supply chain*, serta kesulitan mendapatkan partner lokal yang bonafit dan terpercaya.

2. Hambatan Terkait Anggaran

- a. Mengalami beberapa kali refocusing anggaran dengan pagu anggaran Kementerian BUMN tahun 2022 telah ditetapkan sebesar Rp. 198.426.521.000,00.
- b. Mengalami 3 (tiga) kali *automatic adjustment* (pemblokiran anggaran) oleh Kementerian Keuangan, dengan total akumulasi sebesar Rp 9.819.154.000.-. Hal tersebut berdampak



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1306 -

pada kegiatan unit kerja yang perlu banyak melakukan efisiensi serta perubahan waktu pelaksanaan kegiatan agar tetap dapat mencapai output sebagaimana target yang telah ditetapkan.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara dalam mencapai target kinerja adalah sebagai berikut.

1. Upaya Mengatasi Hambatan Terkait Kinerja

BUMN telah mengimplementasikan roadmap/rekomendasi perbaikan level INDI 4.0 di BUMN berdasarkan hasil assesment INDI 4.0 yang mampu meningkatkan potensi pasar BUMN ke Luar Negeri dan meningkatkan daya saing BUMN.

2. Upaya Mengatasi Hambatan Terkait Anggaran

Dengan adanya penghematan anggaran dan pemblokiran anggaran, Kementerian BUMN selalu melakukan upaya dalam optimalisasi penyerapan anggaran dengan disertai penggunaan secara efektif dan tetap memenuhi asas akuntabilitas. Kesulitan dalam melaksanakan kegiatan dikarenakan adanya pembatasan kegiatan sebagai dampak dari pandemi COVID-19 tidak menyurutkan Kementerian BUMN untuk melakukan rapat monitoring dan evaluasi yang dilakukan setiap bulan dengan mengundang pejabat pengelola keuangan dan perwakilan unit kerja untuk mengevaluasi capaian realisasi anggaran dan pencapaian kinerja atau output.

Rencana ke depan yang akan dilaksanakan Kementerian Badan Usaha Milik Negara untuk meningkatkan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut.

1. Rencana ke Depan terkait Kinerja

Upaya yang dilakukan oleh Kementerian BUMN dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja BUMN adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi intensif dan monitoring bersama dengan Keasdepan Teknis pembina BUMN terkait perbaikan kinerja dan tingkat kesehatan BUMN;
- b. Mengembangkan sistem database untuk monitoring dan pelaporan manajemen risiko dan tingkat kesehatan BUMN melalui pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi dengan sistem pelaporan elektronik di Kementerian BUMN;
- c. Melakukan monitoring, analisis, dan evaluasi tingkat kesehatan BUMN secara berkala yang dilaporkan melalui sistem pelaporan elektronik di Kementerian BUMN; dan
- d. Akan dilakukan perubahan pengukuran tingkat kesehatan BUMN melalui metode peringkatan/rating oleh lembaga profesional. hal ini akan ditetapkan dalam Omnibus Peraturan Menteri BUMN yang sedang diproses

2. Rencana ke Depan terkait Anggaran

Untuk Anggaran tahun 2022, sesuai arahan Kementerian Keuangan, seluruh K/L mengalami dampak kebijakan *Automatic Adjustment*. Program yang akan dilakukan dalam pencapaian target pada tahun 2023, Kementerian BUMN akan menyusun sistem penilaian kinerja



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1307 -

anggaran pada masing-masing unit kerja dengan mengadopsi sistem IKPA pada Kementerian Keuangan sebagai bahan evaluasi untuk penerapan sistem *reward and punishment* guna meningkatkan awareness penganggaran di unit kerja. Selain itu, pada tahun 2023 akan dilakukan monitoring yang lebih ketat dalam pelaksanaan anggaran agar inline dengan Rencana Penyerapan Anggaran yang sudah disusun dan memfokuskan anggaran pada kegiatan-kegiatan yang lebih strategis bagi unit kerja.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1308 -



**Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan**

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2022, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menetapkan 1 (satu) sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2022, indikator kinerja yang dilaporkan tersebut (100%) memiliki capaian melebihi target.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2022.

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia.	Indeks efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme Indonesia.	6,16 indeks	7,47 indeks	121,27%*

\*capaian yang diakui sebesar 120%

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	45.084.863.000	44.196.460.953	35,12%
2	Program Dukungan Manajemen	170.533.897.000	169.306.388.487	16,06%
<b>Total</b>		<b>215.618.760.000</b>	<b>213.502.849.440</b>	<b>99,02%</b>

Hambatan atau permasalahan dalam pencapaian kinerja PPATK antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

1. Selama tahun 2022 PPATK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi menemui berbagai kendala antara lain masih berlangsungnya pandemi COVID-19 yang masih menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan terdapat kebijakan pemerintah terkait refocusing dan realokasi anggaran, sehingga PPATK perlu menyesuaikan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1309 -

2. Salah satu faktor yang menjadi permasalahan serius PPATK adalah perlunya peningkatan kompetensi SDM PPATK dalam mengimbangi pesatnya modus dan tipologi TPPU-PT global.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh PPATK dalam mencapai target kinerja adalah sebagai berikut.

1. PPATK selalu melakukan inovasi dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan pencapaian kinerja PPATK;
2. PPATK mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi yang dapat menyajikan data dan informasi secara cepat, tepat, dan akurat sebagai bahan dalam pengambilan keputusan/kebijakan bagi pimpinan PPATK;
3. PPATK memperbaiki proses perencanaan kinerja dan anggaran;
4. PPATK mendorong setiap unit kerja untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian kerjanya secara berkala, termasuk memitigasi risiko-risiko dalam pencapaian kinerja sebagai bahan untuk melakukan evaluasi Renstra PPATK Tahun 2020-2024;
5. PPATK melaksanakan kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan, perubahan situasi, dan kondisi dalam upaya mendukung program pemerintah dalam percepatan penanganan pandemik COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). PPATK juga telah melakukan beberapa kali refocusing dan realokasi anggaran, penyesuaian target kinerja, dan target output;
6. Inspektorat melakukan evaluasi atas pengelolaan akuntabilitas kinerja di PPATK. Hasil evaluasi dan rekomendasi tersebut disampaikan kepada masing-masing unit kerja untuk menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kinerja;
7. PPATK melaksanakan Pencanangan Renaksi BIG-20: Rencana Aksi Reformasi Birokrasi PPATK 2022 yang disusun sebagai wujud komitmen dan kesungguhan PPATK dalam mendukung program reformasi birokrasi;
8. PPATK Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas KKN melalui peningkatan budaya integritas dan implementasi kebijakan *whistleblowing system* dan penanganan benturan kepentingan secara berkala;
9. PPATK meningkatkan koordinasi dengan para penyidik, aparat penegak hukum, Lembaga Pengawas dan Pengatur, dan pihak pelapor dalam upaya mengantisipasi transformasi perilaku pidana yang semakin meningkat dan beragam;
10. PPATK meningkatkan kegiatan pertukaran informasi dengan FIU negara lain dengan mengoptimalkan tim khusus yang telah dibentuk sebagai liaison officer FIU yang menangani pertukaran informasi di Egmont Secure Web dan melalui berbagai forum internasional, seperti *Financial Intelligence Consultative Group* dan *analyst exchange* atas kasus-kasus kejahatan lintas negara.
11. Rekomendasi strategis sesuai pandangan dan rekomendasi para pakar PESTEL terhadap kinerja PPATK dalam upaya peningkatan efektivitas pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT adalah dengan memperhatikan berbagai isu-isu penting yang berpotensi sebagai TPPU dan TPPT di bidang politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum dengan prioritas utama pada aspek lingkungan.





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1310 -

12. Rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan metodologi dan instrumen dalam pelaksanaan survei indeks efektivitas TPPU dan TPPT, antara lain:

- 1) Empat dimensi beserta indikator-indikator yang terdapat pada kuadran III pada analisis kuadran perlu mendapat perhatian dan menjadi prioritas perbaikan ke depan.
- 2) Dikaitkan dengan jawaban atas beberapa pertanyaan terbuka yang disampaikan oleh stakeholder maka hal-hal yang perlu dilakukan oleh PPATK pada waktu ke depan, di antaranya:
  - Disediakan PIC/unit kerja khusus terkait dengan tindak lanjut penyelesaian sistem informasi pelaporan.
  - Pentingnya dilakukan pelatihan kepada petugas yang membidangi pelaporan LTKM terutama terkait indikasi, modus operandi dan tipologi terkini TPPT sehingga kualitas laporan LTKM sesuai dengan kebutuhan PPATK.
  - Perlu peningkatan kualitas HA/HP terutama yang berkaitan dengan nama aset, lokasi dan atas nama kepemilikan aset serta waktu pembelian aset sehingga memudahkan asset tracing oleh Lembaga Penegak Hukum (LPH).
  - Limit waktu untuk penyampaian informasi atas permintaan informasi oleh PPATK bisa diperpanjang sehingga pihak pelapor dapat menyampaikan informasi/dokumen yang lebih lengkap dan berkualitas.

Rencana ke depan yang akan dilaksanakan PPATK untuk meningkatkan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut.

1. Pelaksanaan reorganisasi secara menyeluruh dengan mengubah proses bisnis berkenaan dengan implementasi aplikasi GoAML. Melakukan peninjauan kembali kedudukan, tugas, dan fungsi unit-unit organisasi agar dapat mengidentifikasi tugas dan fungsi unit-unit kerja yang perlu dipertajam, ditambahkan, dikurangi, atau dialihkan ke unit kerja lainnya.
2. Peningkatan kerja sama internasional dan penguatan organisasi berbasis manajemen risiko.
3. Pengembangan program agen perubahan pada setiap lini organisasi sebagai program percontohan dalam membudayakan dan menginternalisasi nilai-nilai reformasi birokrasi di PPATK.
4. Pembentukan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada setiap unit kerja.
5. PPATK akan melakukan pepadanan aplikasi Pertukaran Informasi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (SIPENDAR), PEP, dan GoAML.
6. PPATK akan mengembangkan aplikasi Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. Pengembangan aplikasi ini dilakukan dalam upaya meningkatkan efektivitas penerapan Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala PPATK, dan Kepala BAPPETEN tentang Pencantuman Identitas Orang atau Korporasi dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dan Pemblokiran secara Serta Merta atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1311 -



**Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia**

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2022, Badan Pemeriksa Keuangan telah menetapkan 1 sasaran strategis dengan 3 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2022, ketiga indikator kinerja yang dilaporkan tersebut seluruhnya memiliki capaian melebihi target.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2022.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Pemanfaatan Rekomendasi, Pendapat, dan Pertimbangan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara yang Didukung Tata Kelola Organisasi Berkinerja Tinggi	Tingkat Kualitas dan Manfaat Tata Kelola Keuangan Negara Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK	76%	77,48%*	101,95
		Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Manfaat Hasil Pemeriksaan	4,30 (Sangat Memuaskan)	4,31 (Sangat Memuaskan)	100,23
		Nilai <i>Quality Assurance</i> Reformasi Birokrasi	88,22(A)*	89,26 (A)	101,18

Keterangan:

\* Pada Tahun 2021 dilakukan revisi target QA RB untuk mengantisipasi perubahan metode penilaian oleh Kementerian PANRB. Akan tetapi, ternyata perubahan metode penilaian tidak terlalu mempengaruhi skor QA RB BPK. Oleh karena itu, target QA RB dinaikkan kembali menjadi 88,22 (Target Tahun 2022), 88,27 (Target Tahun 2023), dan 88,32 (Target Tahun 2024).

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Pemeriksaan Keuangan Negara	3.342.975.298.000	3.330.060.759.623	99,61
2	Program Dukungan Manajemen	659.368.205.000	658.517.831.756	99,87
Jumlah		4.002.343.503.000	3.988.578.591.379	99,66

Hambatan atau permasalahan dalam pencapaian kinerja Badan Pemeriksa Keuangan antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

1. Tahun 2022 ditandai dengan berakhirnya Pandemi COVID-19 dan masyarakat mulai memasuki era normal baru. Kebiasaan-kebiasaan lama yang dihindari selama masa pandemi seperti rapat tatap muka langsung dan WFO mulai berjalan normal. Pada saat yang sama, kebiasaan baru seperti rapat daring dan WFH juga masih berjalan. Kondisi ini memerlukan penyesuaian-penyesuaian dalam melaksanakan penugasan pemeriksaan dan non-pemeriksa.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1312 -

2. BPK masih dalam proses penyederhanaan birokrasi dengan mengalihkan jabatan administrasi (administrator dan pengawas) ke jabatan fungsional. Proses ini perlu dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan dan kekhasan tugas BPK seperti dengan mempertahankan jabatan administrasi pada satker kesekretariatan dan jabatan administrator pada satker pemeriksaan agar tidak mengganggu kinerja BPK.
3. Pembelajaran BPK CorpU yang memanfaatkan platform Massive, Open, Online Course (MOOC) belum optimal.
4. Pengembangan Big Data Analytics (BDA) di BPK masih berlangsung sehingga pemanfaatannya belum optimal. Selain itu, implementasi budaya kerja baru seperti data literacy, data fluency, dan data culture di lingkungan BPK masih menjadi tantangan tersendiri bagi organisasi dalam menghadapi akselerasi transformasi digital.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam mencapai target kinerja adalah sebagai berikut.

1. Melakukan perencanaan pemeriksaan terintegrasi, mengembangkan sistem informasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan implementasi Renstra yang terintegrasi, serta pembangunan infrastruktur manajemen risiko.
2. Untuk kegiatan pemeriksaan, dilakukan penguatan pemeriksaan non investigatif berbasis risiko fraud dan peningkatan kapasitas pemeriksaan investigasi.
3. Di bidang pengawasan, menyusun mekanisme pengukuran dan pelaksanaan integritas dan budaya organisasi BPK, melakukan kegiatan internalisasi budaya ber-IIP.
4. Untuk pengembangan kapasitas SDM di BPK, dilaksanakan sertifikasi CSFA, membangun learning strategic governance, organisasi pembelajaran, learning culture, dan knowledge sharing sebagai fondasi BPK CorpU.
5. Meningkatkan kapasitas kepaniteraan MTP dalam penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara, menyusun rancangan peraturan BPK tentang tata cara penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap pengelola BUMN/BUMD atau lembaga lain yang mengelola keuangan negara.
6. Di bidang SDM dan pemenuhan sarana dan prasarana, dilakukan penyusunan skema perhitungan pembayaran penambahan/pengurangan tunjangan kinerja, pengembangan aplikasi penilaian kinerja sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja, dan penyusunan program, aturan, atau kebijakan tentang smart dan eco-office, serta implementasi konsep strategi komunikasi di bidang kehumasan.

Rencana ke depan yang akan dilaksanakan Badan Pemeriksa Keuangan untuk meningkatkan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut.

1. Mengintensifkan implementasi transformasi digital dengan pengembangan Digital Enterprise Architecture (DNA) BPK dan pelaksanaan Inisiatif Strategis Pengembangan dan Pemanfaatan Big Data Analytics (BDA).



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1313 -

2. Mengoptimalkan teknologi informasi pada seluruh kegiatan pemeriksaan, meningkatkan efektivitas pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan, mengintensifkan komunikasi dan koordinasi dengan entitas untuk mempercepat dan mendorong penyelesaian setoran atas rekomendasi yang bernilai uang, bersinergi dengan para pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan kualitas tata kelola keuangan negara.
3. Meningkatkan kualitas pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan dengan mendorong peran pengendali mutu pada setiap tahapan pemeriksaan.
4. Mendorong pelaksanaan pengawasan yang lebih berkualitas serta mampu memberikan manfaat kepada stakeholder dengan menjalin komunikasi yang baik dan harmonis dengan para pemangku kepentingan.
5. Mengoptimalkan pemanfaatan TI dalam proses bisnis dengan:
  - a. Mengembangkan aplikasi-aplikasi pendukung seperti Aplikasi PRISMA-RISIKO untuk pemantauan risiko BPK, Aplikasi PRISMA-SAKIP dan PRISMA-KOIN untuk memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan internal Itama, Aplikasi PRISMA-RENSTRA untuk pemantauan dan evaluasi strategi, Aplikasi SMART untuk mempermudah penyusunan IHPS, Aplikasi SIKAP untuk proses seleksi KAP yang melaksanakan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BPK dan lain-lain.
  - b. Menggunakan media aplikasi virtual, Learning Management System (LMS) dan rencana Pembelajaran Mandiri (Self Learning) dalam pelaksanaan pelatihan, workshop, dan sertifikasi.
  - c. Redesign database pendapat hukum pada Sistem Manajemen Hukum (SMH), Road to Kepaniteraan MTP 4.0 dengan unsur-unsur perubahan dalam hal pengembangan penggalian data dan informasi, sidang MTP, kegiatan administrasi yustisial dan monitoring tindak lanjut sidang MTP secara virtual.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1314 -



**Badan Pusat Statistik**

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2022, Badan Pusat Statistik (BPS) telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis dengan 7 (tujuh) indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2022, dari 7 (tujuh) indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, 5 (lima) indikator kinerja (71,42%) memiliki capaian melebihi target, 1 (satu) indikator kinerja (14,29%) sesuai target, 1 (satu) indikator kinerja (14,29%) tidak mencapai target, dan tidak terdapat indikator kinerja yang belum dihitung capaian kinerjanya.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2022.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian(%)
1	Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional (%)	95	97,39	102,52%
		Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional (%)	78	97,98	120,00%
2	Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik (%)	35	35,14	100,40%
		Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar (%)	68	75,68	111,29%
3	Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK (%)	38	49	120%
4	SDM statistik yang unggul dan berdaya	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPS	WTP	WTP	100,00%



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1315 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian(%)
	saing dalam kerangka tata Kelola kelembagaan	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	98	97,21	99,19%

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

No	Program/Sasaran	Pagu (miliar rupiah)	Realisasi (miliar rupiah)	%
1	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik/Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	5.471,74	5.310,53	97,05
2	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik/Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	36,38	21,37	58,74
3	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik/Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	3,20	2,85	89,29
4	Program Dukungan Manajemen/SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	3.049,57	2.976,37	97,60
Total		8.560,89	8.311,12	97,08

Hambatan atau permasalahan dalam pencapaian kinerja BPS antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

1. Terbatasnya data yang tersedia untuk penghitungan indikator di level BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota hingga batas waktu rilis indikator.
2. Tantangan keragaman data khususnya dari sisi kelengkapan dan kemutakhiran data.
3. Adanya ketidaksesuaian data yang tersedia dengan harapan pengguna data.
4. Jumlah SDM dan sarana prasarana yang terbatas.
5. koordinasi dalam penyusunan publikasi antara BPS Pusat dan BPS Daerah masih belum optimal sehingga mempengaruhi kualitas publikasi yang dihasilkan. Beberapa publikasi di level BPS Daerah juga mengalami tunda rilis dikarenakan data yang digunakan untuk penyusunan publikasi belum tersedia sampai tanggal rilis ditetapkan.
6. kurangnya kepatuhan K/L/D/I terhadap rekomendasi dan metadata, transisi penggunaan aplikasi SAKTI dalam perencanaan dan penganggaran, dan alokasi anggaran yang terbatas.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BPS dalam mencapai target kinerja adalah sebagai berikut.

1. BPS membuka kembali Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS secara luring karena penurunan kasus Covid-19 yang signifikan.
2. Memperkuat koordinasi antara BPS Pusat dan BPS Daerah terkait penyediaan data yang digunakan untuk penghitungan indikator agar indikator dapat rilis tepat waktu.
3. Melakukan modernisasi pengumpulan data statistik dengan cara pemanfaatan sumber data lain seperti data administrasi dan big data untuk menjawab tantangan keragaman data.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1316 -

4. BPS mengoptimalkan pemanfaatan sarana teknologi informasi yang baik (melalui vicon, voip, dan email) sehingga koordinasi dengan K/L/D/I tetap terjaga.
5. Penguatan koordinasi antara BPS Pusat dan BPS Daerah khususnya dalam penyusunan publikasi yang menerapkan standar akurasi serta melaksanakan penundaan rilis publikasi untuk publikasi yang datanya belum tersedia.
6. Meningkatkan kolaborasi dengan subject matter BPS dan meningkatkan perencanaan anggaran pada proses pembinaan sektoral secara menyeluruh di level pusat, provinsi dan kabupaten/kota sehingga kedepannya akan semakin banyak lagi K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri.

Rencana ke depan yang akan dilaksanakan BPS untuk meningkatkan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut.

1. Mengoptimalkan media sosialisasi BPS terutama terkait produk dan layanan data melalui PST maupun PST Online agar jumlah pengunjung dan pengguna data meningkat.
2. Mengoptimalkan pencacahan Survei Kebutuhan Data secara dokumen maupun website agar response rate meningkat.
3. Mengintegrasikan kegiatan-kegiatan yang sejenis untuk mengurangi beban kerja pegawai sehingga capaian kegiatan prioritas menjadi lebih optimal.
4. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan kepada K/L/D/I maupun OPD tentang kewajiban pemberitahuan rancangan kegiatan statistik secara aktif dan mandiri ke BPS dalam rangka meningkatkan kolaborasi dengan K/L/D/I.
5. Melakukan pendampingan dalam penyusunan metadata sektoral sekaligus mengembangkan aplikasi pengelolaan metadata statistik pada Sistem Indonesia Data Hub (INDAH).
6. Meningkatkan kapabilitas SDM BPS dalam melakukan pembinaan kegiatan statistik sektoral secara menyeluruh dari level pusat hingga kabupaten/kota agar K/L/D/I mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri.
7. Meningkatkan pembinaan operator keuangan dan meningkatkan kualitas rekonsiliasi keuangan agar hasil Laporan Keuangan yang lebih baik.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1317 -



**Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan**

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2022, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menetapkan 6 (enam) sasaran strategis dengan 16 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2021, dari 16 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, 7 (Tujuh) indikator kinerja (43,75%) memiliki capaian melebihi target, 1 (satu) indikator kinerja (6,25%) sesuai target, dan 8 (delapan) indikator kinerja (50%) tidak mencapai target.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2022.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah	Nilai Potensi Penerimaan Negara/ Daerah yang Terealisasi	Rp (Juta)	2.102.118,00	4.498.383,94	213,99%
		Nilai Pengeluaran Negara/Daerah yang Efisien	Rp (Juta)	37.041.685,00	76.319.627,15	206,04%
		Nilai Penyelamatan Keuangan Negara	Rp (Juta)	3.146.191,00	37.007.357,91	1.176,26%
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional	Jumlah Program Prioritas yang Tercapai Sesuai Target	PP	8	7	87,5%
		Jumlah Kegiatan Prioritas yang Tercapai Sesuai Target	KP	37	30	81,08%
		Jumlah Proyek Prioritas Strategis yang Tercapai Sesuai Target	PPS	16	11	68,75%
		Jumlah Proyek Strategis Nasional yang Tercapai Sesuai Target	PSN	135	110	81,48%
3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha	Jumlah Badan Usaha dengan Akuntabilitas Badan Usaha yang Baik	BU	25	81	324%
4	Meningkatnya Pengawasan	Jumlah K/L dengan Efektivitas	K/L	6	23	383,33%





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1318 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	Pengendalian Korupsi Baik				
		Jumlah Pemda dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik	Pemda	79	16	20,25%
5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/Pemda/BU	Persentase APIP K/L/P dengan Kapabilitas APIP $\geq$ Level 3	%	77,35	54,74	70,77%
		Persentase K/L/P dengan Maturitas SPIP $\geq$ Level 3	%	81,81	67,63	82,67%
		Persentase K/L/P/BU dengan MRI $\geq$ Level 3	%	50,92	23,52	46,19%
6	Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang Unggul, Akuntabel dan Sehat	IACM BPKP	Level	Level 4	Level 4	100%
		Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	85	85,75	100,88%
		Indeks Kesehatan BPKP	Poin	73	75,91	103,99%

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

No	Sasaran Strategis	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	924.874.855.000	903.199.899.041	97,66
2	Belanja Barang	687.354.666.000	660.980.755.615	96,16
3	Belanja Modal	233.193.339.000	154.043.821.957	66,06
<b>Jumlah</b>		<b>1.845.422.860.000</b>	<b>1.718.224.476.613</b>	<b>93,11%</b>

Hambatan-hambatan yang dialami BPKP dalam mencapai target kinerja adalah sebagai berikut.

1. Kurangnya komitmen dari pimpinan K/L/P dalam peningkatan Kapabilitas APIP, Maturitas SPIP, dan MRI;
2. Kurangnya kesiapan K/L/P yang ditargetkan untuk dinilai Maturitas SPIP-nya;
3. Kurangnya sumber daya untuk mendukung penerapan Kapabilitas APIP, Maturitas SPIP, dan manajemen risiko;
4. Belum adanya kebijakan manajemen risiko secara nasional yang dapat dijadikan acuan oleh K/L/P dalam penerapan manajemen risiko.

Upaya yang dilakukan BPKP sebagai berikut:

1. Pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara dan daerah;
2. Pengawasan intern atas akuntabilitas pembangunan nasional;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1319 -

3. Pengawasan intern atas akuntabilitas pengelolaan badan usaha;
4. Pengawasan intern dalam rangka pengendalian korupsi;
5. Pengawasan intern dalam rangka meningkatkan kualitas pengendalian intern instansi pemerintah dan badan usaha;
6. Meningkatkan kualitas tata kelola pengawasan intern BPKP.

Rencana ke depan yang akan dilaksanakan BPKP untuk meningkatkan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan K/L/P dalam meningkatkan potensi penerimaan negara/daerah;
2. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi secara intensif dengan K/L mitra dalam melakukan kegiatan pengawasan untuk mencegah kebocoran keuangan negara;
3. Meningkatkan kegiatan pengawasan dan pembinaan terkait dengan kualitas pengendalian intern;
4. Melakukan pengawasan terhadap permasalahan dan isu-isu strategis yang dihadapi oleh badan usaha dalam menyelenggarakan operasi perusahaan dengan mengembangkan metode pengawasan berbasis teknologi informasi (database dan aplikasi);
5. Meningkatkan kualitas kegiatan pengawasan represif, preventif, dan edukatif melalui efektivitas pengendalian korupsi;
6. Melakukan koordinasi dengan K/L/P untuk memastikan kebutuhan konsultasi dalam rangka peningkatan kapabilitas APIP, Maturitas SPIP, dan MRI;
7. Mendorong pemenuhan SDM APIP untuk memiliki kompetensi yang memadai;
8. Mendorong Kapabilitas APIP Level 3 sebagai IKU APIP;
9. Finalisasi Peraturan Presiden tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional;
10. Fasilitasi/bimtek infrastruktur (kebijakan dan struktur) dan proses manajemen risiko untuk K/L/P;
11. rutin melakukan monitoring terhadap pencapaian target pada Program Prioritas; Mengembangkan aplikasi Risk Management Information System (RMIS) dan aplikasi e-SPIP terintegrasi;
12. Melakukan analisis mendalam atas Indeks Kesehatan BPKP untuk menghasilkan beberapa area perbaikan, baik yang bersifat universal maupun kontekstual di beberapa unit kerja.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1320 -



**Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia**

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2022, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2021, dari 4 (empat) indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, tidak terdapat indikator kinerja yang memiliki capaian melebihi target, 1 (satu) indikator kinerja (25%) sesuai target, dan 3 (tiga) indikator kinerja (75%) tidak mencapai target.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2022.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan PMI dan keluarganya	Produktivitas tingkat upah Pekerja Migran Indonesia terhadap pendapatan per kapita	1,50%	0,57%	38%
		Penurunan kasus Pekerja Migran Indonesia	6,20%	9,24%	67,10%
2	Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang baik	Nilai Reformasi Birokrasi	78	75,89	97,29%
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan PMI dan keluarganya	Produktivitas tingkat upah PMI terhadap pendapatan per kapita	208.791.748.000	185.490.914.412	88,84%
		Penurunan kasus Pekerja Migran Indonesia			
2	Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang baik	Nilai Reformasi Birokrasi	154.895.633.000	153.980.269.268	99,41%
		Opini BPK atas Laporan Keuangan			
Jumlah			363.687.381.000	339.471.183.680	93,34%

Hambatan atau permasalahan dalam pencapaian kinerja BP2MI antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

1. Beberapa kendala dalam penyelesaian kasus PMI, yaitu:
  - a. Penyelesaian kasus tergantung pada Perwakilan RI di luar negeri, pengguna/user, dan PMI.
  - b. Standar dokumen minimum yang harus dilengkapi pengadu agar kasusnya dapat ditangani sudah tertuang dalam kebijakan teknis, namun belum adanya standar



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1321 -

dokumen yang harus dilengkapi pengadu berdasarkan permasalahannya karena setiap permasalahan membutuhkan dokumen pendukung yang berbeda, sehingga penyelesaian menjadi kurang efisien dan efektif akibat terdapat proses permintaan dokumen pendukung yang tidak sekaligus.

- c. Untuk kasus-kasus yang PMI-nya masih berada di negara penempatan, proses penyelesaian akan membutuhkan waktu lebih lama karena tidak bisa dilakukan mediasi secara langsung, kecuali PMI menunjuk kuasa hukum.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BP2MI dalam mencapai target kinerja adalah sebagai berikut.

1. Sejalan dengan pencanangan tahun 2022 sebagai tahun penempatan, pada tahun 2022 BP2MI telah melakukan upaya sebagai berikut:
  - a. Koordinasi virtual dengan Perwakilan RI/pemberi kerja/agency dalam rangka pembahasan MoU antara BP2MI dengan Morningside Ministries.
  - b. Pembahasan pertemuan bilateral secara virtual antara Pemerintah RI dengan KJRI Vancouver terkait peluang kerja yang berada di wilayah kerja KJRI Vancouver.
  - c. Pembahasan penyusunan draft cost structure skema penempatan PMI P to P ke Selandia Baru dan skema G to P Kawasan Amerika dan Pasifik.
  - d. Pelaksanaan Employment Business Meeting dalam rangka membuka peluang kerja PMI dimana BP2MI memfasilitasi pertemuan antara potensial employer/calon pengguna potensial (demander) dengan penyedia CPMI di dalam negeri (supplier).
  - e. Pelaksanaan FGD diantaranya terkait penguatan skema penempatan PMI; pembahasan Materi Orientasi Pra Penempatan/Buku Saku PMI yang akan ditempatkan ke Rumania, Polandia dan Italia; serta penempatan wilayah pasar kerja baru dan peluang kerja baru di Kawasan Asia dan Afrika.
  - f. Pemetaan lembaga pendidikan dan pelatihan yang telah bekerja sama dengan BP2MI dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sebagai bahan pemetaan supply CPMI.
  - g. Penyebarluasan Informasi Mekanisme Penempatan PMI dan Evaluasi SIP2MI.
2. Dalam rangka meningkatkan fasilitasi penanganan kasus dan pemberdayaan, upaya yang dilakukan antara lain pelayanan pengaduan berbasis sistem; penyelesaian kasus PMI dan/atau keluarganya yang menghadapi masalah; fasilitasi bantuan hukum bagi Calon PMI/PMI yang menghadapi masalah; fasilitasi pengajuan klaim jaminan sosial/asuransi; fasilitasi pemberdayaan ekonomi dan sosial PMI dan keluarganya; fasilitasi, rehabilitasi dan reintegrasi Purna PMI Bermasalah; serta penyebarluasan informasi perlindungan dan pemberdayaan calon PMI, PMI dan keluarganya.
3. Dalam rangka memperoleh kinerja terbaik dan opini WTP atas Laporan Keuangan di lingkungan BP2MI, maka langkah/upaya yang ditempuh antara lain adalah menumbuhkan komitmen dari seluruh jajaran di BP2MI untuk:



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1322 -

- a. Meningkatkan Integritas Pimpinan dan seluruh pegawai BP2MI.
- b. Penguatan SPIP.
- c. Penguatan Perencanaan dan Penganggaran.
- d. Peningkatan kualitas proses pengadaan barang/jasa.
- e. Pengelolaan Barang Milik Negara secara memadai.
- f. Keseriusan dalam penyelesaian tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK RI.

Rencana ke depan yang akan dilaksanakan BP2MI untuk meningkatkan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut.

1. Upaya perbaikan yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan jumlah penempatan PMI, diantaranya:
  - a. Pengembangan strategi pemanfaatan peluang kerja luar negeri sesuai karakteristik negara.
  - b. Pelaksanaan harmonisasi supply dan demand melalui penguatan kompetensi, bahasa dan sertifikasi.
  - c. Bersinergi dengan stakeholder terkait khususnya dengan Dirjen Hubla dan Kementerian Ketenagakerjaan dalam pencatatan penempatan ABK, serta pendataan PMI di negara tujuan penempatan melalui SISKOP2MI yang terintegrasi dengan Portal Peduli WNI.
  - d. Mendorong BA Jerman untuk mempercepat dan memperbanyak frekuensi pelaksanaan wawancara kerja dan proses penyiapan Perjanjian Kerja.
  - e. Pertemuan secara luring dengan Perwakilan RI untuk membahas alur proses legalisasi Job Order.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1323 -



**LKPP**

**Lembaga Kebijakan Pengadaan  
Barang / Jasa Pemerintah**

### **Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2022, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah menetapkan 5 (lima) sasaran strategis dengan 8 (delapan) indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2022, dari 8 (delapan) indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, 2 (dua) indikator kinerja (25%) memiliki capaian melebihi target, 6 (enam) indikator kinerja (75%) sesuai target, dan tidak terdapat indikator kinerja yang belum dihitung capaian kinerjanya.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2022.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pemerataan ekonomi untuk mendorong kemandirian bangsa melalui optimalisasi penerapan tata kelola pengadaan	Persentase penggunaan produk dalam negeri dalam proses pengadaan barang/jasa	50 Persen	84 Persen	168%
		Persentase nilai transaksi UMKM terhadap Rencana Umum Pengadaan	40 Persen	41,5 Persen	103,8%
		Indeks kualitas kebijakan PBJ	Predikat Sedang	Predikat Baik	100%
2	Meningkatnya kualitas penerapan tata Kelola pengadaan	Indeks tata kelola pengadaan	Predikat Cukup	Predikat Cukup	100%
3	Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi	Nilai reformasi birokrasi	Predikat BB	Predikat BB*	100%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan	Nilai AKIP	Predikat Baik	Predikat Baik*	100%
		Opini BPK	WTP	WTP*	100%
5	Meningkatnya kualitas layanan LKPP kepada publik	Nilai IKM	Predikat Baik	Predikat Baik	100%

Catatan: \*) masih menggunakan hasil Tahun 2021, karena realisasi Tahun 2022 belum diterbitkan/dikeluarkan

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2022 adalah sebagai berikut.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1324 -

No.	Program/Sasaran/Indikator	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	Dukungan Manajemen	Rp111.644.879.000	163.743.987.690	96,77
2	Pengadaan Barang/Jasa Nasional	Rp57.572.607.000		

Kendala dan hambatan selama pelaksanaannya sehingga mempengaruhi nilai capaian anggaran menjadi kurang optimal. Kendala dan hambatan yang mempengaruhi nilai capaian anggaran tersebut antara lain:

1. Belum optimalnya penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) beserta Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang menyebabkan terjadinya pemblokiran anggaran oleh Kementerian Keuangan di beberapa kegiatan serta anggarannya. Dengan adanya pemblokiran ini, menyebabkan terhambatnya beberapa pelaksanaan aktivitas yang telah direncanakan sebelumnya.
2. Terjadinya shifting beberapa mekanisme kegiatan dalam menyikapi beberapa perubahan target yang dinamis sebagai upaya pencapaian kinerja.
3. Di dalam bulan berjalan masih terjadi deviasi antara realisasi anggaran (RA) dengan rencana penarikan anggaran (RPA) yang disebabkan oleh mundur atau tidak dilaksanakannya kegiatan. Hal ini juga mempengaruhi konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaannya.
4. Belum optimalnya pengelolaan pertanggung-jawaban keuangan.
5. Terhambat atau gagalnya proses Pengadaan Barang/Jasa.
6. Adanya refocusing dan anggaran yang diblokir oleh Kementerian Keuangan.
7. Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) selama COVID-19, sehingga sebagian penyelenggaraan kegiatan harus dilakukan secara daring serta berakibat pada perubahan mekanisme kerja yang kurang menyerap anggaran.
8. Usulan tambahan anggaran baru disetujui dan dapat digunakan menjelang akhir tahun, hal ini menyebabkan penyerapan tidak dapat dilakukan secara optimal karena terbatasnya waktu yang tersisa.

Berdasarkan identifikasi permasalahan anggaran yang mengakibatkan realisasi anggaran menjadi tidak maksimal, perlu dilakukan upaya atau langkah-langkah strategis yang perlu dilaksanakan. Berikut langkah-langkah perbaikan dalam mencapai target kinerja anggaran maksimal, antara lain:

1. Dilakukannya rapat pimpinan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan sebagai media atau forum untuk mengidentifikasi kendala dan merumuskan solusi dalam rangka pencapaian kinerja.
2. Dilakukan koordinasi antar Unit Organisasi dalam rangka memperbaiki KAK serta RAB.
3. Dilakukan kegiatan pemantauan serta evaluasi secara berkala terhadap kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian kinerja.
4. Adanya peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan untuk pertanggung-jawaban keuangan serta penggunaan berbagai aplikasi pendukungnya;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1325 -

5. Diinformasikannya data dan/atau informasi capaian kinerja fisik, keuangan, progres PBJP dan informasi penting lainnya kepada pimpinan melalui Laporan bulanan untuk mendapatkan umpan balik dan masukan perbaikan.
6. Percepatan pelaksanaan kegiatan dengan memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang berbiaya besar. Namun demikian, prioritas kegiatan jangan hanya didasarkan padabesaran biaya yang dibutuhkan, tetapi juga disesuaikan dengan substansi kebutuhan dilaksanakannya kegiatan itu sendiri.
7. Pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kegiatan dan RPA yang sudah disusun. Dalam hal terdapat perubahan atau pengalihan anggaran untuk kegiatan lain, maka diusulkan revisi anggaran.

Dalam mencapai target indikator persentase penggunaan PDN dalam proses pengadaan barang/jasa terdapat beberapa kendala yaitu:

- a. Dalam hal menyajikan dan menyediakan PDN pada Katalog Elektronik, ditemukan kendala belum bervariasinya barang yang bersertifikat atau yang mengandung Tingkat Komponen Dalam Negeri sedangkan saat ini produk yang dapat dinyatakan sebagai PDN adalah produk yang sudah bersertifikat yang resmi diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian;
- b. Penetapan tagging PDN pada aplikasi SIRUP terhadap paket pengadaan barang/jasa pada RUP tidak didasarkan pada kajian perencanaan yang matang sehingga seringkali tidak terealisasikan dalam proses pengadaannya; dan
- c. Sudah Terdapat tagging PDN pada aplikasi SPSE yang terdapat pada versi 4.4 dan 4.5. Namun masih terdapat beberapa K/L/Pemda yang masih menggunakan SPSE dengan versi dibawah 4.4 dan 4.5.

Adapun upaya terkait dengan hal tersebut, LKPP melalui Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Monitoring secara berkala terhadap capaian PDN K/L/Pemda dan disampaikan dalam LKJ PBJ;
- b. Sosialisasi bersama dengan kementerian perindustrian terkait Ketersediaan PDN dalam Memenuhi Kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai upaya untuk mendorong K/L/Pemda untuk menggunakan PDN;
- c. Mendorong K/L/Pemda untuk menggunakan aplikasi SPSE versi terbaru yaitu versi 4.5 terhadap K/L/Pemda yang belum menggunakan aplikasi SPSE versi 4.5 dengan cara melakukan update pada aplikasi SPSE; dan
- d. Meningkatkan jumlah PDN pada Katalog Elektronik sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan PDN dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1326 -

Kendala K/L/Pemda yang mampu menyelesaikan permasalahan pengadaan secara mandiri:

- 1) Masih kurangnya kesadaran pemangku kepentingan K/L/Pemda terkait pentingnya Clearing House untuk diterapkan pada K/L/Pemda.
- 2) Masih terdapat keengganan dari K/L/Pemda untuk melaksanakan konsolidasi sebab berdampak pada perolehan angka kredit dari Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa.
- 3) Masih terdapat keengganan dari K/L/Pemda untuk melaksanakan Clearing house karena masih belum ada perhitungan angka kredit untuk Jabatan Fungsional dalam pelaksanaan kegiatan Clearing House;
- 4) K/L/Pemda dalam proses pelaksanaan konsolidasi belum dapat menggambarkan kebutuhan barang/jasa secara komprehensif dan tidak memahami teknis barang/jasa yang dibutuhkan.
- 5) Pada tahap penyusunan anggaran K/L/Pemda belum mempertimbangkan adanya potensi paket-paket yang dapat dilakukan konsolidasi pengadaan.
- 6) Dalam penyusunan perencanaan pengadaan K/L/Pemda belum sepenuhnya mempertimbangkan konsolidasi pengadaan.
- 7) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara kualitatif dan kuantitatif terhadap pelaksanaan probity advice yang dilaksanakan secara mandiri oleh K/L/Pemda.
- 8) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara kualitatif dan kuantitatif terhadap pelaksanaan probity advice yang dilaksanakan Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat dan Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah.
- 9) K/L/Pemda dalam proses pelaksanaan probity advice tidak terbuka dalam menginformasikan isu/permasalahan pengadaan sehingga informasi tidak lengkap.
- 10) Keterbatasan Anggaran dalam melaksanakan kegiatan Clearing House, konsolidasi dan probity advice secara luring, sehingga dilaksanakan kegiatan secara daring.

LKPP melalui Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa LKPP telah melakukan beberapa upaya untuk menginisiasi berbagai kegiatan dalam rangka mencapai target jumlah K/L/Pemda yang mampu menyelesaikan permasalahan pengadaan secara mandiri berupa:

- 1) Menjalin komunikasi dengan pimpinan K/L/Pemda untuk percepatan transformasi pengadaan;
- 2) Meningkatkan awareness dan komitmen stakeholder serta coaching dalam transformasi pengadaan dengan melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan kemandirian stakeholder untuk mendukung transformasi pengadaan.
- 3) Melakukan koordinasi dengan Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan untuk dapat mempertimbangkan perhitungan angka kredit terhadap paket-paket yang dilakukan konsolidasi.
- 4) Melaksanakan peningkatan kapasitas stakeholder dalam kegiatan PENTAS (Peningkatan Kapasitas Stakeholder Pengadaan Barang/Jasa) secara rutin secara daring dan live melalui youtube.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1327 -

- 5) Sosialisasi kepada K/L/Pemda dengan melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka memperhatikan konsolidasi pengadaan sejak tahap perencanaan penganggaran.
- 6) Melakukan proses monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan probity advice secara berkala.
- 7) Meningkatkan komitmen dari pimpinan K/L/Pemda atas keterbukaan informasi paket pengadaan yang akan dilakukan probity advice. 8) Membuat skala prioritas atas kegiatan yang harus dilakukan secara tatap muka. 9) Melakukan revisi pedoman dengan menyesuaikan kebutuhan lembaga dan stakeholder.

Pada saat proses penyelenggaraan Katalog Elektronik, beberapa kendala yang sering ditemui adalah sebagai berikut:

- a. Karena tidak ada tahapan verifikasi di awal sehingga PPK mengalami kesulitan dalam melakukan proses pemilihan terutama dalam menentukan harga terbaik;
- b. Ketidakstabilan aplikasi atau sering mengalami error pada saat proses penggunaannya;
- c. Alur proses pendaftaran menjadi Penyedia Katalog Elektronik tidak semudah e-commerce pada umumnya;
- d. Penyedia kurang meng-update informasi ketika ada pengembangan fitur aplikasi sehingga menghambat alur proses pencantuman produk; dan
- e. Harga yang tayang pada Katalog Elektronik lebih mahal dibanding e-commerce lainnya sehingga PPK kesulitan dalam melakukan transaksi di dalam aplikasi Katalog Elektronik.

Adapun upaya terkait dengan kendala tersebut, LKPP melalui Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Perlu dibuatnya suatu panduan terkait penentuan harga terbaik supaya PPK dapat mempertanggungjawabkan transaksi yang dilakukan agar terhindar dari kerugian Negara;
- b. Diperlukan proses peningkatan atau maintenance secara berkala untuk Aplikasi Katalog Elektronik serta dilakukan peningkatan kapasitas dari Pengguna Katalog Elektronik;
- c. Saat ini sedang dilakukan kerjasama dengan PT Telkom untuk dilakukan pengembangan New Platform Katalog sehingga diharapkan kedepannya Aplikasi Katalog Elektronik dapat mempermudah Penyedia dalam penggunaannya;
- d. Informasi mengenai update terbaru tentang Aplikasi Katalog Elektronik sudah diperbarui pada laman Berita aplikasi Katalog Elektronik, serta disediakan juga fitur helpdesk yang dapat membantu Penyedia bertanya mengenai kendala yang dialami; dan
- e. Dilakukan upaya monitoring dan evaluasi harga produk yang tayang secara rutin dengan penerapan sanksi sebagai upaya agar Penyedia tidak menjual produk yang lebih mahal dibandingkan dengan harga di luar Aplikasi Katalog Elektronik.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1328 -



**Badan Standardisasi Nasional**

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2022, Badan Standardisasi Nasional (BSN) telah menetapkan 5 (lima) sasaran strategis dengan 11 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2022, dari 11 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, 9 (Sembilan) indikator kinerja (81,80%) memiliki capaian melebihi target, 1 (satu) indikator kinerja (9,10%) sesuai target, 1 (satu) indikator kinerja (9,10%) tidak mencapai target, dan tidak terdapat indikator kinerja yang belum dihitung capaian kinerjanya.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2022.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	
1	Meningkatnya daya saing produk Indonesia	1	Persentase produk Indonesia ber-SNI yang diterima negara tujuan ekspor	30%	29,49 %	98,30%
		2	Persentase produk ekspor yang ber-SNI	4%	5,21%	130,25%
		3	Persentase produk ber-SNI	15%	15,56 %	103,73%
2	Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk mendukung ekspor produk Indonesia	4	Persentase ketersediaan SNI untuk mendukung ekspor produk Indonesia	50%	62,49 %	124,98%
3	Meningkatnya kepatuhan produk terhadap SNI	5	Persentase peningkatan produk yang sesuai dengan SNI	55%	64,30%	116,91%
4	Meningkatnya kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dan keberterimaan skema akreditasi	6	Persentase SNI yang tercakup dalam ruang lingkup LPK	11%	11,1%	100,91%
		7	Persentase LPK terakreditasi	11,5%	12,5%	108,70%
		8	Persentase pertumbuhan LPK terakreditasi	4%	6,30%	157,50%
		9	Persentase Skema akreditasi yang diakui (sesuai dengan standar) Internasional	70%	70%	100,00%



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1329 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	
5	Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional	10	Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang mendapatkan pengakuan global	144 CMC	146 CMC	101,39%
		11	Persentase kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang mendapatkan pengakuan global	36,6%	37,11%	101,39%

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

No	Program/Sasaran/Indikator	Pagu	Realisasi	%
1	Program Standardisasi Nasional	66.151.661.000	65.478.921.870	98,98%
2	Program Dukungan Manajemen	134.321.750.000	133.299.438.470	99,24%
<b>Total</b>		<b>193.185.710.000</b>	<b>190.949.727.409</b>	<b>98,84%</b>

Hambatan atau permasalahan dalam pencapaian kinerja BSN antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

1. Pendaftaran SPPT SNI menurun sebagai salah satu dampak dari pandemi Covid-19.
2. Industri (terutama pelaku usaha mikro dan kecil) masih kesulitan dalam memenuhi SNI dan secara umum melihat penerapan standar saat ini masih dianggap sebagai cost driver.
3. SNI yang telah diharmonisasi dengan Standar Internasional, belum dapat menunjukkan efektifitasnya untuk mendukung keberterimaan produk bertanda SNI tersebut di pasar negara tujuan ekspor.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BSN dalam mencapai target kinerja adalah sebagai berikut.

1. Peranan aktif BSN dalam hal kerjasama saling pengakuan dan keberterimaan atas hasil pengujian dan sertifikasi dengan mitra perdagangan Indonesia melalui MLA (multilateral recognition Agreement atau MRA(Mutual Recognition Arrangement)
2. Pembimbingan pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikasi SNI untuk melakukan ekspor produk ber-SNI, serta berperan aktif dalam pemberian pelayanan informasi terkait persyaratan, regulasi dan standar negara-negara tujuan ekspor.
3. Peningkatan promosi dan pengembangan pasar produk ber-SNI dengan berkolaborasi dengan atase perdagangan dan ITPC (Indonesian Trade Promotion Center) di negara tujuan pasar ekspor utama dan pasar baru untuk memperluas jangkauan ekspor.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1330 -

Rencana ke depan yang akan dilaksanakan BSN untuk meningkatkan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut.

1. Peranan aktif BSN dalam hal kerjasama saling pengakuan dan keberterimaan atas hasil pengujian dan sertifikasi dengan mitra perdagangan Indonesia melalui MLA (multilateral recognition Agreement Atau MRA (Mutual Recognition Arrangement)
2. Pembimbingan pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikasi SNI untuk melakukan ekspor produk ber-SNI, serta berperan aktif dalam pemberian pelayanan informasi terkait persyaratan, regulasi dan standar negara-negara tujuan ekspor.
3. Peningkatan promosi dan pengembangan pasar produk ber-SNI dengan berkolaborasi dengan atase perdagangan dan ITPC (Indonesian Trade Promotion Center) di negara tujuan pasar ekspor utama dan pasar baru untuk memperluas jangkauan ekspor.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1331 -



**Badan Pengawas Tenaga Nuklir**

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2022, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2022, dari 4 (empat) indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, 3 (tiga) indikator kinerja (75%) memiliki capaian melebihi target sedangkan sisanya yaitu 1 (satu) indikator kinerja (25%) belum dihitung capaian kerjanya.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2022.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Peningkatan kontribusi iptek dalam menjamin perlindungan keselamatan, keamanan dan garda aman nuklir	Indeks Keselamatan Nuklir (IKN)	84	91,72	109,19%
		Indeks Keamanan dan Garda aman Nuklir (IKGN)	84	90,04	107,19%
		Indeks Kesiapsiagaan Nuklir Nasional (IKNN)	92	93	101,08%
2	Peningkatan Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berkinerja Tinggi	Indeks Reformasi Birokrasi	82	Masih dalam proses penilaian KemenPANRB	Masih dalam proses penilaian KemenPANRB

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

No	Program	Pagu Awal Anggaran	Pagu Revisi Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	25.723.420	25.977.716	25.090.947	96,59%
2	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya BAPETEN	94.792.376	92.028.747	90.377.301	98,21%
TOTAL		120.515.796	118.006.463	115.468.248	97,85%

\*(dalam ribu rupiah)

Hambatan atau permasalahan dalam pencapaian kinerja BAPETEN antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1332 -

1. Adanya temuan-temuan inspeksi yang belum dapat ditindaklanjuti oleh Pemegang izin di beberapa fasilitas di BRIN semenjak adanya integrasi BATAN menjadi BRIN.
2. Penurunan jumlah fasilitas yang diinspeksi dibandingkan tahun sebelumnya, hal tersebut dikarenakan pengurangan anggaran inspeksi TA 2022 sehingga jumlah target fasilitas yang diinspeksi pun menjadi turun dengan menyesuaikan jumlah anggaran yang tersedia.
3. Pemberlakuan sistem pengawasan terbaru sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko serta penilaian inspeksi yang berbasis kinerja, sehingga menyebabkan beberapa perubahan kriteria dalam pemberian Anugerah BAPETEN 2022.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BAPETEN dalam mencapai target kinerja adalah sebagai berikut.

1. Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian IKK Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (FRZR) adalah sebagai berikut:
  - a. Pelaksanaan Inspeksi Partisipatif.
  - b. Penghargaan Anugerah BAPETEN.
  - c. Pembinaan Teknis Perizinan Sumber Radiasi Pengion.
  - d. Penegakan Hukum.
2. Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian IKK Instalasi Bahan dan Nuklir (IBN) adalah sebagai berikut:
  - a. Pelaporan Kejadian di Instalasi Nuklir.
  - b. Penilaian Diri (Self-Assessment) Safety Performance Indicator (SPI) Instalasi Nuklir.
  - c. Ratifikasi Konvensi Pertanggungjawaban Kerugian Nuklir.
  - d. Rapat Koordinasi Nasional Mineral Ikutan Radioaktif.
  - e. Uji Coba dan Implementasi Inspeksi Partisipatif IBN (Balis SMILE).
  - f. Pengembangan Sistem Perizinan Reaktor Daya Komersial (Balis L-NINO).
3. Berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pencapaian IKGK antara lain sebagai berikut:
  - a. Inspeksi Bahan Nuklir Dan Proteksi Fisik.
  - b. Inspeksi Penilaian Sistem Proteksi Fisik oleh Tim United States (US).
  - c. Rekomendasi Dari Hasil Inspeksi IAEA.
  - d. Annual Safeguards Review Meeting.
  - e. Asia Pasific Safeguards Network (APSN).
  - f. Focus Group Discussion (FGD) Keamanan Instalasi Nuklir, Safeguards dan Protokol Tambahan.
  - g. Kunjungan Kerja dalam Pengembangan Arsitektur Deteksi Keamanan Nuklir.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1333 -

Rencana ke depan yang akan dilaksanakan BAPETEN untuk meningkatkan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut.

1. Melakukan berbagai perbaikan mulai dari penyempurnaan peraturan perundang-undangan ketenaganukliran untuk mengakomodir perkembangan teknologi ketenaganukliran terhadap isu-isu keselamatan dan keamanan nuklir terkini, serta kemudahan berusaha;
2. Menjamin perlindungan keselamatan pekerja radiasi dan pasien radiologi melalui pemberian izin dan inspeksi di instalasi di seluruh Indonesia;
3. Mendukung infrastruktur keamanan nuklir nasional melalui pemasangan alat utama sistem pengawasan (Radiation Portal Monitor/RPM) di bandara dan pelabuhan laut yang diperlukan untuk melakukan pengawasan dan pencegahan perpindahan zat radioaktif dan bahan nuklir masuk/keluar wilayah Indonesia secara ilegal;
4. Membangun sistem pemantauan dan pengawasan radioaktivitas lingkungan di wilayah NKRI secara terpadu, berdaya guna dan berkelanjutan dengan menyiapkan pemantauan radioaktivitas lingkungan realtime (radiological data monitoring system) di seluruh wilayah NKRI yang mampu berfungsi sebagai Early Warning System (EWS) yang handal dalam kerangka pengawasan dan kesiapsiagaan nuklir nasional;
5. Melaksanakan pengawasan terhadap pembangunan reaktor daya melalui proses perizinan instalasi dan bahan nuklir sesuai dengan peraturan yang berlaku;
6. Melakukan sosialisasi dan edukasi publik, agar masyarakat mengerti dan percaya terhadap fungsi pengawasan pemanfaatan dan pengembangan tenaga nuklir serta mengkomunikasikan kebijakan pengawasan tenaga nuklir di Indonesia.





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1334 -



**Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika**

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2022, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2022, dari 4 (empat) indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, 2 (dua) indikator kinerja (50%) memiliki capaian melebihi target, tidak terdapat indikator kinerja yang capaian sesuai target, dan 2 (dua) indikator kinerja (50%) tidak mencapai target.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2022.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Layanan Prima Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Tematik Berbasis Dampak dan Resiko	Akurasi Informasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	88%	93,09%	105,78%
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Informasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	3,75 Skala Likert (Skala 4)	3,69 Skala Likert (Skala 4)	98,40%
		Persentase peningkatan pemahaman masyarakat terhadap informasi MKG	40%	53,77%	134,43%
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik ( <i>Good Governance</i> )	Nilai KemenPAN-RB atas RB BMKG	87 (Nilai)	77,76 (Nilai)	89,38%

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

No.	Program/Sasaran/Indikator	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Program Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	1.670.315.012.000	1.387.034.845.832	83,04
2	Program Dukungan Manajemen	1.173.406.109.000	1.011.085.845.114	86,17
TOTAL ANGGARAN		2.843.721.121.000	2.398.120.690.946	84,33



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1335 -

Hambatan atau permasalahan dalam pencapaian kinerja BMKG antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

1. Belum optimalnya koordinasi dan sinergi dengan *stakeholders* yang melakukan penyelenggaraan MKG sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Penyelenggaraan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tahun 2017–2041;
2. Masih ketergantungan terhadap produk peralatan monitoring MKG luar negeri (Import);
3. Adanya penambahan/pembangunan Bandara baru yang harus diberikan layanan informasi meteorologi penerbangan;
4. Ketergantungan BMKG dengan K/L lain dalam hal integrasi data monitoring untuk menerapkan *impact-based analysis/prediction* dan diseminasi informasi yang dapat menghambat pemberian informasi;
5. Pemahaman di lingkungan masyarakat akan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami masih belum optimal. Sehingga mengakibatkan masih tingginya dampak yang terjadi akibat gempa bumi dan tsunami walaupun informasi telah disampaikan kepada masyarakat;
6. Belum terintegrasinya dan kurang rapatnya jaringan pengamatan listrik udara yang merata di seluruh wilayah Indonesia;
7. Adanya irisan tugas, fungsi serta kewenangan penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang dilakukan oleh K/L, instansi dan perguruan tinggi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berbeda seperti pengamatan curah hujan, pengamatan getaran tanah akibat gempa bumi, pengamatan kualitas udara serta pengamatan tanda waktu, sehingga menjadi kendala tersendiri bagi BMKG dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal dan berpotensi menghambat capaian dan tujuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BMKG dalam mencapai target kinerja adalah sebagai berikut.

1. Indikator Kinerja: Akurasi Informasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika:
  - a. Akurasi Informasi Meteorologi
    - 1) Pelaksanaan bimbingan teknis dan koordinasi dengan UPT secara lebih intensif;
    - 2) Mengintensifkan Peringatan Dini Cuaca secara masif sebagai bentuk antisipasi terjadinya cuaca ekstrem yang menimbulkan dampak bagi masyarakat;
    - 3) Kami tetap akan melakukan peningkatan akurasi cuaca dengan mengembangkan metode asimilasi numerical weather prediction;
    - 4) Mengoptimalkan pemeliharaan dan kalibrasi peralatan secara rutin untuk menjaga performa peralatan agar dapat beroperasi dengan baik;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1336 -

- 5) Penambahan peralatan pengamatan meteorologi maritim di laut akan dilaksanakan dalam program STR-II untuk meningkatkan kerapatan data meteorologi maritim. Selain itu juga dilakukan pembangunan sistem pemodelan meteorologi-oseanografi;
  - 6) Memperbaharui metode verifikasi dan prakiraan cuaca di wilayah Indonesia yang begitu luas, beriklim tropis, dan topografi yang beragam melalui parameterisasi dan skema prakiraan cuaca yang dapat menangkap perubahan dinamika atmosfer di wilayah tropis;
  - 7) Peningkatan capacity building untuk SDM baik di Pusat Bidang Meteorologi maupun di UPT Meteorologi untuk meningkatkan kapasitas dan wawasan para forecaster melalui berbagai kegiatan seperti training, pelatihan teknis, workshop yang diselenggarakan secara nasional maupun internasional;
  - 8) Melakukan sertifikasi personel forecaster dan observer meteorologi untuk mendapatkan SDM yang handal dan sesuai standar internasional.
- b. Akurasi Informasi Klimatologi
- 1) Secara bertahap dilakukan penambahan jaringan pengamatan iklim dan dimanfaatkannya pengamatan iklim otomatis (ARG, AWS, dan AAWS) sebagai bahan masukan dalam pembuatan prediksi iklim;
  - 2) Secara bertahap dilakukan peningkatan dan pengembangan sistem analisis dan prediksi pemodelan data iklim dengan resolusi tinggi;
  - 3) Secara bertahap dilakukan peningkatan kapasitas SDM dalam melakukan analisis dan prediksi iklim;
  - 4) Secara bertahap melaksanakan pengamatan unsur iklim laut wilayah Indonesia untuk analisis dan prediksi iklim.
- c. Akurasi Informasi Geofisika
- 1) Melakukan analisis parameter gempabumi dengan waktu secepat dan seakurat mungkin, sehingga parameter gempabumi tersebut bisa diolah secepat mungkin di aplikasi pemodelan tsunami yang dapat menentukan potensi tsunami, waktu tiba penjarangan gelombang tsunami serta ketinggian tsunami di daerah terdampak;
  - 2) Proses otomatisasi shakemap corrected telah dimulai pada tahun 2016 dan telah berhasil dilaksanakan dimana shakemap yang memuat informasi tingkat guncangan berdasarkan masukan accelerograph dapat diproduksi secara otomatis.

2. Indikator Kinerja: Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Informasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1337 -

- a. Penyempurnaan sistem database berbasis aplikasi/website <http://ptsp.bmkg.go.id> yang dipergunakan oleh unit PTSP baik di Pusat maupun di PTSP daerah. Pengajuan layanan dapat diakses langsung melalui website. Tujuan dalam penggunaan aplikasi tersebut adalah sebagai berikut:
    - 1) Mempersingkat proses administrasi permohonan dari pelanggan sehingga lebih efisien dan efektif, mengurangi prosedur yang berbelit-belit.
    - 2) Mengumpulkan dan menyimpan data-data pelanggan yang sudah pernah mengajukan permohonan di unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
    - 3) Mengumpulkan dan menyimpan permohonan yang pernah masuk unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sehingga mempermudah dalam pembuatan laporan bulanan maupun tahunan.
  - b. Penyediaan Kotak Saran untuk menampung masukan, kritik, dan saran dari para pengunjung/ pelanggan yang pernah datang ke unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan untuk pelanggan yang mengajukan layanan secara online dapat mengajukan kritik ataupun saran melalui website (<http://ptsp.bmkg.go.id>).
  - c. Peningkatan media komunikasi digital untuk meningkatkan kemudahan penyampaian informasi secara mobile.
  - d. PTSP telah membuat mekanisme pelayanan dalam bentuk infografis untuk memudahkan masyarakat dalam memahami alur standar pelayanan PTSP.
  - e. Perbaikan dan pembaruan SOP terkait pelayanan permohonan data dan informasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika kepada publik.
3. Indikator Kinerja: Persentase peningkatan pemahaman masyarakat terhadap informasi MKG
- a. Persentase pemahaman masyarakat terhadap informasi meteorologi
    - 1) Agar dilakukan persiapan yang lebih matang terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dipengaruhi oleh Pandemi Covid-19, serta mengantisipasi kegiatan-kegiatan alternatif yang sesuai aturan dapat menggantikan kegiatan yang terkendala oleh Pandemi Covid-19, terutama Paket Meeting, Sekolah Lapang, dan kegiatan yang sejenis.
    - 2) Melakukan inovasi dengan menyelenggarakan Sekolah Lapang Cuaca Perairan (SLCP) yang merupakan pengembangan kegiatan untuk stakeholder lainnya di sektor transportasi darat dan laut.
    - 3) FGD Cuaca Jalur Penyeberangan darat dan laut juga menjadi momentum digiatkannya kembali kegiatan PMO yang selama ini sudah dilaksanakan oleh UPT Meteorologi Maritim.
    - 4) Melaksanakan kegiatan Revitalisasi PMO (Port Meteorological Officer), PMO merupakan perwakilan dari UPT Meteorologi Maritim yang memiliki peranan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1338 -

penting sebagai kontak utama dengan stakeholder maritim, yang meliputi otoritas pelabuhan serta komunitas maritim secara umum.

- 5) Untuk pengelolaan kegiatan meteorologi maritim diperlukan koordinasi dengan pihak kapal dan pihak lain yang terkait sangat perlu dimaksimalkan sehingga program VOS (Voluntary Observing Ship) dapat berjalan dengan optimal di wilayah perairan Indonesia.
  - 6) Meningkatkan partisipasi publik dalam hal peningkatan pemahaman informasi meteorologi melalui swadaya dari stakeholder atau non-APBN.
- b. Persentase pemahaman masyarakat terhadap informasi klimatologi
- 1) Melakukan inovasi penyelenggaraan Sekolah Lapangan Iklim dengan konsep Operasional, dengan memfokuskan kepada kelompok tani binaan untuk mendukung keberlanjutan.
  - 2) Melaksanakan penguatan literasi pemahaman iklim berbasis komunitas untuk kelompok-kelompok masyarakat seperti penggiat lingkungan, pelajar di sekolah dan masyarakat umum, serta penerbitan majalah ilmiah populer KLIMA untuk literasi iklim.
  - 3) Meningkatkan dan mendayagunakan media sosial sebagai media sosialisasi yang efektif untuk peningkatan pemahaman mengenai literasi fenomena iklim, dampak, dan adaptasinya.
- c. Persentase pemahaman masyarakat terhadap informasi geofisika
- 1) Secara bertahap memberikan informasi kepada orang awam yang belum mengetahui istilah-istilah teknis yang berkaitan dengan geofisika. Sehingga Kesalahan kutipan atau penggunaan istilah geofisika yang kurang pas oleh media dapat dihindari, yang kemudian pemahaman dan persepsi yang berbeda di kalangan masyarakat dapat dihindari.
  - 2) Melanjutkan dan memperluas sasaran dari pelaksanaan SLG (Sekolah Lapangan Gempa) dan juga sekolah lapangan lainnya seperti BMKG Goes To School, masyarakat siaga tsunami.
  - 3) BMKG secara periodik memberikan informasi mengenai gempa bumi dan peringatan dini tsunami kepada pemerintah kota/kabupaten dan provinsi se-Indonesia. Informasi tersebut disebarluaskan sebagai acuan untuk mengambil langkah antisipasi dan mitigasi terhadap dampak bencana gempa bumi dan tsunami. Informasi yang sama juga diberikan kepada masyarakat melalui media massa baik cetak maupun elektronik.
  - 4) Dalam penyebaran informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami, terus mengembangkan kerjasama dengan berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, sekolah dan pengelola media massa di



**PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA**

- 1339 -

Indonesia. Secara periodik atau setiap hari, hasil pengolahan informasi gempabumi dan potensi tsunami disebarluaskan kepada pengelola media massa dan masyarakat.

- 5) Lebih meningkatkan dan mendayagunakan semua media sosial yg ada sebagai media sosialisasi, pemahaman dan respon terhadap informasi gempabumi dan peringatan dini tsunami.

4. Indikator Kinerja: Nilai KemenPAN-RB atas RB BMKG

- 1) Memastikan keselarasan antara rencana aksi RB yang terdapat di dalam roadmap RB dengan sasaran utama RB serta Rencana Strategis dan penganggaran BMKG, dengan melihat kesesuaian antara Rencana Kegiatan RB dengan Renstra dan penganggaran.
- 2) Melakukan penyempurnaan aplikasi Monev RB BMKG dan berkoordinasi dengan setiap pokja untuk dapat mengisi capaian aksi masing-masing.
- 3) Mengumpulkan data inovasi yang ada di BMKG dan memastikan apakah inovasi yang dilakukan sudah terintegrasi/belum dengan sistem manajemen.
- 4) Mensosialisasikan value BerAKHLAK melalui pembuatan banner, spanduk di unit kerja BMKG, dan meminta agar unit kerja menggunakan logo BerAKHLAK pada setiap program/kegiatan yang dilaksanakan.
- 5) Melakukan identifikasi dan analisis dampak terhadap peraturan perundang-undangan, serta melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun.
- 6) Menyusun Rancangan Peraturan Kepala BMKG Tentang Sistem Kerja pada Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.
- 7) Melakukan evaluasi kelembagaan berdasarkan Permenpan 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah.
- 8) Telah ditetapkan IT Blue Print di lingkungan BMKG dengan Perka BMKG No. 4 Tahun 2020 tentang Cetak Biru (Blue Print) Teknologi Informasi BMKG Tahun 2020-2024.
- 9) Telah ditetapkan Perka BMKG No.2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan BMKG.
- 10) Telah dilakukan integrasi aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan BMKG.
- 11) Menggunakan cascading dari pohon kinerja dan Perjanjian Kinerja dalam penyusunan SKP Individu.
- 12) Menggunakan SIKOMPAS (Sistem Informasi Asesmen Virtual) untuk melakukan asesmen dan mengkoordinir hasil asesmen dengan Pusdiklat.
- 13) Penyempurnaan integrasi aplikasi E-Kinerja BMKG (ekinerja.bmkg.go.id) dengan Aplikasi Sistem Tata Kelola Manajemen Perencanaan BMKG (SITAMPAN) yang merupakan integrasi dari sistem perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1340 -

- 14) Pengintegrasian Aplikasi Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) secara digital melalui menu Perjanjian Kinerja pada aplikasi e-kinerja.
- 15) Menguatkan peran Tim Penilai Internal (TPI) dalam melakukan pembinaan dan pendampingan kepada unit kerja, terutama unit kerja yang telah melakukan pembangunan ZI atau diusulkan untuk memperoleh predikat WBK/ WBBM kepada TPN.
- 16) Menguatkan kapasitas, kuantitas serta peran APIP dalam memberikan dukungan bagi unit kerja untuk penguatan integritas dan pencapaian kinerja utama.
- 17) Melaksanakan sosialisasi inovasi Bidang MKKuG melalui kegiatan OGD dan Surat Edaran Deputi.
- 18) Melaksanakan kegiatan Sekolah Lapang Iklim, Nelayan, Gempa dan Meteorologi Penerbangan secara rutin tiap tahun.
- 19) Melaksanakan monev hasil SKM melalui aplikasi eskm.bmkg.go.id secara rutin.

Rencana ke depan yang akan dilaksanakan BMKG untuk meningkatkan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut.

1. Indikator Kinerja: Akurasi Informasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
  - a. Selalu melaksanakan pembaharuan dan pemutakhiran informasi MKG sebagai langkah mitigasi dan antisipasi dalam upaya meningkatkan layanan informasi MKG yang cepat, tepat, akurat dan mudah dipahami kepada masyarakat dalam 12 sektor (transportasi, pertanian dan kehutanan, pariwisata, pertahanan dan keamanan, konstruksi (infrastruktur), tata ruang, kesehatan, sumber daya air, energi dan pertambangan, industri, kelautan dan perikanan, serta penanggulangan bencana).
  - b. Diperlukan penambahan dan peremajaan peralatan-peralatan operasional utama BMKG untuk meningkatkan kerapatan dan kualitas data MKG.
  - c. Meningkatkan kemudahan akses untuk dapat melakukan analisis secara remote, mengingat pandemi Covid-19 belum akan berakhir.
  - d. Meningkatkan kajian dalam pengelolaan data dan/atau informasi MKG secara berkesinambungan untuk mendukung operasional dan layanan informasi MKG dengan tujuan untuk mendukung penguatan sistem peringatan dini MKG, sehingga dapat mengurangi atau mencegah dampak bencana, baik korban jiwa maupun kerusakan bangunan dan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat.
  - e. Meningkatkan kapasitas SDM MKG dalam transformasi BMKG menuju lembaga dengan layanan informasi MKG berkelas dunia.
  - f. Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder terkait layanan informasi MKG sehingga dapat mewujudkan layanan MKG yang berkualitas.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1341 -

2. Indikator Kinerja: Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Informasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
  - a. Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) PTSP Pusat dan PTSP Daerah sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan data dan informasi sehingga pelayanan yang dilakukan sesuai dengan standar.
  - b. Meningkatkan Pengolahan data survei dengan quality control yang tervalidasi secara otomatis dan cepat melalui aplikasi e-SKM BMKG.
  - c. Alokasi dana dan waktu yang cukup untuk pelaksanaan SKM, sehingga pelaksanaannya dapat diselenggarakan secara optimal. Dengan alokasi dana dan cukup pelaksanaan SKM dapat dilakukan dengan berbagai metode pencacahan dan penyampaian kuesioner yang lebih beragam ke seluruh stakeholder dan customer, selain itu pelaksanaan SKM dapat bekerjasama dengan lembaga/pihak lain yang memahami, menguasai dan berpengalaman sehingga di dapatkan hasil yang lebih objektif.
3. Indikator Kinerja: Persentase peningkatan pemahaman masyarakat terhadap informasi MKG
  - a. Meningkatkan dan mendayagunakan semua media sosial yang ada sebagai media sosialisasi, pemahaman dan respon terhadap informasi MKG.
  - b. Melakukan inovasi dalam penyelenggaraan Sekolah Lapang MKG yang merupakan pengembangan kegiatan untuk stakeholder lainnya.
  - c. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan stakeholder dan pemangku kepentingan lainnya secara rutin dan periodik untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan terkait pemahaman terhadap informasi MKG kepada masyarakat.
  - d. Melanjutkan dan memperluas kegiatan-kegiatan pemahaman kepada masyarakat terhadap informasi MKG melalui sekolah lapang baik SLCN, SLI maupun SLG.
  - e. Terus memberikan informasi kepada masyarakat mengenai istilah-istilah teknis yang berkaitan dengan MKG, sehingga kesalahan kutipan atau penggunaan istilah geofisika yang kurang pas oleh media dapat dihindari, yang kemudian pemahaman dan persepsi yang berbeda di kalangan masyarakat dapat dihindari.
4. Indikator Kinerja: Nilai KemenPAN-RB atas RB BMKG
  - a. Memaksimalkan layanan Klinik Pengawasan di lingkungan BMKG.
  - b. BMKG melalui UPT di daerah akan senantiasa berupaya membangun zona integritas untuk mewujudkan layanan informasi MKG yang handal dan terpercaya.
  - c. Mengefektifkan implementasi Peraturan Kepala BMKG tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi melalui tahapan: sosialisasi, public campaign, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut.
  - d. Mengefektifkan penerapan penanganan pengaduan masyarakat melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui tahapan: Penyusunan SOP, Evaluasi dan Pelaporan.





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1342 -

- e. Menyusun kebijakan dalam menindaklanjuti hasil penyetaraan jabatan dan penyederhanaan birokrasi adalah evaluasi jabatan, peraturan manajemen kinerja dan pola tata hubungan kerja antar JPT dan JF yang sebenarnya terkait erat dalam penerapannya. Langkah penyusunan kebijakan tersebut antara lain:
- 1) Identifikasi / pemetaan alur kinerja BMKG sampai dengan unit terkecil pasca penyetaraan.
  - 2) Melakukan identifikasi kebutuhan jabatan fungsional yang dibutuhkan untuk mencapai target /output/outcome unit kerja dan organisasi.
  - 3) Menyusun evaluasi jabatan berdasarkan pertimbangan perkembangan JF yang dinamis.
  - 4) Menyusun pohon kinerja berdasarkan hasil pemetaan kinerja.
  - 5) Menyusun peraturan manajemen kinerja berdasarkan prinsip dalam PermenPAN-RB Nomor 8 Tahun 2021. Dengan alur kinerja yang telah terpetakan sebelumnya, akan lebih mempermudah pembagian matriks peran hasil untuk JPTP dan JF dalam koordinasinya.
- f. Proses penyempurnaan ukuran kinerja dan pemanfaatan sistem monitoring kinerja merupakan bagian dari penerapan manajemen kinerja. Terdapat beberapa Langkah yang sedang disusun oleh BMKG dalam penerapan manajemen kinerja, antara lain:
- 1) Monitoring dan evaluasi kinerja diintegrasikan dalam sistem informasi yang mempermudah pengawasan, bimbingan kerja oleh Tim Penilai Kinerja yang terdiri dari Pengelola SDM, Perencanaan dan Pengawasan Internal.
  - 2) *Reward dan punishment* hasil penilaian kinerja dihitung berdasarkan capaian target yang dicantumkan dalam peraturan manajemen kinerja.
- g. Proses penyempurnaan ukuran kinerja dan pemanfaatan sistem monitoring kinerja merupakan bagian dari penerapan manajemen kinerja. Terdapat beberapa langkah yang akan diterapkan oleh BMKG dalam penerapan manajemen kinerja, antara lain:
- 1) Identifikasi / pemetaan alur kinerja BMKG sampai dengan unit terkecil pasca penyetaraan.
  - 2) Penyempurnaan pohon kinerja berdasarkan hasil pemetaan kinerja.
  - 3) Finalisasi peraturan manajemen kinerja.
  - 4) Sosialisasi Pemahaman konsep proses kinerja, budaya kinerja, cara penilaian kinerja yang dilakukan secara sistemik dengan mewajibkan pimpinan unit kerja "lulus" mempelajari konsep manajemen kinerja.
  - 5) Melakukan sosialisasi dan peyebarluasan pemahaman konsep kinerja melalui knowledge management (LMS) Pusdiklat.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1343 -



**Badan Informasi Geospasial**

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2022, Badan Informasi Geospasial (BIG) telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis dengan 7 (tujuh) indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2022, dari 7 (tujuh) indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, 6 (enam) indikator kinerja (85,71%) memiliki capaian melebihi target sedangkan 1 (satu) indikator kinerja (14,29%) tidak mencapai target.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2022.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Awal	Target Revisi	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya ketersediaan informasi geospasial dasar yang berkualitas dan siap pakai sesuai kebutuhan pembangunan nasional	Persentase (%) ketersediaan Informasi Geospasial Dasar yang berkualitas dan siap pakai mencakup seluruh wilayah Indonesia sesuai kebutuhan pembangunan nasional	23,53%	21,31%	28,44%	133,46%
		Pertumbuhan Penggunaan IGD untuk memenuhi kebutuhan pembangunan nasional	9,45%	9,08%	11,83%	130,29%
2	Meningkatnya ketersediaan informasi geospasial tematik yang berkualitas sesuai kebutuhan pembangunan nasional	Persentase (%) ketersediaan Informasi Geospasial Tematik yang berkualitas sesuai kebutuhan pembangunan nasional	73,79%	73,79%	74,16%	100,5%
		Persentase (%) jumlah Pemerintah Daerah yang telah memanfaatkan IG untuk penyusunan Rencana Tata Ruang	20,40%	21,31%	21,81%	102,35%
		Persentase (%) IGT strategis yang dimanfaatkan oleh K/L/P	22,62%	63,10%	68,45%	108,48%
3	Terselenggaranya infrastruktur informasi geospasial yang	Indeks Infrastruktur Informasi Geospasial yang berkualitas	7,23 Indeks (Skala Likert 1-10)	7,62 Indeks (Skala Likert 1-10)	8,36 Indeks (Skala Likert 1-10)	109,71%



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1344 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Awal	Target Revisi	Realisasi	Capaian
	berkualitas untuk mendukung ketersediaan, akses, dan pemanfaatan informasi geospasial nasional			1-10)		
4	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan terpercaya	Nilai Reformasi Birokrasi BIG	76 (Nilai RB)	76 (Nilai RB)	74,02 (Nilai RB)	97,39%

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dukungan Manajemen	164.973.492.000	157.103.380.268	95,23%
Penyelenggaraan Informasi Geospasial	287.271.707.000	249.144.749.956	86,73%
Jumlah	452.245.199.000	406.248.130.224	89,83%

Hambatan atau permasalahan dalam pencapaian kinerja BIG antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

1. Pemutakhiran peta dasar dalam proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota masih terkendala ketersediaan SDM spasial yang kurang memadai serta keterbatasan anggaran yang dapat dialokasikan.
2. Pemblokiran anggaran pada DIPA BIG sebesar 55% dari total pagu sejak awal tahun 2022 membuat beberapa kegiatan menjadi mundur pelaksanaannya.
3. Terjadinya gagal lelang pada beberapa kegiatan kontraktual sehingga pelaksanaan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
4. Penerimaan PNBK tahun 2022 yang tidak memenuhi target yang telah ditentukan, sehingga memengaruhi realisasi anggaran secara keseluruhan.
5. Penyesuaian terhadap target kinerja yang telah ditetapkan membuat pelaksanaan kegiatan menjadi terhambat karena membutuhkan revisi informasi kinerja melalui Bappenas dan Kemenkeu c.q. DJA.
6. Penerapan RSPP yang belum sepenuhnya dapat diimplementasikan secara baik dan efektif, sehingga masih ada keraguan dalam menilai kesesuaian suatu RO untuk pelaksanaan kegiatan di bidang Informasi Geospasial.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BIG dalam mencapai target kinerja adalah sebagai berikut.

1. Percepatan pembangunan Continuously Operating Reference Station (CORS) atau yang biasa disebut dengan Stasiun InaCORS dan merupakan bagian dari SRGI Horizontal.
2. Pemutakhiran InaGeoid pada tahun 2022 seluas 535.104 Km<sup>2</sup> yang merupakan bagian dari SRGI Vertikal.



**PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA**

- 1345 -

3. Upaya yang dilakukan BIG untuk meningkatkan ketersediaan peta dasar adalah dengan mekanisme Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Milik Negara (KPBUMN).
4. Beberapa upaya yang telah dilakukan BIG untuk terus meningkatkan implementasi RB adalah sebagai berikut:
  - a. Penyusunan Peta Jalan (Road Map) Reformasi Birokrasi BIG Tahun 2020-2024 yang telah disahkan menjadi Keputusan Kepala BIG Nomor 22 Tahun 2021.
  - b. Mengoptimalkan peran Agent of Change (AoC) yang telah dibentuk sejak tahun 2015 untuk menciptakan budaya kinerja yang cepat, adaptif, dan dinamis, dengan cara membuat rencana kerja AoC pada setiap Unit Kerja Eselon (UKE) I dan II.
  - c. Deregulasi untuk memperpendek rantai birokrasi khususnya peraturan perundang-undangan bidang IG mengikuti skema omnibus law melalui Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021.
  - d. Melakukan penyempurnaan implementasi manajemen kinerja, mulai dari perencanaan, penetapan, monitoring dan evaluasi kinerja. Perumusan indikator kinerja sudah sesuai dengan kaidah SMART dan diturunkan (cascade) secara berjenjang disertai dengan pembuatan rencana aksi yang selaras.
  - e. Optimalisasi pengendalian internal dengan mendorong setiap UKE II melakukan identifikasi risiko dan antisipasi benturan kepentingan dalam rangka pencapaian kinerja secara efektif.
  - f. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara efektif setiap triwulan sehingga para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Madya dapat memantau target kinerja yang telah ditetapkan.
  - g. Melakukan revisi IKU yang masih berorientasi output menjadi outcome sehingga nilai kemanfaatan BIG sebagai instansi pemerintah dapat dirasakan oleh stakeholders.
  - h. Pada tahun 2022 terdapat 3 (tiga) unit yang telah memiliki predikat WBK, sehingga akan mengusulkan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) baru menjadi 7 (tujuh) UKE II pada tahun 2023.
  - i. Penyederhanaan birokrasi dengan memangkas 90% Jabatan Administrator (Eselon III) dan menghilangkan Jabatan Pengawas (Eselon IV).
  - j. Pelaksanaan sistem merit secara menyeluruh dalam menentukan perencanaan dan pengembangan karir SDM BIG sehingga didapatkan entitas organisasi yang kompeten dan profesional.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1346 -

Rencana ke depan yang akan dilaksanakan BIG untuk meningkatkan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut.

1. Proses perencanaan anggaran telah menggunakan kaidah RSPP sehingga program dan kegiatan yang dilakukan tidak lagi mencerminkan tugas dan fungsi UKE I dan II tetapi lebih fokus pada tujuan dan sasaran yang akan dicapai BIG;
2. Proses penyusunan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan menggunakan prinsip performance based budgeting sehingga dapat terlihat keterkaitan dengan sasaran program hingga sasaran strategis;
3. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi terkait kinerja dan anggaran dilakukan secara rutin dalam periode triwulan dengan melibatkan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama;
4. Peningkatan peran SPIP, dan melakukan mitigasi resiko terhadap kegiatan yang berisiko tinggi serta kegiatan prioritas lainnya;
5. Pembatasan revisi DIPA dan POK untuk menjaga kesesuaian dengan rencana yang telah ditetapkan; dan
6. Perbaikan dan percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui koordinasi secara intensif antara APIP dengan unit kerja terkait.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1347 -



**Komisi Pengawas Persaingan Usaha**

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2022, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah menetapkan 2 sasaran strategis dengan 3 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2022, dari 3 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, 2 indikator kinerja (66,67%) memiliki capaian melebihi target, dan 1 indikator kinerja (33,33%) tidak mencapai target capaian kerjanya.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2022.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya kepastian hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi yang sehat dengan advokasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang sehat	Tingkat persaingan usaha yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip UU Nomor 5 Tahun 1999 (Indeks Persepsi Persaingan Usaha, skala 1 – 7)	4.7	4.87	104%
		Persentase penyelesaian proses penegakan hukum persaingan usaha yang sesuai dengan peraturan berlaku	90	100	111%
2.	Terwujudnya tata kelola kelembagaan KPPU melalui <i>e-government</i> dalam rangka peningkatan kualitas layanan manajemen baik internal maupun eksternal	Indeks Tingkat efektivitas pemanfaatan <i>e-government</i> (Percepatan dan kemudahan pelayanan, transparansi pelayanan, kepastian waktu dan keamanan data, skala 1 -100)	79	77,73	98,39%

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pengawasan Persaingan Usaha	34.778.671.000	34.092.838.578	98,03
2.	Dukungan Manajemen	100.863.994.000	99.921.783.352	99,06
Jumlah		135.642.665.000	134.014.621.930	96,59

Hambatan atau permasalahan dalam pencapaian kinerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

1. belum terdapatnya acuan/juknis/ketentuan internal di lingkungan KPPU untuk pemenuhan standar layanan publik. Standarisasi terkait layanan publik yang berpedoman pada Peraturan Menteri



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1348 -

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mencapai target kinerja adalah sebagai berikut.

1. melakukan koordinasi tindak lanjut dengan unit kerja terkait dan Kementerian PAN-RB untuk dapat memberikan pendampingan dan konsultasi dalam upaya perbaikan dalam rangka mengefektifkan penerapan layanan publik yang berbasis digital.

Rencana ke depan yang akan dilaksanakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk meningkatkan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan kemudahan akses agar alur koordinasi lintas kementerian/instansi/ lembaga semakin efektif.
2. Penguatan kapasitas sumber daya manusia dengan melanjutkan proses alih status yang diawali dengan penataan manajemen SDM di KPPU Pusat maupun di Kantor Wilayah.
3. Pemanfaatan publikasi yang lebih strategis dan tersegmentasi dengan baik dan telah diformalkan dalam bentuk Jaringan Dokumentasi Ilmu Hukum (JDIH).
4. Evaluasi bersama hasil kinerja KPPU yang ditindaklanjuti bersama antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Keuangan sehingga menjadi catatan perbaikan untuk tahun – tahun mendatang.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1349 -



**Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas  
dan Pelabuhan Bebas Batam**

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2022, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) telah menetapkan 5 sasaran strategis dengan 14 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2022, dari 14 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, 4 indikator kinerja (28,57%) memiliki capaian melebihi target, 1 indikator kinerja (7,14%) sesuai target, dan 9 indikator kinerja (64,29%) tidak mencapai target capaian kerjanya.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2022.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Realisasi Investasi di KPBPB Batam	Nilai Realisasi Investasi di KPBPB Batam	25.000.000.000.000	30.401.000.000.000	121,60%
2.	Meningkatnya prasarana dan sarana pendukung investasi di KPBPB Batam	Persentase Pembangunan Infrastruktur yang Mendukung Investasi di KPBPB Batam	100% (32 paket)	31 paket	96,88%
		Persentase Penyelesaian Pengembangan Kawasan Berwawasan Lingkungan dan Energi Baru Terbarukan	100%	100%	100%
		Persentase Penyelesaian Pengembangan Kawasan yang Mendukung Edukasi, UMKM, dan Pariwisata	100%	93%	93%
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perijinan	Persentase ketepatan waktu penyelesaian perijinan	Pertanahan (100%) Dirlalin (100%) PTSP (100%) SPAM (100%)	Pertanahan (100%) Dirlalin (100%) PTSP (100%) SPAM (83%)	95,75%
		Tercapainya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	≥85,00	81,69	96,11%
4.	Optimalisasi Pemanfaatan Aset BLU	Realisasi PNBP (Pendapatan Kantor Pusat)	Rp 640.147.950.000	Rp 1.001.439.693.768,68	156,44%
		Realisasi PNBP (Pendapatan Unit Mandiri)	Rp 1.058.168.608.000	Rp 961.615.677.245,70	90,88%
		Total	Rp 1.698.316.558.000	Rp 1.963.055.371.014,38	115,59%





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1350 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU	100%	105,46%	105,46%
		Persentase penyelesaian rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi dari Dit. PPK BLU secara tepat waktu	100%	N/A	N/A
5.	Terwujudnya Pengelolaan Organisasi BP Batam yang Berkualitas, Akuntabel, Efisien dan Melayani	Jumlah unit usaha dan unit pelayanan di BP Batam yang Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi	2 Unit	70%	70%
		Persentase penyelesaian perencanaan pengembangan KPBPB Batam	100%	99,69%	99,69%

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

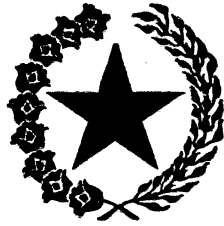
No	Penyerapan Anggaran Berdasarkan Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Rupiah Murni	40.576.629.000,00	40.375.751.560,00	99,51
2.	Belanja Pinjaman Hibah Luar Negeri	124.000.000.000,00	7.043.739.354,00	5,68
3.	Belanja Rupiah Murni Pendamping	17.964.129.000,00	1.822.389.780,00	10,15
4.	Belanja PNPB	2.007.677.500.000	1.588.622.837.698,73	79,13
I	Program Pengembangan Kawasan Strategis	1.146.044.748.000,00	805.599.209.433,96	70,29
II	Program Dukungan Manajemen	861.632.752.000,00	783.023.628.264,77	90,87
	Jumlah	2.190.218.258.000,00	1.637.864.718.392,73	74,78

Hambatan atau permasalahan dalam pencapaian kinerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

1. Hambatan eksternal yaitu terjadinya pembatalan dari pihak ketiga/mitra kerja terhadap Pengembangan Kawasan yang Mendukung Edukasi, UMKM, dan Pariwisata sehingga capaian tidak 100% tercapai.
2. Hambatan internal yang cukup mempengaruhi capaian kinerja adalah kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang belum optimal.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dalam mencapai target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Dalam pemilihan mitra kerja, dicari mitra kerja yang potensial dan segera dilakukan kerjasama dengan berpedoman pada Peraturan Kepala BP Batam Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Aset.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di Lingkungan BP Batam dengan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan sesuai kebutuhan dan rekrutmen pegawai baru sesuai dengan formasi jabatan dan kompetensi yang diperlukan.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1351 -

Rencana ke depan yang akan dilaksanakan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) untuk meningkatkan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut.

1. Renstra BP Batam agar digunakan menjadi dasar penyusunan Kontrak Kinerja secara berjenjang guna mendukung capaian kinerja organisasi dan kinerja individu (Sasaran Kinerja Pegawai) yang digunakan sebagai dasar pemberian remunerasi (reward and punishment).
2. Program/Kegiatan direncanakan dengan akurat, sehingga dalam pelaksanaannya tercapai dan dapat meningkatkan capaian kinerja.
3. Kementerian terkait, agar segera melimpahkan perizinan AMDAL dan lainnya ke BP Batam sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, agar Investor dapat merealisasikan dan melaksanakan kegiatan usahanya dengan cepat.
4. Dalam pemilihan mitra kerja, dicari mitra kerja yang potensial dan segera dilakukan kerja sama dengan berpedoman pada Peraturan Kepala BP Batam Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Aset.
5. Dalam pengajuan sertifikasi ZI WBK-WBBM ke Kementerian PANRB terlebih dahulu dilakukan pembangunan ZI dan pemenuhan persyaratan administrasi secara lengkap.
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di Lingkungan BP Batam dengan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan sesuai kebutuhan dan rekrutmen pegawai baru sesuai dengan formasi jabatan dan kompetensi yang diperlukan.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1352 -

**LAMPIRAN  
KOORDINASI BIDANG PMK**

<b>NO</b>	<b>KEMENTERIAN/LEMBAGA</b>
1	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
2	Kementerian Kesehatan
3	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
4	Kementerian Sosial
5	Kementerian Agama
6	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7	Kementerian Pemuda dan Olah Raga
8	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
9	Badan SAR Nasional
10	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
11	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
12	Badan Pengawas Obat dan Makanan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1353 -



**Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan**

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2022, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah menetapkan 4 sasaran strategis dengan 4 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2022, dari 4 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, 3 indikator kinerja ( 75,00% ) memiliki capaian melebihi target dan 1 indikator kinerja ( 25,00% ) sesuai target,

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2022.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan	Indeks PMK	Meningkat (2021: 63,45)	63,456	100,17%
2	Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan	Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	18 Isu Strategis	22 Isu Strategis	122%
3	Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	5,28	5,3	100,38%
4	Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan	Indeks Pengendalian Program Bidang PMK	3	3	100%

*\*) Perhitungan Indeks PMK akan dilakukan pada Bulan Februari 2022*

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko PMK	220.380.969	217.771.149.233	98,82%
2	Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan			

Hambatan yang dialami Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam mencapai target kinerja adalah:



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1354 -

1. Belum seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah memiliki pemahaman tentang GNRM yang berdampak lambat terbentuknya Gugus Tugas GNRM sehingga pelaksanaannya belum dapat berjalan secara maksimal;
2. Kementerian/Lembaga dan Pemerintah daerah masih menganggap bahwa Revolusi Mental adalah sebuah proyek, sehingga beranggapan harus menyediakan anggaran khusus. Akibatnya, banyak instansi yang tidak menjalankan program GNRM karena tidak adanya ketersediaan anggaran;
3. Bentuk kegiatan GNRM di Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah merupakan kegiatan rutin yang belum terinternalisasi Nilai Strategis Instrumental Revolusi Mental sehingga output dan outcome yang dicapai sangat minim, untuk itu diperlukan kesadaran kolektif di daerah yang meliputi unsur-unsur pentahelix (Penyelenggara Negara, dunia pendidikan, organisasi masyarakat, dunia usaha dan media untuk melaksanakan program GNRM sebagai gerakan nasional.

Upaya yang telah dilakukan oleh Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam mencapai target kinerja adalah upaya kolaboratif untuk menyusun Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA). STRANASPPA terdiri dari lima strategi, yaitu:

1. Optimalisasi Kapasitas Anak;
2. Lingkungan yang Mendukung Pencegahan Perkawinan Anak;
3. Aksesibilitas dan Perluasan Layanan;
4. Penguatan Regulasi dan kelembagaan.

Rencana ke depan yang akan dilaksanakan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk meningkatkan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut.

1. Melakukan fungsi Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian terhadap program-program prioritas bidang pembangunan manusia dan kebudayaan secara optimal;
2. Melaksanakan evaluasi/reviu terhadap Renstra Kemenko PMK 2020-2024 secara berkala;
3. Penetapan Perjanjian Kinerja Kemenko PMK tahun 2022 dan seterusnya akan dilaksanakan dengan lebih memperhatikan keberhasilan kementerian secara berjenjang (cascading).



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1355 -



**Kementerian Kesehatan**

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2022, Kementerian Kesehatan telah menetapkan 17 sasaran strategis dengan 35 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2022, dari 35 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, 30 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (85,71%) yang melebihi target, 2 indikator kinerja sasaran strategis (5,71%) yang mencapai target, serta terdapat 3 indikator kinerja sasaran strategis (8,57%) yang tidak mencapai target, yaitu : 1) Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan SPM, 2) Insiden Tuberkulosis (per 100.000 penduduk), 3) Persentase FKTP terakreditasi.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2022.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Menguatnya promotif preventif di FKTP melalui UKBM dan pendekatan keluarga	Persentase kabupaten/kota melaksanakan SPM	100%	70,04%	70,04%
		AKI (per 100.000 kelahiran hidup)	205	189	108,5%
		AKB (per 1.000 kelahiran hidup)	18,6	16,85	110,4%
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) (%)	18,4%	21,6%	82,60%
		Wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita	7,5%	7,7%	97,33%
		Insidensi HIV (per 100.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	0,19	0,09%	153%
		Insidensi tuberkulosis penduduk)	231	354	46,75%
		Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	365	372	102%
		Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi kusta	458	403	88%
		Indeks pengendalian penyakit menular	0,4873	0,5869	120%
		Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun	21,8	4	181%
		Persentase merokok 10- 18 tahun	8,9	9,1	98%
		Jumlah kabupaten/kota sehat	280	282	100,71
2	Terpenuhinya sarana, prasarana, obat, BMHP, dan alat kesehatan yankes primer	Persentase kabupaten/kota, dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar	64	73-	-114,06%
		Persentase kabupaten/kota dengan	88	89,34	101,52%



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1356 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar			
3	Menguatnya tata kelola manajemen pelayanan dan kolaborasi publik-swasta	Persentase FKTP terakreditasi	80	56,43	70,54%
		Persentase klinik pratama dan praktek mandiri dokter yang melakukan pelayanan program prioritas	20	20	100%
4	Terpenuhinya sarana prasarana, alat kesehatan, obat, dan bahan medis habis pakai (BMHP) pelayanan kesehatan rujukan	Persentase fasyankes rujukan milik pemerintah yang memenuhi Sarana Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	90	96	107%
5	Menguatnya tata kelola manajemen dan pelayanan spesialisik	Persentase penurunan jumlah kematian di Rumah Sakit	<2,5	2,045	100%
6	Menguatnya dan terdistribusinya mutu RS, layanan unggulan dan pengembangan layanan lain	Persentase kepuasan pasien di fasyankes rujukan	60 (kum)	93,5	155,8%
		Jumlah Rumah Sakit yang memiliki layanan unggulan internasional	12	12	100%
7	Menguatnya produksi alat kesehatan, bahan baku obat, obat, obat tradisional dan vaksin dalam negeri	Jumlah bahan baku obat dan obat 10 terbesar yang diproduksi dalam negeri	10	10	100%
		Jumlah alat kesehatan 10 terbesar by volume dan value yang diproduksi dalam negeri	5	5	100%
		Jumlah vaksin 10 terbesar diproduksi di dalam negeri	8	8	100%
8	Menguatnya surveilans yang adekuat	Persentase kabupaten/kota yang melakukan respon KIB/wabah (PE, pemeriksaan laboratorium, tata laksana kasus)	70	70,62	100,9%
9	Menguatnya sistem penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan	Persentase provinsi yang sudah memiliki sistem penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan masyarakat sesuai standar	34	34	100%
10	Terpenuhinya pembiayaan kesehatan yang berkeadilan pada kegiatan promotif dan preventif	Persentase cakupan kelompok berisiko yang mendapatkan layanan skrining kesehatan	30	47,1	157
11	Menguatnya pembiayaan kesehatan nasional secara efektif, efisien dan berkeadilan untuk mencapai <i>Universal Health Coverage</i> (UHC)	Proporsi Out Of Pocket (OOP) terhadap total belanja kesehatan	27	25,1	155
12	Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan SDM kesehatan dan berkualitas	Persentase faskes dengan kesehatan sesuai standar	65	64,91	99,86
13	Meningkatnya kompetensi dan sistem pendidikan pelatihan SDM kesehatan	Persentase faskes dengan kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	40	41,22	103,05



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1357 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
14	Meningkatnya sistem pembinaan jabatan fungsional dan karier SDM kesehatan	Persentase faskes dengan SDM kesehatan tersertifikasi	25	26	104%
15	Meningkatnya sistem pelayanan kesehatan dalam ekosistem teknologi kesehatan yang terintegrasi dan transparan dalam mendukung kebijakan kesehatan berbasis bukti	Jumlah fasilitas kesehatan yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia	8000	9422	117,78%
		Jumlah sistem bioteknologi kesehatan terstandar dan terintegrasi yang diimplementasikan	5	6	120%
16	Meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti	Presentasi kebijakan yang berkualitas dan dapat diimplementasikan	60	67,36	112,36%
17	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks capaian tata kelo1a Kemenkes yang baik	80	110,6	138,25%

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	% Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	% Kinerja Anggaran	Efisiensi
1	Menguatnya promotif preventif di FKTP melalui UKBM dan Pendekatan Keluarga	1	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan SPM	70,04	561.772.838.000	412.025.882.681	73,00	-3
		2	AKI (per100.000 kelahiran hidup)	108,50	568.131.569.000	196.208.309.966	35,00	74,00
		3	AKB (per 1.000 kelahiran hidup)	110,40	210.577.389.000	188.777.557.896	90,00	20,80
		4	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) (%)	82,60	791.083.872.000	665.036.464.035	84,00	1,5
		5	Wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita(%)	97,33	623.077.934.000	525.441.865.380	84,00	13,00
		6	Insidensi HIV (per100.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	153,00	384.144.266.000	370.517.269.176	96,50	56,60
		7	Insidensi Tuberculosis (per 100.000 penduduk)	46,75	965.444.308.000	874.871.612.161	90,60	-43,9
		8	Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	102,00	77.887.910.000	71.090.390.460	91,30	10,70
		9	Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi kusta	88,00	15.004.500.000	12.020.801.200	80,20	7,90
		10	Indeks pengendalian penyakit menular	120,00	206.546.776.000	181.051.025.188	87,70	32,20
		11	Prevalensi obesitas pada pendudukusia>18 tahun	181,00	32.778.160.000	22.227.704.599	67,80	113,00
		12	Persentase merokok penduduk usia 10-18tahun	98,00	8.265.914.000	6.217.443.025	75,20	23,00
		13	Jumlahka bupaten/kota sehat	100,71	71.458.164.000	63.788.916.991	89,30	11,00
2	Terpenuhinya sarana, prasarana, obat, BMHP, dan alat kesehatan yankes primer	1	Persentase kabupaten/kota, dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar	114,06	1.634.396.000	732.070.200	45,00	69,06
		2	Persentase kabupaten/kota dengan puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar	101,52	8.832.261.977.000	6.657.007.793.636	75,37	26,15
3	Menguatnya tata kelola manajemen pelayanan dan kolaborasi publik-swasta	1	PersentaseF KTP terakreditasi	70,54	1.121.405.000	1.067.089.036	95,20	25,00
		2	Persentase klinik pratama dan praktek mandiri dokter yang melakukan pelayanan program prioritas	100,00	1.719.742.000	1.562.925.120	90,88	9,12
4	Terpenuhinya sarana prasarana, alat kesehatan, obat, dan bahan medis habis pakai (BMHP) pelayanan kesehatan rujukan	1	Persentase fasyankes rujukan milik pemerintah yang memenuhi Sarana Prasarana dan Alat(SPA) sesuai standar	107,00	2.022.984.850.000	1.942.926.458.577	96,00	11,00
5	Menguatnya tatakelola manajemen dan pelayanan spesialistik	1	Persentase penurunan jumlah kematian di Rumah Sakit	100,00	1.445.074.000	732.199.344	50,67	49,33
6	Menguatnya dan terdistribusinya mutu RS, layanan unggulan dan pengembangan layanan lain	1	Persentase kepuasan pasien di fasyankes rujukan	155,80	3.529.646.000	3.342.411.544	100,00	0,00
		2	Jumlah Rumah Sakit yang memiliki layanan unggulan internasional	100,00	6.063.369.000	6.063.369.000	94,07	5,93





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1358 -

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	% Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	% Kinerja Anggaran	Efisiensi
7	Menguatnya produksi alat kesehatan, bahan baku obat, obat, obat tradisional dan vaksin dalam negeri	1	Jumlah bahan baku obat dan obat 10 terbesar yang diproduksi dalam negeri kabupaten/kota	100,00	38.017.425.000	35.761.928.907	94,07	5,93
		2	Jumlah alat kesehatan 10 terbesar by volume dan value yang diproduksi dalam negeri	100,00	75.574.987.000	68.750.200.731	90,97	9,03
		3	Jumlah vaksin 10 terbesar yang diproduksi di dalam negeri	100,00	9.279.365.000	8.125.957.697	8,57	12,43
8	Menguatnya surveilans yang adekuat	1	Persentase kabupaten/kota yang melakukan respon KLB/wabah (PE, pemeriksaan laboratorium, tata laksana kasus)	100,90	307.255.944.000	170.947.105.425	55,60	45,00
9	Menguatnya sistem penanganan bencana dan kedaruratan	1	Persentase provinsi yang sudah memiliki sistem penanganan bencana dan Kedaruratan	100,00	123.883.432.000	50.813.783.895	59,00	61,00
10	Terpenuhinya pembiayaan kesehatan yang berkeadilan pada kegiatan promotif dan preventif	1	Persentase cakupan kelompok berisiko yang mendapatkan layanan skrining kesehatan	157,00	154.522.000	153.805.240	99,50	57,50
11	Menguatnya pembiayaan kesehatan nasional secara efektif, efisien dan berkeadilan untuk mencapai universal health coverage (UHC)	1	Proporsi Out Of Pocket(OOP)terhadap total belanja kesehatan	155,00	1.214.170.000	816.900.800	67,28	87,72
12	Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan SDM kesehatan yang berkualitas	1	Persentase faskes dengan SDM kesehatan sesuai standar	99,86	163.940.527.000	109.098.165.038	66,55	33,31
13	Meningkatnya kompetensi dan sistem pendidikan pelatihan SDM kesehatan	1	Persentase faskes dengan SDM kesehatan yang ditingkatkan sesuai kompetensinya	103,05	2.788.863.625.000	2.563.497.366.584	91,92	11,13
14	Meningkatnya sistem pembinaan jabatan fungsional dan karier SDM kesehatan	1	Persentase faskes dengan SDM kesehatan tersertifikasi	104,00	310.622.132.000	245.355.909.637	78,99	25,01
15	Meningkatnya sistem pelayanan kesehatan dalam ekosistem teknologi kesehatan yang terintegrasi dan transparan dalam mendukung kebijakan kesehatan berbasis bukti	1	Jumlah fasilitas kesehatan yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia	117,78	323.972.421.000	261.142.287.362	80,60	37,17
		2	Jumlah sistem bioteknologi kesehatan terstandar dan terintegrasi yang diimplementasikan	120,00	255.887.078.000	217.917.011.596	85,20	34,80
16	Meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti	1	Presentasi kebijakan yang berkualitas dan dapat diimplementasikan	112,36	1.000.000.000	825.096.100	82,51	29,85
17	Meningkatnya tatalaksana pemerintahan yang baik	1	Indeks capaian tata kelola Kemenkes yang baik	138,25	113.972.738.000	98.988.801.320	86,90	52,65
Jumlah				109,01	19.900.572.425.000	16.034.903.879.547	80,54	28,47

Hambatan atau permasalahan dalam pencapaian kinerja Kementerian Kesehatan antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

1. Pelaksanaan kegiatan/program masih belum optimal dikarenakan masih adanya pandemi covid 19 yang membatasi pelayanan publik bidang kesehatan;
2. Distribusi tenaga kesehatan dan sarana prasarana yang belum merata, khususnya daerah yang terpencil, perbatasan dan kepulauan,
3. Koordinasi lintas sektor di daerah belum sepenuhnya terjalin dengan baik dimana pelaksanaan kegiatan dianggap sebagai tanggung jawab sektor Kesehatan semata.
4. Untuk pelaksanaan program imunisasi masih banyak rumor negatif tentang imunisasi (black campaign) yang beredar di masyarakat melalui berbagai media,



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1359 -

5. Masih kurangnya produksi bahan baku obat dalam negeri karena skala ekonomi yang kecil dan risiko bisnis yang tinggi sehingga berpotensi tidak berlanjut pada saat pelaksanaan project dan tahapan operasional.

Upaya yang telah dilakukan kementerian kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja adalah sebagai berikut.

1. Kegiatan sosialisasi/ orientasi/ peningkatan kapasitas tenaga kesehatan tetap dilaksanakan dalam bentuk hybrid. Seperti kelas ibu hamil secara daring, peningkatan kapasitas dokter dan bidan dalam pelayanan kesehatan dan bayi dengan metode blended learning.
2. Pendampingan RS dalam penurunan AKI dan AKB.
3. Tersedianya Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) dan transportasi rujukan melalui
4. mekanisme DAK Non Fisik untuk mendekatkan akses ke fasilitas kesehatan
5. Penyediaan Buku KIA sejumlah sasaran ibu hamil. Buku KIA menjadi sumber informasi, edukasi ibu hamil dan Keluarga salah satunya terkait edukasi yang mendorong ibu hamil dan Keluarga untuk bersalin di fasilitas kesehatan;
6. Peningkatan pemanfaatan sistem informasi dan pelaporan komdat kesmas melalui berbagai orientasi/sosialisasi penggunaan aplikasi kepada pengelola program dan penginput data program;
7. Dilaksanakannya pertemuan evaluasi pelaporan setiap triwulan secara rutin oleh Direktorat Kesehatan Keluarga kepada penanggung jawab pelaporan di daerah;
8. Sumber daya manusia baik kesehatan maupun non kesehatan yang ikut andil dalam pelaksanaan semua program dan kegiatan serta anggaran di kementerian kesehatan;
9. Tersedianya sumber daya lain baik sarana maupun prasarana baik perangkat keras maupun perangkat lunak yang memperlancar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan kementerian kesehatan;
10. Berbagai kebijakan yang menjadi panduan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan kementerian kesehatan.

Rencana ke depan yang akan dilaksanakan Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut.

1. Memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan Kementerian dan Lembaga lainnya termasuk dengan Pemerintah Daerah;
2. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan;
3. Peningkatan intervensi yang bersifat life saving didukung data yang kuat (evidence based policy);
4. Penguatan advokasi, komunikasi sosial dan perubahan perilaku hidup sehat;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1360 -

5. Terkait pengembangan bahan baku obat, vaksin dan alat kesehatan dalam negeri perlu dilakukan penyusunan regulasi untuk memperkuat ketahanan dan mempercepat kemandirian kefarmasian dan alat kesehatan;
6. Penjajakan dengan BRIN, Universitas dan Lembaga Riset untuk pendanaan riset dan pengembangan produk biologi serta prototipe alat kesehatan;
7. Percepatan hilirisasi hasil penelitian alat kesehatan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi hasil riset dan uji klinik alat kesehatan produksi dalam negeri;
8. Memfasilitasi transfer teknologi dalam produksi alat kesehatan oleh industri alat kesehatan dalam negeri;
9. Pemenuhan tenaga kesehatan disertai peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan dengan memberikan fasilitas peningkatan karir, pendapatan finansial yang menarik, pembinaan kompetensi, perlindungan hukum dan perlindungan sosial ketenagakerjaan.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1361 -



**Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi**

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2022, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah menetapkan 5 sasaran strategis dengan 20 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2022, dari 20 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, 11 indikator kinerja (55%) memiliki capaian melebihi target, 2 indikator kinerja (10%) sesuai target, 7 indikator kinerja (35%) tidak mencapai target.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2022.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Pemerataan Layanan Pendidikan Bermutu di Seluruh Jenjang	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun	75,38%	74,34%	98,62%
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Sederajat	99,30%	99,10%	99,80%
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	96,14%	95,92%	99,77%
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/ Sederajat	88,39%	85,49%	96,72%
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi	31,52%	31,16%	98,86%
2	Meningkatnya Kualitas Pembelajaran (Kompetensi dan Karakter) dan Relevansi di Seluruh Jenjang	Nilai Kualitas Lingkungan Belajar PAUD	0,51	0,53	103,92%
		Proporsi Peserta Didik yang Memiliki Nilai di Atas Batas Minimum dalam Asesmen Kompetensi Minimum:	47,50%	59,49%	125,24%
		a. Literasi	28,30%	45,24%	159,86%
		b. Numerasi			
		Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Indeks Karakter, Indeks Iklim Keamanan Sekolah, dan Indeks Inklusivitas dan Kebhinekaan pada Kategori Baik	27,50%	27,52%	100,07%
		Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Profesional	47,84%	50,95%	106,50%
		Persentase Peserta Didik Berprestasi yang Difasilitasi Kelangsungan Karir Belajar dan Karir Profesionalnya	5%	7,60%	152%
		Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang Mendapatkan	42,77%	45,22%	105,73%



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1362 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		Pekerjaan/Berwirausaha dalam Tahun Setelah Kelulusan dengan Gaji/Pendapatan Minimum 1x UMP			
		Persentase Lulusan PT Akademik yang Mendapatkan Pekerjaan dalam Waktu Kurang Dari 1 Tahun dan Mendapatkan Gaji Kompetitif (1.2X UMP)	19,70%	35,89%	182,18%
3	Meningkatnya Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	Indeks Kemahiran Berbahasa Indonesia	69	81,02	117,42%
		Indeks Pembangunan Kebudayaan	59,71	51,90	86,92%
4	Meningkatnya kontribusi Perguruan Tinggi terhadap Riset, Inovasi dan Ilmu Pengetahuan	Jumlah Keluaran Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Berhasil Mendapat Rekognisi Internasional atau Diterapkan oleh Masyarakat	82.500 Karya	102.993 Karya	124,84%
5	Meningkatnya Tata Kelola Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel	Opini Laporan Keuangan Kemendikbud	WTP	WTP (2021)	100%
		Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Kemendikbud	82	85,90	104,76%
		Predikat SAKIP Kemendikbud Ristek	BB	BB (2021)	100%
		Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud	83	78,79 (2021)	94,93%

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

No	Nama Program	Alokasi
1	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Rp. 3.061.582.460.000
2	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	Rp. 10.139.195.732.000
3	Program Pendidikan Tinggi	Rp. 28.646.007.592.000
4	Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	Rp. 705.222.791.000
5	Program Dukungan Manajemen	Rp. 19.003.441.979.000
6	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Rp. 11.439.457.777.000
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 72.994.908.331.000</b>

Hambatan atau permasalahan dalam pencapaian kinerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

1. Adanya blokir anggaran yang menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan program;
2. Adanya pengalihan beberapa program kegiatan kemahasiswaan kepada program flagship Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
3. Terbitnya aturan terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada pertengahan tahun 2022 sehingga mempengaruhi proses pengadaan barang;
4. Belum semua SMK memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1, sehingga pelaksanaan sertifikasi tidak bisa diikuti seluruh siswa SMK;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1363 -

5. Masih ditemukannya SMK berpotensi mendapat program Pusat Keunggulan mendapatkan dana dari DAK, sehingga tidak bisa mendaftar sebagai SMK PK;
6. Kebutuhan tenaga kerja setingkat SMK bervariasi antardaerah sehingga mempengaruhi daya serap lulusan;
7. Belum optimalnya pemahaman mitra kerja dalam melaksanakan PKW, khususnya dalam melaksanakan pendampingan rintisan usaha;
8. Masih terbatasnya ketersediaan lowongan kerja sebagai dampak pandemi Covid-19 sehingga proses penyaluran lulusan PKK ke dunia kerja terhambat;
9. Masih terdapat peserta diklat Upskilling dan Reskilling untuk guru yang mengundurkan diri pada saat pelatihan akan dimulai. Selain itu, instruktur LKP hanya terfokus pada 1 bidang keahlian, karena terbatasnya informasi ketersediaan data rumpun keahlian;
10. Masih ditemukan kendala dalam pelaksanaan tracer study karena perubahan metadata Rapor Pendidikan yang sangat dinamis.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka mencapai target kinerja adalah:

1. melakukan inovasi-inovasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan supaya menarik minat masyarakat;
2. memanfaatkan berbagai media baik TV, Radio, dan media virtual lainnya untuk mensosialisasikan program penguatan karakter sekaligus penyebarluasan konten-konten menarik terkait penguatan karakter;
3. membuat konten-konten menarik serta Iklan Layanan Masyarakat untuk menginternalisasi nilai-nilai penguatan karakter di masyarakat.
4. melaksanakan program peningkatan SDM maupun kualitas data di satuan pendidikan yang akan menghasilkan perencanaan sekolah yang baik dalam menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif.

Rencana ke depan yang akan dilaksanakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk meningkatkan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut.

1. Mengupayakan untuk pembukaan blokir anggaran, serta tetap mengoptimalkan capaian target, meskipun ada blokir anggaran;
2. Melakukan pergeseran anggaran untuk kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan;
3. Mendorong satuan kerja untuk mengidentifikasi alat/bahan yang diperlukan untuk pengadaan, dan memprioritaskan TKDN atau PDN. Jika alat/bahan yang dibutuhkan tidak tersedia di dalam negeri, proses pengajuan ijin penggunaan barang impor dipercepat;
4. Mendorong pemda provinsi untuk memfasilitasi pendirian LSP P1 pada SMK binaannya;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1364 -

5. Melakukan sosialisasi kepada pemda provinsi agar SMK yang diunggulkan menjadi SMK PK tidak diberi alokasi anggaran DAK;
6. Penetapan konsentrasi keahlian potensial berdasarkan rekomendasi dari konsorsium vokasi (terdiri dari asosiasi industri yang bergabung dalam konsorsium);
7. Mengoptimalkan peran lembaga penerima bantuan dalam melakukan pendampingan rintisan usaha sesuai dengan rincian rintisan usaha yang dibuat peserta didik, dan melakukan penyelarasan dan mendorong lembaga penerima PKW untuk berkoordinasi dengan dunia kerja;
8. Mengoptimalkan jadwal pembelajaran PKK sebelum akhir tahun berjalan, dan lembaga penyelenggara diberikan kelonggaran untuk penempatan peserta didik ke dunia kerja dalam kurun waktu satu tahun setelah selesai uji kompetensi;
9. Melakukan pemanggilan peserta maksimal 1 minggu sebelum pelaksanaan kegiatan untuk mengurangi resiko peserta mengundurkan diri, serta menyediakan lebih banyak database untuk LKP agar pelatihan yang dilaksanakan lebih bervariasi;
10. Melakukan koordinasi yang lebih intensif antara pengolah data, Direktorat Mitras DUDI dan tim Walidata di Rapor Pendidikan agar tracer study dapat dilakukan dengan lebih optimal.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1365 -



**Kementerian Sosial**

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2022, Kementerian Sosial telah menetapkan 3 sasaran strategis dengan 6 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2022, dari 6 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, 5 indikator kinerja (83,33%) memiliki capaian melebihi target, dan 1 indikator kinerja (16,67%) tidak mencapai target.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2022.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Sosial, Kualitas, dan Kelangsungan Hidup Fakir Miskin, Kelompok Rentan, dan Orang Tidak Mampu	Persentase (%) Fakir Miskin, Kelompok Rentan dan Orang Tidak Mampu yang Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial, Kualitas, dan Kelangsungan Hidupnya	76	96,37	126,80%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sosial oleh Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dengan Melibatkan Publik	Persentase (%) Ketepatan Sasaran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	98	99,37	101,40%
		Persentase Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang Profesional	84	84,72	100,86%
		Persentase (%) Penyelenggaraan Diklat yang Mampu Meningkatkan Kecakapan Hidup Penerima Manfaat	75	89,02	118,69%
3	Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang Transparan dan Akuntabel dan Meningkatnya Efektivitas Birokrasi	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Sosial	77	75,53*	98,09%
		Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Kementerian Sosial	90	90,14	100,16%

\*) Menggunakan nilai tahun 2021.

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2022 adalah sebagai berikut.





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1366 -

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	468.493.079.000	428.746.038.370	91,52%
2	Belanja Barang	4.207.499.366.000	4.055.732.477.234	96,39%
3	Belanja Modal	165.352.408.000	165.239.956.722	99,93%
4	Belanja Bansos	93.086.716.563.000	91.884.679.114.935	98,71%
	Jumlah	97.928.061.416.000	96.534.397.587.261	98,58%

Hambatan atau permasalahan dalam pencapaian kinerja Kementerian Sosial antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

1. Ketepatan dalam penerimaan bantuan sosial (tepat sasaran, tepat waktu, tepat administrasi, tepat jumlah) serta memastikan bantuan diterima (delivered) KPM.
2. Tekanan ekonomi global yang menyebabkan kenaikan harga minyak goreng dan bahan bakar minyak, untuk melindungi masyarakat miskin, Kementerian Sosial menyalurkan BLT Migor dan BLT BBM kepada 20,65 juta KPM.
3. Masih terdapat warga negara yang belum terpenuhi hak dan kebutuhan dasarnya secara layak. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan dalam meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup atau masih berada dalam kemiskinan dan kerentanan.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka mencapai target kinerja adalah sebagai berikut.

1. Integrasi program sehingga dapat memberikan penanganan yang komprehensif. Bantuan sosial yang diberikan juga dilengkapi dengan program pemberdayaan sehingga dapat meningkatkan perekonomian penerima manfaat untuk bisa lebih mandiri.
2. Peningkatan kualitas dan integritas DTKS sebagai sumber data program perlindungan sosial, dengan penetapan setiap bulan, pemadanan data dengan Dukcapil dan transparansi data yang memungkinkan partisipasi publik.
3. Inovasi pengembangan alat bantu aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, menjadi jawaban dari penanganan masalah sosial sekaligus model pemberdayaan masyarakat rentan.
4. Untuk meningkatkan kesejahteraan disabilitas dan lansia, pada tahun 2022 untuk pertama kalinya diberikan program permakanan bagi 247.147 lanjut usia tunggal dan 39.782 disabilitas tunggal.
5. Dilakukan perluasan pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) anak yatim, piatu dan yatim piatu (YAPI) dari semula YAPI dengan orang tua yang meninggal karena Covid-19 menjadi anak YAPI yang tidak terdampak Covid-19 yang berada dalam pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).
6. Menyelenggarakan pelatihan vokasional dalam bentuk pelatihan pemberdayaan masyarakat melalui kewirausahaan sosial. Melalui pelaksanaan pelatihan diharapkan peserta (penerima manfaat) memiliki kemampuan/keterampilan berusaha.
7. Pengembangan aplikasi SIKUMDAN (Sistem Informasi Hukum dan Perundang-undangan); Penyederhanaan struktur organisasi yang mempunyai 2 tingkat organisasi; Pengembangan pola penanganan permasalahan yang terpadu dan terintegrasi melalui Command Center/ Pusat Kendali.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1367 -

8. Meningkatkan kerja sama dengan dunia usaha, perguruan tinggi serta organisasi non pemerintah untuk mempercepat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Rencana ke depan yang akan dilaksanakan Kementerian Sosial untuk meningkatkan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut.

1. Melakukan reviu target kinerja, terutama terkait dengan target dengan capaian tahun 2022 melebihi 100 persen.
2. Melakukan penajaman pengukuran indikator kinerja.
3. Meningkatkan keterpaduan dan kolaborasi program/kegiatan, baik internal kementerian ataupun lintas kementerian/lembaga.
4. Sosialisasi dan pembinaan untuk mendukung pelaksanaan sertifikasi SDM kesejahteraan sosial dan akreditasi LKS.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi untuk melihat adanya peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1368 -



**Kementerian Agama**

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2022, Kementerian Agama telah menetapkan 13 sasaran strategis dengan 30 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2022, dari 29 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, 17 indikator kinerja (40%) memiliki capaian melebihi target, 1 indikator kinerja (3,33%) sesuai target, 11 indikator kinerja (56,67%) tidak mencapai target.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2022.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama	Indeks Kesalehan Umat Beragama	85,08	84,55	99,38%
2	Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	74,70	73,09	97,84%
3	Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya	Indeks penerimaan umat beragama atas keragaman budaya	70,00	76,20	108,86
4	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama	Indeks Kepuasan Layanan KUA	82,00	83,28	101,56
		Tingkat kepuasan layanan produk halal	70,00	88,10	120,00
		Indeks Kepuasan Layanan Ibadah Haji	85,97	90,45	105,21
5	Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat	Persentase dana sosial keagamaan untuk mendukung layanan pendidikan dan keagamaan	53,00	55,84	105,35
6	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran	Persentase siswa di atas batas kompetensi minimal dalam test Assesmen Kompetensi			102,39
		a. Literasi	58,50	49,00	83,78
		b. Numerasi	25,50	70,00	120,00
7	Meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan	PK RA/Pratama Widya Pasraman/ Taman Seminari/ Nava Dhammasekha	12,00	7,57	63,08%



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1369 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		APK MI/Ula/SDTK/ Adhi Widya Pasraman	14,70	15,13	102,93%
		APK MTs/Wustha/SMPTK/Mad ya Widya Pasraman	25,20	25,93	102,90%
		APK MA/Ulya/SMTK/ SMAK/Utama Widya Pasraman	11,90	13,07	109,83%
		APM MI/Ula/SDTK/ Adhi Widya Pasraman	12,33	13,78	111,76%
		APM MTs/Wustha/ SMPTK/Adhi Widya Pasraman	21,78	19,01	87,28%
		APM MA/Ulya/SMTK/SMAK/Uta ma Widya Pasraman	19,80	8,92	45,05%
		APK PTK/ Ma'had Aly	6,87	5,48	84,70%
8	Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik	Rasio guru terhadap siswa yang memenuhi SNP	20:1	36:1	55,56%
9	Meningkatkan kualitas penjaminan mutu pendidikan	Persentase MI/Ula/SDTK/ Adhi Widya Pasraman yang terakreditasi/B	65,52	78,12	119,23%
		Persentase MTs/Wustha/ SMPTK/Adhi Widya Pasraman yang terakreditasi/B	65,52	71,05	108,44%
		Persentase MA/Ulya/SMTK/ SMAK/Utama Widya Pasraman yang terakreditasi/B	65,52	65,19	99,50%
		Persentase PTK/Ma'had Aly yang terakreditasi A/Unggul	25,06	2,05	8,18%
10	Meningkatnya kualitas mental/karakter siswa	Indeks Karakter Siswa	72,13	80,88	112,13%
11	Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas	Persentase PTK yang memiliki prodi/kelas Internasional	4,38	13,00	120,00%
		Persentase lulusan PTK yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	42,40	11,66	27,50%
		Persentase publikasi ilmiah di jurnal Internasional	16,00	26,40	120,00%
		Persentase publikasi ilmiah di jurnal Internasional yang disitasi	8,03	58,16	120%
12	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel	Predikat opini laporan keuangan	WTP	WTP	100%
		Predikat opini laporan keuangan	79,00	75,84	96,00%
13	Meningkatnya kualitas penelitian	Persentase penelitian yang	85,00	100	117,65%



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1370 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	pengembangan dan kebijakan	dijadikan dasar kebijakan ( <i>policy paper</i> )			

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

No	Sumber Dana	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Badan Layanan Umum (BLU)	2.813.452.436.000	2.325.110.033.854	82,64
2	Hibah Dalam Negeri (HDN)	3.662.253.000	3.662.253.000	100,00
3	Hibah Langsung Dalam Negeri (HLD)	946.041.334.000	908.312.380.091	96,01
4	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	1.777.480.197.000	1.639.336.135.713	92,23
5	Pinjaman Luar Negeri (PLN)	1.032.616.466.000	772.663.932.831	74,83
6	Rupiah Murni (RM)	60.103.191.182.000	58.986.478.364.190	98,14
7	Rupiah Murni Pendamping (RMP)	18.440.000.000	13.836.245.126	75,03
8	Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	3.046.878.645.000	2.982.720.904.768	97,89
	Jumlah	68.921.312.321.000	68.583.267.520.101	99,51

Hambatan atau permasalahan dalam pencapaian kinerja Kementerian Agama antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

1. Pandemi covid-19 yang sampai saat ini belum akan berakhir. Sehingga beberapa kebijakan Pemerintah diterbitkan dalam rangka penanganan penyebaran covid-19 dan upaya pemulihan akibat covid-19 seperti refocusing dan realokasi anggaran belanja kementerian.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Agama dalam mencapai target kinerja adalah sebagai berikut.

1. Melakukan revisi untuk mengubah mekanisme pelaksanaan kegiatan yang mengalami pembatasan.
2. Realokasi dari identifikasi kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dan atau karena perubahan kebijakan Rencana ke depan yang akan dilaksanakan Kementerian Agama untuk meningkatkan pencapaian kinerja

adalah sebagai berikut.

1. Menetapkan pedoman umum/Juknis/POK awal Tahun Anggaran
2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan dan hindari penumpukan akhir tahun
3. Mengutamakan Pencapaian Output dan Outcome kegiatan
4. Prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan
5. Membatasi belanja operasional yang urgensinya rendah seperti rapat dalam kantor, perjadin dan konsinyering
6. Optimalikan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan
7. Alokasi Anggaran fokus pada pemenuhan prioritas Nasional (PN/PP/KP).



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1371 -



**Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2022, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) telah menetapkan 2 sasaran strategis dengan 11 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2022, dari 11 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, 3 indikator kinerja (27,27%) memiliki capaian melebihi target, 5 indikator kinerja (45,45%) sesuai target, dan 3 indikator kinerja (27,27%) tidak mencapai target capaian kerjanya.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2022.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Hak Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak untuk Mewujudkan Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,211-91,22	91,27	100,05%
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	74,57-76,63	76,26	100%
		TPAK Perempuan	53,76	53,34	99,22%
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	69,87	61,38	87,85%
		Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan (KtP)	8,7	8,7 (2021)	100%
		Prevalensi Kekerasan terhadap Anak (KtA)	Lk=34 Pr=41,05	Lk=34 Pr=41,05	100%
		% Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	86	97	112,79%
		% Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	72	80,77 (672/832)	112,18%
		% Daerah dengan Peringkat Ramah Perempuan dan Layak Anak (RPLA)	26,47	11,76	44,43%
2.	Terwujudnya Kemen PPPA yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel	Indeks RB	BB	BB	100%
		Opini BPK	WTP	WTP	100%

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

No	Sasaran Strategis	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Hak Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak untuk Mewujudkan Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak	84.534.664	83.876.163.339	99,22
2	Terwujudnya Kemen PPPA yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel	159.876.578	158.552.159.680	99,17
Jumlah		244.411.242	242.248.323.019	99,19



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1372 -

Hambatan atau permasalahan dalam pencapaian kinerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

1. SOP Layanan Tingkat Pusat baru ada setelah layanan sudah berjalan, sehingga pemberian layanan belum terstandarisasi secara maksimal;
2. Keterbatasan tenaga layanan untuk melakukan penanganan dan pendampingan anak korban sesuai hasil asesmen;
3. Keterbatasan kompetensi tenaga layanan SAPA 129 di Pusat;
4. Belum optimal jejaring dengan Mitra Layanan/Sektor sehingga pelaksanaan penanganan kasus bagi AMPK belum terintegrasi dengan baik;
5. Keterbatasan Sarana Prasarana pendukung (Peningkatan Sistem SAPA 129, termasuk Integrasi SAPA 129 dengan Simfoni PPA);
6. Belum tersedia program berkelanjutan bagi korban dan keluarganya sebagai upaya pencegahan sekunder dan tersier di tingkat Hulu.
7. Tahun 2021 adalah puncak pandemi Covid-19. Pandemi menyebabkan menurunnya aktivitas anak yang mengunjungi perpustakaan/ memanfaatkan taman bacaan masyarakat, tahun 2021 hanya 10,13% mengalami penurunan yang signifikan jika dibandingkan pada tahun 2020 yaitu 42,87%. Pada cluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, semua indikatornya mengalami penurunan capaian jika dibandingkan tahun 2020. Capaian pada cluster ini pada tahun 2021 adalah 30,99% atau menurun jika dibandingkan tahun 2020 yaitu 54,27%;
8. Dengan adanya pandemi Covid-19 sangat berdampak tidak hanya pada sektor pendidikan, tetapi juga berdampak pada pembangunan sektor ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia, apalagi terhadap perempuan dan anak yang masuk dalam kelompok rentan.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dalam mencapai target kinerja adalah sebagai berikut.

1. Koordinasi dalam rangka penanganan Kasus bagi AMPK
2. Penyediaan Layanan Komprehensif bagi AMPK Tahun 2022
3. Pemberian bantuan khusus bagi AMPK sebagai berikut
4. Melakukan survey kepuasan layanan
5. Membuat Grand Design dalam rangka Integrasi Layanan Pengaduan KtPA Tingkat Pusat dan Provinsi melalui SAPA 129
6. Menyusun Draf Pedoman Integrasi Layanan Pengaduan KtPA Tingkat Pusat dan Provinsi melalui SAPA 129



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1373 -

7. Pelaksanaan Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), yang bertujuan untuk membawa pembangunan PPPA, khususnya 5 AP ke desa/kelurahan sebagai sebuah pendekatan baru yang dikembangkan Kemen PPPA dengan menggandeng pihak terkait, khususnya KemenDesa-PDTT , KemenDagri, dan BKKBN. Inisiasi pengembangan Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (D/KRPPA), yang telah dimulai sejak tahun 2021 di 10 desa, 10 kabupaten, 5 provinsi. Tahun 2022 DPPPA sudah terbentuk di 148 Desa di 71 Kabupaten di 33 Provinsi;
8. Tersusunnya berbagai kebijakan yang berkontribusi dalam pencapaian nilai IPM, IPG, IDG dan IPA, sebagaimana telah diuraikan pada Indikator IPG, IDG dan IPA;
9. Penguatan koordinasi, sinergitas program/kegiatan antara pemerintah ( pusat dan daerah) dan stakeholders lainnya dalam rangka pencapaian nilai IPM, IPG, IDG dan IPA;
10. Peningkatan komitmen Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kab/Kota dalam mewujudkan kesetaraan gender. Hasil evaluasi tahun 2020, sebanyak 13 K/L, 29 Provinsi dan 266 Kab/Kota mendapatkan apresiasi atau penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE), meningkat 5 K/L, 7 Provinsi, dan 107 Kab/Kota dari tahun 2018 yaitu 8 K/L, 22 Provinsi dan 159 Kab/Kota. Pada tahun 2022 tidak dilakukan penilaian APE, namun telah dilaksanakan penguatan kelembagaan PUG di 34 Provinsi;
11. Peningkatan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan Indonesia Layak Anak (IDOLA) ditandai dengan peningkatan jumlah kab/kota layak anak (KLA) sebanyak 37 Kab/Kota sehingga pada tahun 2022 mencapai 312 Kab/Kota Layak Anak, dari 275 kab/kota.

Rencana ke depan yang akan dilaksanakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) untuk meningkatkan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut.

1. Penambahan Tenaga Layanan;
2. Peningkatan Kapasitas bagi SDM Layanan;
3. Koordinasi Unit Layanan Lintas Sektor;
4. Sarana prasarana pendukung (Integrasi Layanan Pengaduan KtPA Tingkat Pusat dan Provinsi melalui SAPA 129, dan Integrasi SAPA 129 dengan sistem Simfoni PPA);
5. Mendorong tersedianya program pemberdayaan bagi korban dan keluarga untuk mendukung reintegrasi sosial korban.
6. Pengintegrasian program 5 AP pada D/KRPPA akan dilaksanakan pada tahun 2023 di 132 desa, di 66 kabupaten/kota, di 33 provinsi;
7. Mengoptimalkan koordinasi, sinergitas program/kegiatan antara pemerintah ( pusat dan daerah) dan stakeholders lainnya dalam rangka pencapaian nilai IPM, IPG, IDG dan IPA.





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1374 -



**Kementerian Pemuda dan Olahraga**

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2022, Kementerian Pemuda dan Olahraga telah menetapkan 4 sasaran strategis dengan 12 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2021, dari 12 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, 3 indikator kinerja (25%) memiliki capaian melebihi target, 2 indikator kinerja (16,67%) sesuai target, 5 indikator kinerja (41,67%) tidak mencapai target, dan 2 indikator kinerja (16,67%) belum dihitung capaian kerjanya

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2022.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas pemuda yang berdaya saing, berbudaya dan berideologi Pancasila	Indeks Pembangunan Pemuda	55,61	55,33	99,49%
2	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan kualitas koordinasi lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan	Tingkat kapasitas kelembagaan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan	75	86,37%	115,16%
		Tingkat kualitas pelaksanaan koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan	75	82	109,3%
3	Meningkatnya pemassalan olahraga dan aktivitas fisik masyarakat serta peningkatan prestasi olahraga tingkat Asia dan Dunia	Persentase partisipasi penduduk 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga	36,39	30,39	83,5%
		Tingkat kebugaran jasmani nasional	27,35	26,58	97,1%
		Peringkat pada Asian Games	12	-	-
		Peringkat pada Asian Paragames	8	-	-
		Peringkat pada Sea Games	4	3	125%
		Peringkat pada Asean Para Games	1	1	100%
4	Meningkatnya tata kelola kelembagaan yang bersih, akuntabel, kapabel dan pelayanan publik yang prima	Indeks Reformasi Birokrasi	76,1	69,77	91,68%
		Indeks Pelayanan Publik Kementerian Pemuda dan Olahraga	4,01	3,85	96%



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1375 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		Opini BPK	WTP	WTP	100,00%

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

No	Eselon I	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Sekretariat	299.861.824.000	293.901.115.944	98,01%
2	Deputi I	59.831.616.000	59.480.229.819	99,41%
3	Deputi II	113.454.482.000	108.132.507.696	95,31%
4	Deputi III	619.772.436.000	610.897.047.567	98,57%
5	Deputi IV	1.905.676.896.000	1.829.693.332.049	96,01%
6	UPT	17.858.099.000	17.740.828.676	99,34%
7	BLU LPDUK	26.743.633.000	25.565.715.194	95,60%
8	Dekon 34 Provinsi	80.000.000.000	76.931.079.754	96,16%
	Jumlah	3.123.198.986.000	3.022.341.856.699	96,77%

Hambatan atau permasalahan dalam pencapaian kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

1. pandemi Covid-19 yang menuntut adanya metode pelaksanaan kegiatan yang lebih kreatif dan mengikuti standar protokol Kesehatan.
2. Pada bidang kepemudaan, isu koordinasi lintas sektor dengan para stakeholder kepemudaan serta internalisasi terhadap ukuran pembangunan dirasa masih perlu di optimalkan.
3. bidang keolahragaan lahirnya Desain Besar Olahraga Nasional menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pencapaian prestasi olahraga Nasional.

Rencana ke depan yang akan dilaksanakan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk meningkatkan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan koordinasi kemitraan lintas sektor kepemudaan dan keolahragaan.
2. Meningkatkan keselarasan perencanaan antara dokumen perencanaan, pelaksanaan kinerja hingga pelaporan
3. Meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan negara
4. Membakukan formula pengukuran seluruh indikator yang ada agar dapat diuji relevansi antara angka indikator yang dihasilkan dengan sasaran kinerja yang diwujudkan
5. Mempercepat terlaksananya Merit Sistem sebagai penerapan dari Permenpan RB No.40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam manajemen ASN seperti pola karir dan manajemen talenta.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1376 -



**Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional**

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2022, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah menetapkan 7 sasaran strategis dengan 9 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2022, dari 9 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, 3 indikator kinerja (33,33%) memiliki capaian melebihi target, dan 6 indikator kinerja (66,67%) tidak mencapai target capaian kerjanya.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2022.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Menurunnya angka kelahiran total	Angka Kelahiran ( <i>Total Fertility Rate/TFR</i> ) per WUS usia 15-49 tahun	2,21	2,14	103,3%
2.	Meningkatnya angka prevalensi kontrasepsi modern	Angka prevalensi kontrasepsi modern ( <i>Modern Contraceptive Prevalance Rate/mCPR</i> )	62,54	59,4	94,98%
3.	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi ( <i>Unmeet Need</i> )	8,00	16,8	47,62%
4.	Menurunnya angka kelahiran remaja	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun ( <i>Age Specific Fertility rate/ASFR 15-19</i> )	21	22,8	92,1%
5.	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga ( <i>iBangga</i> )	57,00	56,70	98,4%
6.	Meningkatkan Median Usia Kawin Pertama Perempuan	Median Usia Kawin Pertama Perempuan ( <i>MUKP</i> )	22,0	21	95,5%
7.	Terwujudnya SDM Aparatur dan Tenaga Program Bangga Kencana, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional yang Berkualitas	Persentase SDM Aparatur dan Tenaga Program yang kompeten	65	72	111%
		Persentase Kerjasama Internasional Bangga Kencana yang diimplementasikan	80	100	125%
		Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dalam Penentuan Kebijakan Program Bangga Kencana	81	80,3	99,1%

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pengelolaan Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana	1.551.814.964.000	1.470.545.927.646	94,76
2.	Pelaksanaan Dukungan Manajemen	2.304.794.728.000	2.230.891.771.758	96,79
Jumlah		3.856.609.692.000	3.701.437.699.404	95,98

Hambatan atau permasalahan dalam pencapaian kinerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1377 -

1. Adanya kecenderungan masyarakat untuk menggunakan alat kontrasepsi jangka pendek dan tradisional
2. Meningkatnya angka putus pakai pemakaian kontrasepsi
3. Kebutuhan ber-KB pasangan usia subur di Indonesia yang belum terlayani masih dikategorikan cukup tinggi. Masalah Unmet Need antar provinsi masih bervariasi sehingga berimplikasi terhadap disparitas TFR dan prevalensi pemakaian kontrasepsi antar provinsi. Unmet Need berdampak pada peningkatan kehamilan yang tidak diinginkan (KTD).

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam mencapai target kinerja adalah sebagai berikut.

1. Dalam hal Peningkatan kinerja yaitu dengan cara mengoptimalkan kemitraan BKKBN di forum-forum internasional/negara sahabat/badan hukum asing/sumber pendanaan asing lainnya sebagai instrumen perwujudan Indonesia sebagai bagian dari komunitas global. Serta telah mengaktifkan kembali pelatihan internasional melalui virtual meeting.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan melalui komunikasi aktif dengan mitra kerja internal maupun eksternal dalam merencanakan event dan forum internasional.

Rencana ke depan yang akan dilaksanakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk meningkatkan pencapaian kinerja sebagai berikut.

1. Mengoptimalkan jejaring kemitraan dengan Kementerian/Lembaga/Universitas yang menaungi riset penelitian dan pengembangan untuk mendukung pencapaian program Bangga Kencana.
2. Peningkatan akses pelayanan publik kepada masyarakat umum melalui elektronik jurnal keluarga berencana dan sistem pelayanan informasi terpadu (<https://cis.bkkbn.go.id/latbang>).



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1378 -



**Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan**

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2022, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah menetapkan 3 sasaran strategis dengan 6 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2022, dari 6 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, 2 indikator kinerja (33,33%) memiliki capaian melebihi target, 0 indikator kinerja (0%) sesuai target, dan 4 indikator kinerja (66,67%) tidak mencapai target capaian kerjanya.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2022.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan minimum sumber daya pencarian dan pertolongan	57,53%	36,72%	63,83%
		Persentase tingkat kesiapan sarana prasarana serta sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan	93,22%	92,64%	99,38%
		Persentase SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi yang bersertifikat	100%	97,21%	97,21%
2.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Pencarian dan Pertolongan	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,67	88,76	104,83%
3.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan	Waktu Tanggap Pencarian dan Pertolongan	26 menit	23,53 Menit	109,54%
		Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan	100%	99,33%	99,35%

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dukungan Manajemen	858.157.412.000	805.934.148.752	98,96
2	Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana	898.068.910.000	872.178.624.512	99,85
Jumlah		1.756.226.322.000	1.802.953.100.175	99,41

Hambatan atau permasalahan dalam pencapaian kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

1. Belum adanya Komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif baik pemerintah maupun masyarakat.
2. Belum terpenuhinya jumlah sarana sesuai dengan standar.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1379 -

3. Adanya beberapa sarana yang rusak.
4. Kurangnya pelatihan dan Pendidikan para SDM dalam Pencarian dan Pertolongan.
5. Beberapa target kinerja kurang maksimal , dikarenakan anggaran yang mengalami *Refocusing* di masa pandemi Covid-19 saat ini.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam mencapai target kinerja adalah sebagai berikut.

1. Melaksanakan program pemasyarakatan SAR,
2. Pelatihan kepada masyarakat dengan harapan masyarakat lebih memahami, peduli dan sigap untuk melakukan upaya preventif terutama di daerah rawan terjadinya bencana,
3. Optimalisasi layanan call center 115,
4. Pelaksanaan program reformasi birokrasi, penyederhanaan organisasi, digitalisasi serta adaptasi terhadap teori/praktik terbaik dan terkini.
5. Peningkatan pengelolaan pengoperasian helikopter, Basarnas telah merubah kode registrasi dan call sign dari HR menjadi PK-SAR yang akan mempermudah pengoperasian dalam memberikan bantuan antar negara, dan tidak perlu membuat security clearance.
6. Latihan SAR dengan negara-negara tetangga yang akan sangat membantu dalam peningkatan kompetensi SDM dan khususnya apabila terjadi kecelakaan di wilayah perbatasan.

Rencana ke depan yang akan dilaksanakan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk meningkatkan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan SDM baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
2. Melaksanakan Latihan Pencarian dan Pertolongan.
3. Koordinasi dengan Potensi Pencarian dan Pertolongan.
4. Memberikan pelatihan-pelatihan bagi Tenaga Pencarian dan Pertolongan, dan Potensi Pencarian dan Pertolongan.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1380 -



**Perpustakaan Nasional Republik Indonesia**

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2022, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) telah menetapkan 4 sasaran strategis dengan 14 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2022, dari 14 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, 10 indikator kinerja (71,43%) memiliki capaian melebihi target, 1 indikator kinerja (7,14%) sesuai target, dan 3 indikator kinerja (21,43%) tidak mencapai target capaian kerjanya.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2022.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	63,30	63,58	100,44%
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	13,0	13,55	104,23%
2.	Terwujudnya Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan dan Berbasis Inklusi Sosial untuk Memperkuat Budaya Literasi	Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk	1:14	1:10	140,00%
		Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dengan Penduduk	1:18.000	1:17.978	100,12%
		Persentase Peningkatan Perpustakaan sesuai Standar	21,42	47,53	221,89%
		Tingkat Kemanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat	1,50	2,08	138,67%
3.	Terwujudnya Layanan Prima, Pelestarian Pengembangan dan Pemanfaatan Bahan Perpustakaan dan Naskah Nusantara	Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	80,00	89,16	111,45%
		Persentase Peningkatan Kunjungan Perpustakaan di PERPUSNAS	1,5	50,94	3396%
		Persentase Peningkatan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam menjadi Koleksi Nasional;	5	9,82	196,40%
		Persentase Peningkatan Pelestarian Bahan Pustaka dan Naskah Kuno	3,8	3,61	95%
4	Terwujudnya Tata Kelola dan Manajemen Perpustakaan Nasional yang Baik dan Handal	Indeks Reformasi Birokrasi PERPUSNAS	85	76,92 (2021)	90,49%
		Indeks SPBE	3,34	3,51	105,09%
		Opini BPK atas Laporan Keuangan PERPUSNAS	WTP	WTP (2021)	100%
		Indeks Persepsi Anti Korupsi	3,9	3,16	81,03

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2022 adalah sebagai berikut.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1381 -

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Perpustakaan dan Literasi	430.894.811.000	423.166.976.907	98,21%
2.	Dukungan Manajemen	229.409.689.000	225.558.783.950	98,32%
Jumlah		660.304.500.000	650.032.541.210	98,44%

Hambatan atau permasalahan dalam pencapaian kinerja Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

1. Masih adanya capaian kinerja yang belum seratus persen karena pemantauan terkait pencapaian kinerja tersebut belum maksimal.
2. Dalam hal penyerapan anggaran sudah sangat baik, hanya saja masih ada beberapa penggunaan anggaran kurang dimaksimalkan pada beberapa kegiatan dan program.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) dalam mencapai target kinerja adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan lebih lagi fungsi pemantauan terhadap capaian-capaian kinerja yang kemungkinan bisa kurang maksimal.
2. Melakukan peningkatan dan pelatihan kompetensi kepada SDM penanganan capaian kinerja agar capaian kinerja bisa sesuai target.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran sesuai pos-pos kinerja untuk lebih memaksimalkan lagi realisasi anggaran yang ada dan sesuai kinerja.

Rencana ke depan yang akan dilaksanakan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) untuk meningkatkan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut.

1. Program bantuan untuk meningkatkan rasio ketercukupan koleksi, peningkatan kualitas infrastruktur dan ketersediaan fasilitas. Program tersebut juga untuk meningkatkan pemerataan layanan perpustakaan.
2. Inovasi layanan perpustakaan digital untuk meningkatkan pemanfaatan perpustakaan
3. Program relaksasi akreditasi dan pembinaan secara daring untuk meningkatkan perpustakaan sesuai standar
4. Percepatan sertifikasi pustakawan untuk meningkatkan jumlah tenaga perpustakaan
5. Kolaborasi, kerjasama, dan replikasi program sosialisasi perpustakaan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat pada kegiatan sosialisasi.
6. Program promosi perpustakaan, peningkatan kualitas layanan perpustakaan, registrasi online, dan berbagai program yang menarik dan mempermudah masyarakat untuk antusiasme mendaftarkan diri menjadi anggota perpustakaan.





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1382 -



**BNPB**

### Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2022, BNPB telah menetapkan 4 sasaran strategis dengan 4 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2022, dari 4 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, 2 indikator kinerja (50,00%) tercapai, 1 indikator kinerja (25,00%) tidak mencapai target dan 1 indikator kinerja (25,00%) belum dihitung capaian kerjanya.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2022.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana	Indeks Risiko Bencana	135,38	135,56	99,87%
2	Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana	Penurunan Rata-rata angka kematian akibat bencana pada saat keadaan darurat per 100.000 penduduk wilayah terdampak (% penurunan rata-rata angka kematian)	2.5 %	78,13%	3.125 %
3	Terpuhikannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana	Indeks Pemulihan Pascabencana (% kenaikan indeks)	6	6,5	108,33%
4	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan	Indeks Reformasi Birokrasi	83	N/A*	N/A*

\*belum diperoleh hasilnya dari KEMENPANRB

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Ketahanan Bencana	5.194.077.796.000	4.799.884.392.734	92,41%
2	Program Dukungan Manajemen	275.256.288.000	245.796.089.709	89,30%
	Jumlah	5.469.334.084.000	5.045.680.482.443	92,25%

Hambatan atau kendala dalam pencapaian kinerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1383 -

1. Masih adanya kondisi pandemi covid-19, sehingga selain penanganan bencana alam, BNPB juga melaksanakan tugas sebagai Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 dan Satgas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang mewabah pada hewan ternak di 20 provinsi.
2. Kendala upaya peningkatan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dalam menurunkan risiko bencana yakni pemotongan anggaran (refocusing) baik di tingkat pusat dan daerah, sehingga upaya meningkatkan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana relatif terhambat.
3. Belum meratanya pemahaman dan penyelenggaraan upaya penanggulangan bencana dan meningkatkan kemampuan atau kapasitas penanggulangan bencana di Daerah.
4. Beberapa kegiatan yang bersumber dari pembiayaan PLN (IDRIP) tidak tercapai dan tidak terserap sepenuhnya.
5. Karakteristik Indonesia yang memiliki risiko bencana tinggi ditambah dengan adanya pengaruh perubahan iklim dapat menimbulkan dampak bencana berupa kehilangan, kerugian dan kerusakan yang lebih besar di masa mendatang apabila tidak diantisipasi dan dikelola dengan baik.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam mencapai target kinerja adalah sebagai berikut.

1. Selama tahun 2022 Satgas Penanganan Covid-19 memberikan sosialisasi, edukasi dan komunikasi kepada masyarakat dalam beradaptasi kebiasaan baru berupa penerapan pola hidup bersih dan sehat serta mendukung pelaksanaan vaksinasi. Dalam penanganan PMK, BNPB memberikan dukungan pemulihan dan pengendalian di daerah yang terkena wabah.
2. Optimalisasi peran supervisi, advokasi, pendampingan dan bimbingan teknis secara online, karena situasi Pandemi Covid- 19 membatasi pergerakan (limited movement). Mendorong dengan bersurat kepada Kepala Daerah/Sekda sebagai Kepala BPBD (ex-officio).
3. Optimalisasi koordinasi antar lintas unit kerja baik maupun lintas K/L, sebagai upaya menyamakan kebijakan dan strategi dalam mendorong upaya meningkatkan ketahanan/resiliensi di daerah dalam konteks upaya pengurangan risiko bencana.
4. Penyusunan Kebijakan Teknis dan NSPK Bidang Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana yakni Analisis Risiko Bencana (ARB); Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) ; Penyusunan RPB Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Wakatobi dan Raja Ampat; Penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Keamanan Masyarakat – Terminologi (adopsi ISO 22300:2021) dan RSNI Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang.
5. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) tahun 2022 dengan tema “Meningkatkan Kolaborasi dan Integrasi dalam Membangun Ketangguhan Bangsa Menghadapi Bencana”.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1384 -

6. Melaksanakan Inventarisasi, Verifikasi dan Pendampingan Analisis Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
7. BNPB memberikan dukungan pengerahan Sumber Daya Darurat, melaksanakan kaji cepat Infrastruktur Darurat, dan Bimbingan Teknis Personil TRC Daerah.
8. BNPB memberikan pendampingan petugas Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) serta pendampingan pembinaan ekonomi, sosial, dan sumber daya air bagi masyarakat yang terdampak bencana.

Rencana ke depan yang akan dilaksanakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk meningkatkan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut.

1. Memperkuat koordinasi dan sosialisasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah guna memperkuat pemahaman stakeholder terkait dalam penanggulangan bencana.
2. Memperkuat peran aktif Kolaborasi, Inklusif, Terpadu Aman bencana, agar dapat lebih efektif dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan sehingga capaian kinerja yang telah dilakukan memberikan manfaat sesuai target sasaran yang ditetapkan.
3. Perencanaan pemenuhan logistik dan peralatan yang terstandar agar lebih ditingkatkan untuk memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam Penanggulangan Bencana.
4. Menyiapkan strategi untuk upaya percepatan dalam pendataan pada Jitupasna yang meliputi sektor perumahan, sektor infrastruktur, sektor ekonomi, sektor sosial, dan lintas sektor.
5. Koordinasi pelaksanaan dan monitoring evaluasi pelaksanaan rencana aksi RB BNPB serta menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP dan KemenPANRB yang belum diselesaikan
6. Percepatan pelaksanaan kegiatan Prioritas Nasional.
7. Melakukan reviu dan evaluasi kinerja TA 2022, hal tersebut untuk dijadikan bahan pertimbangan dan perbaikan dalam rangka pencapaian kinerja yang lebih baik di tahun 2023,.
8. Strategi percepatan lainnya pada program/kegiatan IDRIP, diantaranya:
  - a. Penyesuaian kegiatan sesuai dengan NOL AWP IDRIP 2022 – 2024.
  - b. Berkoordinasi dengan BMKG untuk sinkronisasi lokasi dan kegiatan IDRIP di Komponen 1 dan Komponen 2.
  - c. Melakukan pemetaan proyeksi pelaksanaan kegiatan di Kuartal 4 TA 2022 dan proyeksi potensi lanjutan kegiatan di TA 2023.
9. Digitalisasi proses administrasi program atau kegiatan untuk efektivitas dan efisiensi (penyederhanaan birokrasi).



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1385 -



**Badan Pengawas Obat dan Makanan**

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2022, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menetapkan 11 sasaran strategis dengan 27 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2022, dari 27 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, 17 indikator kinerja (62,97%) memiliki capaian melebihi target, 1 indikator kinerja (3,70%) sesuai target, dan 9 indikator kinerja (33,33%) tidak mencapai target capaian kerjanya.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2022.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	82	76,11	92,82%
		Persentase Obat yang memenuhi syarat	92,25	89,73	97,27%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	83	85,21	102,67%
2.	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	84	84,63	100,75%
		Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas	80	81,56	101,95%
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89	94,8	106,52%
		Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	77	76,39	99,21%
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	89,45	90,83	101,54%
4.	Meningkatnya kualitas Kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	88,5	78,64	88,86%
5.	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88,5	86,26	97,47%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77,5	83,89	108,25%
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	69	74,14	107,45%
		Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	93	93,6	100,65%



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1386 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan	4,28	4,5	105,14%
6.	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	70	50,53	72,18%
7.	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan	Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar	85	87,39	102,81%
		Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan	77	73,11	94,94%
8.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	Indeks RB BPOM	85	84,68*	99,62%
		Nilai AKIP BPOM	82	80,33*	97,96%
		Persentase kerjasama yang efektif	86	86,62	100,72%
9.	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BPOM	84	84,78	100,93%
		Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	79	80,39	101,76%
10.	Menguatnya laboratorium, analisis/ kajian, serta penerapan e-government dalam pengawasan Obat dan Makanan	Indeks SPBE BPOM	2,77	3,12	112,64%
		Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar Kemampuan Pengujian	81	81,34	100,42%
		Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	78	78,87	101,11%
11.	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP	WTP	100%
		Nilai Kinerja Anggaran BPOM	93,5	94,84	101,43%

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Pengawasan Obat dan Makanan	866.529.385.000	862.085.188.154	99,49
2.	Program Dukungan Manajemen	1.162.063.958.000	1.153.116.041.958	99,23
	Jumlah	2.028.593.343.000	2.015.201.230.112	99,34

Hambatan atau permasalahan dalam pencapaian kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yaitu

1. Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Teknologi BPOM masih sangat terbatas dibanding tuntutan dalam pemenuhan percepatan timeline registrasi vaksin dan produk peningkatan daya tahan tubuh.
2. Koordinasi dengan peneliti/stakeholder terkait dalam pengembangan obat dan vaksin Covid-19 yang belum optimal.
3. Meningkatnya produksi dan peredaran obat-obatan seperti suplemen, vitamin, dan obat-obatan untuk penyembuhan Covid-19 sehingga perlu peran BPOM dalam intensifikasi pengawasan baik pre/post market obat-obatan tersebut.
4. Kesadaran stakeholders dan masyarakat dalam melaporkan kasus efek samping Obat dan Makanan yang dibutuhkan dalam penguatan farmakovigilans masih relatif rendah.
5. Adanya segmentasi kewenangan dan urusan dalam upaya kemandirian industri farmasi dalam negeri menjadi terhambat.
6. Kemampuan laboratorium pengujian Obat dan Makanan masih belum dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia, di sisi lain untuk laboratorium di luar BPOM masih belum memadai dari sisi jumlah dan kompetensinya.
7. Masih terbatasnya kapasitas BPOM dari sisi pemenuhan sumberdaya yang diperlukan untuk menyempurnakan sistem informasi yang andal.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1387 -

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mencapai target kinerja adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan peran serta pelaku usaha dalam menerapkan ketentuan yang berlaku. Dalam kegiatan ini BPOM senantiasa melakukan pengawasan pre dan post market terhadap sarana produksi Obat dan Makanan agar kesadaran serta kemampuan pelaku usaha dalam pemenuhan ketentuan (GMP) dapat ditingkatkan.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas melalui kampanye Cek KLIK pada kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) kepada masyarakat serta sosialisasi website BPOM, HALOBPOM dan media sosial lainnya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan.
3. Simplifikasi dan percepatan registrasi obat dan produk biologi untuk penanganan COVID-19 dengan skema Emergency Use Authorization (EUA).
4. Pendampingan/asistensi pemenuhan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan Program Manajemen Risiko (PMR) bertahap bagi UMK pangan olahan.
5. Koordinasi pelaksanaan dan monitoring evaluasi dengan Lembaga Administrasi Negara dalam penilaian kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan.
6. Koordinasi dengan Kepolisian RI dalam hal ini Korwas PPNS terkait bantuan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan dalam setiap operasi penindakan yang dilakukan oleh BPOM.
7. Koordinasi dengan Pengadilan di seluruh Indonesia serta Jaksa Penuntut Umum (Kejaksaan) agar dapat memberikan penuntutan maksimal terhadap perkara Obat dan Makanan.
8. Meningkatkan kompetensi PPNS dalam melengkapi pemberkasan agar dapat meyakinkan. Jaksa Penuntut Umum untuk memberikan Tuntutan setinggi-tingginya.

Rencana ke depan yang akan dilaksanakan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yaitu.

1. Melakukan perbaikan kualitas pengelolaan kebijakan fokus pada pertanyaan- pertanyaan yang masih memiliki bobot penilaian  $\leq 50$  dengan kondisi bukti kurang sesuai atau bukti sesuai namun masih kurang menjelaskan kondisi dari jawaban yang dipilih.
2. Melakukan perencanaan kebijakan peraturan perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan serta menyesuaikan dengan tools penilaian.
3. Meningkatkan koordinasi dengan Lembaga Administrasi Negara sebagai instansi yang melakukan penilaian akhir Indeks Kualitas Kebijakan.
4. Melakukan reviu terhadap target tahun 2023 dan 2024 mengingat target indikator ini 2 (dua) tahun berturut-turut tidak tercapai.
5. Untuk Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan diperlukan strategi yang lebih tepat dan efisien dalam melakukan pendampingan/fasilitasi kepada UMKM seperti memberikan motivasi dan kejelasan bagi UMKM dalam mempersiapkan diri mengurus Nomor Izin Edar Produk.
6. Terkait Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah, rendahnya capaian indikator ini disebabkan realisasi indikator ini sangat dipengaruhi oleh keterlibatan stakeholder dalam hal ini kejaksaan dan pengadilan negeri. Adanya prinsip Restorative Justice dalam penyelesaian perkara pidana menjadi tantangan tersendiri dalam pencapaian sasaran ini. Untuk itu dibutuhkan koordinasi serta kerjasama yang optimal dan efektif dengan lintas sektor terkait tersebut. Di samping itu juga perlu dilakukan reviu terhadap target tahun 2023 dan 2024 mengingat target indikator ini 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak tercapai.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1388 -

**LAMPIRAN  
KOORDINASI BIDANG MARVES**

<b>NO</b>	<b>KEMENTERIAN/LEMBAGA</b>
1	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
2	Kementerian Perhubungan
3	Kementerian Kelautan dan Perikanan
4	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
5	Badan Koordinasi Penanaman Modal
6	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
8	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
9	Badan Pangan Nasional



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1389 -



**Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi**

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2022, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah menetapkan 14 sasaran strategis dengan 17 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2022, dari 17 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, 7 indikator kinerja (41,18%) memiliki capaian melebihi target, 4 indikator kinerja (23,53%) sesuai target, 6 indikator kinerja (35,29%) tidak mencapai target.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2022.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Teguhnya Jatidiri Indonesia sebagai Negara Maritim yang Mandiri dan Berdaulat	Efektivitas Kepemimpinan Maritim	$\geq 3$	4	100%
2	Terwujudnya Ekonomi Maritim yang Inklusif dan Kuat Sebagai Penggerak Utama Perekonomian Nasional	PDB Maritim	6,99	7,6	108,73%
3	Menguatnya Jatidiri Indonesia sebagai Bangsa Bahari Maju dan Berkepribadian Luhur	Indeks Daya Saing Global (IDSG)	64,6	63,29	97,97%
4	Terwujudnya Indonesia sebagai Negara Maritim yang Mandiri Mengelola Lautnya serta Aktif di Forum Internasional	Indeks Kedaulatan Maritim	3	4	120%
5	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Ekonomi Berbasis Kemaritiman yang Seimbang dan Dinamis	Indeks Kinerja Logistik	3,3	3,15	94,45%
		Indeks Disparitas Ekonomi	$\sim 0,17$	$\sim 0,129$	100%
6	Meningkatnya Produktivitas dan Kualitas Lingkungan dan Perairan Indonesia	Indeks Kesehatan Laut	70	75,65	108,07%
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,7	72,42	106,97%
7	Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa serta Nilai Tambah Sumber Daya Alam	PDB Sektor Sumberdaya Alam dan Jasa	16,79	19	113,16%
		Tingkat Komponen dalam Negeri	46	49,83	108,33%
8	Menguatnya Jatidiri Indonesia sebagai Bangsa Bahari yang Inovatif, Berkarakter dan Berbudaya Nusantara	Indeks Kapabilitas Inovasi	39,5	27,9	70,63%
9	Tersedianya Kebijakan/Rekomendasi	Persentase Rekomendasi Kebijakan yang ditetapkan	100	100	100%





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1390 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Kebijakan Kemaritiman yang Efektif dan Efisien				
10	Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kemaritiman yang Efektif dan Efisien	Persentase Hasil pengendalian yang ditindaklanjuti	100	100	100%
11	Terwujudnya ASN Kemenko Marves yang Profesional	Indeks Profesionalitas ASN	81	56,82	73,85%
12	Terwujudnya Organisasi dan Tata Kelola Kemenko Marves yang Baik	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Kemenko Marves	80	75,18	93,98%
13	Tersedianya Sistem Informasi Manajemen Kemenko Marves yang Terintegrasi	Nilai Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,1	2,68	86,45%
14	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	Opini BPK	WTP	WTP	120%

Pagu anggaran Kemenko Marves TA. 2022 telah disahkan pada tanggal 17 November 2021, dengan terbitnya DIPA Induk Nomor: SP DIPA-120.01.1.350494/2022 dimana Kemenko Marves memperoleh alokasi Pagu Anggaran Definitif sebesar Rp260.926.167.000,00 (dua ratus enam puluh miliar sembilan ratus dua puluh enam juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah). Namun, selama periode 2022 Kemenko Marves mendapatkan pagu blokir, melakukan pengajuan usulan pembukaan *Automatic Adjustment*, dan melakukan pengajuan usulan revisi. Sehingga sampai dengan triwulan IV, total anggaran Kemenko Marves berjumlah Rp345.169.102.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Dua Milyar Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Ribu).

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

No	Program	Pagu Awal (Rp)	Tambahan Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Pagu Anggaran (Rp)	%
1	Program Dukungan Manajemen	173.276.257.000,00	15.396.516.000,00	188.672.773.000,00	54,66
2	Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan	87.649.910.000,00	68.846.419.000,00	156.496.329.000,00	45,34
<b>Jumlah</b>		<b>260.926.167.000,00</b>	<b>84.242.935.000,00</b>	<b>345.169.102.000,00</b>	<b>100</b>

Hambatan atau permasalahan dalam pencapaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

1. IKU 1 Efektivitas Kepemimpinan Maritim
  - a. Perjanjian Kerjasama Indonesia-Singapura terkait *Flight Information Region* (FIR) adalah belum dapat berlaku selama belum diratifikasi oleh peraturan nasional kedua negara;
  - b. Adanya perubahan jadwal pelaksanaan KTT, sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan lain di dalam AIS Forum dan rangkaian kegiatan pendukung lainnya di Indonesia.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1391 -

2. IKU 2 PDB Maritim

- a. Sulitnya mengidentifikasi kegiatan statistik yang merupakan penghasil data terkait kemaritiman pada stakeholder terkait, sehingga metadata statistik untuk data set yang digunakan dalam proses perhitungan untuk penyusunan PDB Kemaritiman saat ini belum sepenuhnya dilakukan.
- b. Minimnya sosialisasi menyebabkan pemahaman walidata terhadap penyusunan metadata statistik kemaritiman masih terbatas, sehingga kegiatan sosialisasi ini perlu ditingkatkan dalam bentuk workshop agar walidata atau peserta workshop dapat lebih memahami bagaimana penyusunan metadata statistik.

3. IKU 3 Indeks Daya Saing Global

Kemenko Marves telah melaksanakan serangkaian kegiatan untuk mendukung pencapaian IKU IDSG dalam bidang infrastruktur, namun dikarenakan kondisi Pandemi Covid-19, WEF (*World Economic Forum*) tidak melakukan pengukuran IDSG. Sehingga data yang digunakan sebagai capaian yakni sebagaimana yang tercantum dalam Laporan IMD "*World Competitive Year Book 2022*".

4. IKU 4 Tingkat Kedaulatan Maritim

- a. Hasil monitoring dan evaluasi Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia menunjukkan bahwa penginputan pada Aplikasi SISMONEV KSP pelaporan telah dilakukan K/L terkait namun masih banyak yang perlu dilakukan perbaikan dalam pelaporan tersebut;
- b. Keputusan Republik Indonesia terhadap Peta Penetapan Batas Landas Kontinen Ekstensi Segmen Selatan Jawa dan Selatan Nusa Tenggara yang di berikan pada UN-CLCS PBB di New York harus Merujuk ketentuan aturan dan prosedur UNCLCS, serta jumlah antrian submisi yang ada saat ini, maka seluruh proses pengkajian hingga diterbitkannya rekomendasi oleh UNCLCS dapat memakan waktu hingga lebih dari sepuluh tahun.
- c. Adanya Penyelarasan Peraturan Undang-Undang Nasional Bidang Maritim dan Energi yang dikawal oleh Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi antara lain RPP Keamanan Laut, Rperpres RAN Perlindungan Pelaut dan Awak Kapal Perikanan, Rperpres Jaknas KKPH, RUU Pengesahan Perjanjian antara RI-Singapura tentang Ekstradisi Buronan, RPP Sumber Daya Air (RPP SDA), Koordinasi Penyusunan RUU Landas Kontinen (DPR) dan Ratifikasi FIR Indonesia-Singapura;
- d. Adanya Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2022 sebanyak Dua Cluster, antara lain:
  - i. *Cluster* Sumber Daya Energi Maritim terkait Kebijakan Pencapaian Produksi Minyak dan Sambungan Jaringan Gas yaitu belum adanya inisiasi pembentukan regulasi terkait penerapan *Carbon Capture and Storage* (CCS) di Indonesia dari Kemenko Marves dengan Kementerian teknis terkait, kemudian penerapan CCS di luar WK Migas serta perizinan kegiatan oleh pengembang CCS selain Kontraktor Migas Akomodasi sumber CO2 yang berasal dari industri



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1392 -

lain di luar wilayah operasi migas serta adanya peluang kerjasama internasional dalam skema emisi karbon termasuk sertifikasi perdagangan karbon.

- ii. *Cluster Energi Baru dan Terbarukan Maritim* yaitu dari 12 PSEL yang ditangani Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi 2022 menunjukkan ada tiga PSEL yang belum mencapai tahap lelang, lima PSEL sudah mencapai tahap lelang, satu PSEL sudah tahap pendanaan, dua PSEL sudah sampai tahap konstruksi sebesar 78% dan satu PSEL yang meminta difasilitasi pembangunan pengolah sampah dengan teknologi RDF (*Refused Derived Fuel*) dan pembangunan TPS 3R. Sedangkan Pengembangan Ekonomi Maritim Berbasis Energi Terbarukan (REBED) pada daerah Belitung memerlukan bantuan hibah perahu pariwisata tenaga listrik untuk Kawasan Mangrove Kuale-Sijuk, namun tidak bertahan lama beroperasi karena permasalahan pada baterai *storage*-nya.

5. IKU 5 Indeks Kinerja Logistik (*Logistic Performance Index/LPI*)

Kemenko Marves telah melaksanakan serangkaian kegiatan untuk mendukung pencapaian IKU ini, namun dikarenakan fokus terhadap pemulihan ekonomi, *World Bank* tidak melakukan pengukuran Indeks Kinerja Logistik. Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian secara khusus terkait penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang diantaranya pembangunan infrastruktur jalan antar sentra logistik dengan pelabuhan/bandar udara belum terhubung optimal, komoditas daerah dalam muatan balik belum maksimal, ketersediaan kuota BBM Solar Subsidi dan pengelolaan rute trayek.

Upaya-upaya/faktor pendukung yang telah dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam mencapai target kinerja adalah sebagai berikut.

1. IKU 1 Efektivitas Kepemimpinan Maritim

Faktor pendukung dari pencapaian IKU ini yaitu kondisi pandemi covid-19 sudah menjadi kondisi endemic sehingga sudah ditarik kembali kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat, yang berdampak terlaksananya agenda-agenda kerja pada Tahun 2022. Faktor ini berdampak pada peningkatan total capaian kinerja sebesar 113,46%. Capaian ini meningkat dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 yakni sebesar 109,26%. Peningkatan capaian kinerja sebesar 4,2%.

2. IKU 2 PDB Maritim

- a. Adanya Komitmen antara Kemenko Marves bersama dengan K/L terkait dan BP untuk menghitung PDB Kemaritiman.
- b. Belajar dari pengalaman pandemi Covid-19, Indonesia adanya *forward looking policy* yang lebih terukur, adaptif dan antisipatif dalam memfasilitasi sektor sektor ekonomi kemaritiman untuk bisa



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1393 -

berjalan lebih efektif dan efisien serta lebih memiliki ketahanan dalam menghadapi potensi krisis di masa depan.

3. IKU 3 Indeks Daya Saing Global

- a. Pembangunan Jalan Tol Jogja - Bawen
- b. Pembangunan Jalan Tol Solo-YIA-Kulonprogo
- c. Pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang
- d. Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi
- e. Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1
- f. Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 2
- g. Pembangunan Jalan Tol Bengkulu-Curup-Lubuk Linggau (Ruas Bengkulu-Taba Penanjung)
- h. Pembangunan Jalan Trans 3T Pulau Enggano
- i. Pembangunan Jalan Trans 3T Pulau Biak
- j. Pembangunan Jalan Trans 3T Kei Besar

4. IKU 4 Tingkat Kedaulatan Maritim

Faktor pendukung dari pencapaian IKU Tingkat Kedaulatan Maritim tahun 2022 adalah Pandemi Covid-19 sudah menjadi endemi dan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat sudah tidak diberlakukan, sehingga kegiatan yang menunjang nilai Tingkat Kepastian Wilayah, Tingkat Keamanan dan Ketahanan Maritim serta Tingkat Keselamatan Maritim dengan persentase dapat dilaksanakan yakni 87,70% dari 100 yang selanjutnya, dilakukan konversi sehingga diperoleh nilai Tingkat Kedaulatan Maritim sebesar 4 (Sangat Berdaulat).

5. IKU 5 Indeks Kinerja Logistik (*Logistic Performance Index/LPI*)

- a. Terjalin Koordinasi yang baik antar stakeholder
- b. Program tol laut telah memiliki 33 trayek mengalami peningkatan jumlah armada angkutan dan jumlah pelabuhan singgah sejak tahun 2019 – 2022. Telah diluncurkan Sistem Informasi Tol Laut (SITOLAUT) yang memudahkan pembeli dalam melakukan purchase order untuk dapat memilih sendiri penjual, Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) dan jadwal kapal melalui media elektronik. Selain itu, pemerintah juga lebih mudah dalam melakukan pemantauan.

Rencana ke depan yang akan dilaksanakan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk meningkatkan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut.

1. IKU 1 Efektivitas Kepemimpinan Maritim

- a. Forum IMO antara lain:
  - i. Mengusulkan perubahan masa jabatan pada Organisasi IMO guna menciptakan organisasi yang progresif.
  - ii. Mengusulkan dilakukannya *impact assessment* dalam perhitungan indikator intensitas karbon



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1394 -

dalam pelayaran guna menciptakan aktivitas maritim yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

- iii. Mengusulkan penyediaan sertifikat elektronik bagi pelaut untuk menunjang efektivitas aktivitas pelayaran yang moden.
- iv. Mengusulkan kemudahan dalam memperoleh sertifikat pelaut bagi para pelajar/mahasiswa bidang pelayaran.

b. Forum AIS antara lain:

- i. Menegaskan kesungguhan untuk mempererat kerja sama dan melakukan kolaborasi sesuai area kerja sama AIS Forum.
- ii. Mendorong inovasi dan penguatan pembiayaan program kelautan berkelanjutan terutama dalam mendukung aktivitas ekonomi biru guna mendukung kesejahteraan Bersama.
- iii. Menyatakan kesepahaman bersama, dan komitmen memperkuat kelembagaan kerjasama AIS Forum.
- iv. Menyetujui serta memberikan mandat kepada Indonesia untuk melaksanakan pertemuan pertama tingkat Kepala Negara dari forum negara-negara pulau dan kepulauan.

c. Forum *Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction* (BBNJ)

Frasa "*archipelagic state*" termuat dalam kelima pilar utama pembahasan *further refreshed text International Legally Binding Instrument* BBNJ Forum menerima usulan untuk memuat dan mempertahankan frasa *adjacent coastal state* sebagai upaya perlindungan hak-hak negara pantai Usulan untuk menggunakan frasa "*fishing and fishing activities*" pada bab terkait *Marine Genetic Resources*

Tim Nasional BBNJ, difasilitasi kementerian Luar Negeri, menyusun rencana pertemuan formal maupun informal dengan negara-negara peserta IGC-BBNJ yang teridentifikasi memiliki kesamaan kepentingan dan/atau pandangan dengan Indonesia.

- d. Berdasarkan hasil dari rewiu dan menjadi catatan oleh KemenPANRB, terhadap capaian IKU Efektifitas Kepemimpinan Maritim, dalam penghitungannya agar melibatkan pakar/praktisi/akademisi dalam bidang kedaulatan maritim dan energi yang kompeten sehingga datanya valid. Pada tahun 2023, Kemenko Marves akan menggunakan formulasi penghitungan IKU ini hasil dari kajian tim perumus yang terdiri dari pakar/praktisi/akademisi, yakni:

- i. Dr. Surya Wiranto, S.H., M.H, Laksamana Muda TNI (Purn) (Akademisi Universitas Pertahanan)
- ii. Prof. Dr. Eddy Pratomo, S.H., M.A., (Ahli Hukum Internasional Bidang Kemaritiman dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila)
- iii. Haris Nugroho, S.H., LL.M., (Executive Secretary International Office Universitas Pancasila)
- iv. I Made Andi Arsana, ST, ME, Ph.D., (Akademisi Universitas Gadjah Mada)



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1395 -

v. Akhmad Solihin, S.Pi, M.H., (Akademisi Institut Pertanian Bogor)

2. IKU 2 PDB Maritim

- a. Akselerasi pertumbuhan sehingga kontribusi PDB Kemaritiman terhadap PDB Nasional bisa terus meningkat sesuai cita-cita menjadikan ekonomi kemaritiman sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif.
- b. Melakukan terobosan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan output kemaritiman sehingga harapannya dapat menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi domestik.
- c. Pengembangan hilirisasi, tidak hanya terbatas pada produk pertambangan, juga dari produk perikanan dan budidaya maritim yang sangat berpotensi sehingga dapat mendorong kinerja PDB Kemaritiman secara keseluruhan.
- d. Peningkatan nilai tambah dari produk sektor primer dari hilirisasi, sehingga pemerataan investasi ke sektor kemaritiman dapat menjadi kunci.
- e. Peningkatan pemahaman walidata dalam penyusunan metadata statistik pada tahun mendatang melalui kegiatan sosialisasi dalam bentuk workshop.
- f. Mengintegrasikan *dashboard* satu data kemaritiman Indonesia dengan *dashboard oceans accounts* (inisiatif yang dikerjakan dengan Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) dan NORAD Norwegia).
- g. Koordinasi lanjutan terkait tata Kelola data mulai dari proses akuisisi data, pengolahan, hingga data dapat divisualisasikan ke dalam *dashboard*.
- h. Pada tahun 2023 akan melakukan update penyusunan standar data dan metadata kemaritiman.
- i. Penyempurnaan tata kelola *dashboard* (akses) pada tahun 2023. 10. Penyempurnaan data dan metodologi PDB Kemaritiman, terutama dengan dukungan survei lapangan dan penyediaan data dari K/L terkait.

3. IKU 3 Indeks Daya Saing Global

- a. Pada tahun 2023 percepatan *extraordinary* dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada proyek-proyek strategis pemerintah khususnya PSN dan *Major Project* yang terdapat pada Lampiran II RPJMN 2020- 2024.
- b. Pada tahun mendatang indikator kinerja Indeks Daya Saing Global tidak digunakan lagi, hal ini sesuai dengan masukan dari KemenPANRB pada rewiu SAKIP tahun 2022 dan hasil diskusi internal Kemenko Marves, bahwa untuk indikator yang berasal dari eksternal/lembaga lain dan data capaiannya sulit didapatkan dapat di drop dan diganti dengan indikator yang sesuai dengan bidang tugas dari Kemenko Marves.
- c. Berdasarkan hasil pembahasan oleh internal Kemenko Marves, IKU IDSG pada tahun 2023 dan selanjutnya tidak dimasukkan menjadi IKU Menteri Koordinator. Adapun alasannya karena IKU yang dikeluarkan oleh Lembaga eksternal (*World Economic Forum/WEF*) kendali dari Kemenko Marves



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1396 -

terlalu jauh. Hal lainnya yaitu nilai indeks ini dari 12 pilar penilaian, hanya ada satu yang sesuai dengan bidang yang ada di Kemenko Marves yaitu pilar infrastruktur.

4. IKU 4 Tingkat Kedaulatan Maritim

- a. Percepatan pengesahan Permenko tentang Pedoman Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi Pelaporan dan Penyesuaian Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025 guna mengakomodir atau menindaklanjuti permohonan dari K/L terkait penyesuaian-penyesuaian rencana aksi yang ada.
- b. Membentuk Kerjasama dalam bentuk MoU dengan entitas luar negeri untuk pengembangan *Maritime Domain Awareness (MDA)*.
- c. Kemenko Marves mendorong Pemerintah RI untuk meratifikasi ketiga perjanjian (FIR, DCA, Ekstradisi) yang telah disepakati Indonesia dan Singapura sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- d. Kemenko Marves mendorong Pemerintah Indonesia untuk menyiapkan penyelenggaraan HLM AIS Forum pada tahun 2023 sebagai bentuk perwujudan peran aktif dan keberlanjutan komitmen Indonesia dalam AIS Forum serta upaya pembangunan citra dan legitimasi kepemimpinan dan diplomasi maritim Indonesia pada tingkatan global demi mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.
- e. Kemenko Marves mendorong terbitnya turunan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2022 tentang penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran.
- f. Kemenko Marves mendorong Pemerintah Indonesia menyiapkan bahan presentasi untuk submisi segmen selatan Jawa – Nusa Tenggara, dan menyempurnakan dokumen tambahan hasil dari pengolahan survei di area of interest akan dipresentasikan kepada UN-CLCS pada masa sidang UN-CLCS ke 57 di tahun 2023.
- g. Selain melakukan berbagai langkah strategis dalam memastikan wilayah kedaulatan dan wilayah berdaulat, guna menjaga kepentingan Indonesia di dunia internasional, Kemenko Marves mendorong Pemerintah Indonesia dan berperan aktif mengkoordinasikan di berbagai forum kemaritiman regional dan global berupaya agar regulasi yang terbentuk dari berbagai forum tersebut dapat mengakomodir kepentingan nasional.
- h. Berdasarkan hasil dari revidasi dan menjadi catatan oleh KemenPANRB, terhadap capaian IKU Efektifitas Kepemimpinan Maritim, dalam penghitungannya agar melibatkan pakar/praktisi/akademisi dalam bidang kedaulatan maritim dan energi yang kompeten sehingga datanya valid. Pada tahun 2023, Kemenko Marves akan menggunakan formulasi penghitungan IKU ini hasil dari kajian tim perumus yang terdiri dari pakar/praktisi/akademisi, yakni:
  - i. Dr. Surya Wiranto, S.H., M.H, Laksamana Muda TNI (Purn) (Akademisi Universitas Pertahanan)



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1397 -

- ii. Prof. Dr. Eddy Pratomo, S.H., M.A., (Ahli Hukum Internasional Bidang Kemaritiman dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila)
  - iii. Haris Nugroho, S.H., LL.M., (Executive Secretary International Office Universitas Pancasila)
  - iv. I Made Andi Arsana, ST, ME, Ph.D., (Akademisi Universitas Gadjah Mada)
  - v. Akhmad Solihin, S.Pi, M.H., (Akademisi Institut Pertanian Bogor)
5. IKU 5 Indeks Kinerja Logistik (*Logistic Performance Index/LPI*)
- a. Akan melakukan kolaborasi dengan STRANAS PK untuk pengawasan efektivitas program tol laut.
  - b. Pada tahun mendatang indikator kinerja logistic (LPI) tidak digunakan lagi, hal ini sesuai dengan masukan dari KemenPANRB pada rewiu SAKIP tahun 2022 dan hasil diskusi internal Kemenko Marves, bahwa untuk indikator yang berasal dari eksternal/lembaga lain dan data capaiannya sulit didapatkan dapat di drop dan diganti dengan indikator yang sesuai dengan bidang tugas dari Kemenko Marves.
  - c. Berdasarkan hasil pembahasan oleh internal Kemenko Marves, IKU Indeks Kinerja Logistik pada tahun 2023 dan selanjutnya tidak dimasukkan menjadi IKU Menteri Koordinator. Adapun alasannya karena IKU yang dikeluarkan oleh Lembaga eksternal (*World Bank*) kendali dari Kemenko Marves terlalu jauh, hal lainnya sejak tahun 2018 world bank tidak merilis nilai indeks ini, sehingga menyebabkan “rendahnya” pencapaian IKU Menko Maritim.





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1398 -



**Kementerian Perhubungan**

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2022, Kementerian Perhubungan telah menetapkan 3 sasaran strategis dengan 4 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2022, dari 4 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, 2 indikator kinerja (50%) memiliki capaian melebihi target, 1 indikator kinerja (25%) sesuai target, 1 indikator kinerja (25%) tidak mencapai target, dan jumlah indikator dengan capaian  $x >$  target indikator kinerja (%) belum dihitung capaian kerjanya

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2022.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Konektivitas Nasional	Rasio Konektivitas Nasional	0,741	0,748	100,865%
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	85,000	93,920	110,494%
		On Time Performance Layanan Transportasi	77,062	74,146	96,216%
3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi dalam 1 Juta Keberangkatan	23,356	19,934	114,643%

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (DL)	2.210.901.765.000	2.199.525.072.893	99,485%
2	Program Infrastruktur Konektivitas (GA)	22.816.068.543.000	22.319.043.225.570	97,822%
3	Program Dukungan Manajemen (WA)	8.451.265.607.000	8.301.082.804.040	98,223%
Jumlah		33.478.235.915.000	32.819.651.102.503	98,033%

Hambatan atau permasalahan dalam pencapaian kinerja Kementerian Perhubungan antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

1. Aksesibilitas
  - a. Belum Optimalnya Penyelenggaraan dan Pelayanan Angkutan Keperintisan.;
  - b. Masih Kurangnya Minat Swasta Dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi.
  - c. Kondisi Infrastruktur Transportasi yang Masih Belum Memadai.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1399 -

- d. Terdapat Beberapa PKN/PKW/KSN dan simpul transportasi belum terhubung dengan jalur kereta api.
2. Kinerja Pelayanan
    - a. Menurunnya peran angkutan umum dan maraknya transportasi online.
    - b. Belum adanya penyuluhan/perbaikan pelayanan untuk pelaksanaan angkutan pemandu yang diharapkan melalui subsektor, dimana standar pelayanan minimal dirasakan masih jauh dari kelayakan pelayanan baik dari kapal maupun fasilitasnya.
    - c. Belum optimalnya peran angkutan laut dikarenakan adanya ketimpangan muatan.
    - d. Belum optimalnya peralihan transportasi barang yang didominasi moda angkutan jalan.
    - e. Belum optimalnya pelayanan transportasi multimoda dan antarmoda terintegrasi.
    - f. Adanya keterbatasan infrastruktur bandar udara khususnya dalam mendukung pemberian alokasi waktu terbang (slot time) akan mengakibatkan terhambatnya penambahan kapasitas angkutan udara.
    - g. Dalam upaya penambahan kapasitas bandar udara seringkali terbentur permasalahan kepemilikan lahan yang kerap kali menghambat proses pembangunan bandar udara.
    - h. Sebagian bandar udara mengalami over capacity sementara upaya pembangunan bandar udara tidak mungkin dapat terselesaikan dalam satu tahun anggaran.
    - i. Faktor utama kenaikan tarif tiket pesawat dipengaruhi oleh 3 (tiga) komponen utama antara lain harga avtur, nilai tukar rupiah dan komponen biaya lainnya (pajak, sparepart, sewa pesawat, dll).
  3. Keselamatan dan Keamanan
    - a. Belum optimalnya pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi meliputi kecukupan dan keandalan sarana, prasarana keselamatan dan keamanan transportasi sesuai dengan perkembangan teknologi.
    - b. Belum optimalnya tingkat kesadaran dan peran serta masyarakat terhadap keselamatan dan keamanan transportasi.
    - c. Kurang optimalnya pelaksanaan perlindungan lingkungan yang diakibatkan penyelenggaraan transportasi.
    - d. Kurangnya SDM transportasi berlisensi.
    - e. Belum optimalnya penanganan perlintasan sebidang jalur KA dengan jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  4. Restrukturisasi dan Reformasi

Lembaga pelatihan penerbangan secara jumlah sudah sangat memadai namun daya serap pada industri penerbangan masih terkendala dengan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan maskapai penerbangan;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1400 -

5. Teknologi

- a. Belum optimalnya kualitas kuantitas, standar kompetensi SDM transportasi dan tenaga pendidik transportasi;
- b. Belum optimalnya tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan masih kurangnya kualitas dan kuantitas tenaga auditor internal serta penggunaan aspek teknologi informasi secara optimal.
- c. Belum terpenuhinya target jumlah dan kompetensi peneliti, dimana peneliti merupakan modal utama yang cukup menentukan kualitas dan produktivitas hasil penelitian dan pengembangan transportasi.
- d. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan bidang perhubungan.
- e. Masih tingginya penggunaan bahan bakar minyak (BBM) berbasis fosil dalam penyelenggaraan transportasi.

6. Pemindahan Ibu Kota Negara

Pemindahan Ibu Kota Negara ke luar Pulau Jawa perlu dilakukan karena kompleksitas permasalahan yang terjadi di Pulau Jawa. Beberapa permasalahannya adalah sekitar 57% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa sehingga perlu adanya pendistribusian penduduk ke daerah yang masih memiliki jumlah penduduk yang rendah, kontribusi ekonomi per pulau terhadap PDB Nasional yang belum merata dimana saat ini 58,49% dari PDB Nasional dikontribusikan oleh Pulau Jawa, mulai terjadinya krisis ketersediaan air di Pulau Jawa terutama DKI Jakarta dan Jawa Timur, konversi lahan terbesar terjadi di Pulau Jawa, pertumbuhan urbanisasi yang sangat tinggi dimana konsentrasi terbesar terdapat di Jakarta dan Jabodetabekpunjur serta meningkatnya beban Jakarta sehingga terjadi penurunan daya dukung lingkungan dan besarnya kerugian ekonomi yang dihadapi. Kementerian Perhubungan memiliki peran penting dalam upaya pembangunan IKN, diantaranya:

- a. Mengembangkan transportasi multimoda dan konektivitas antar wilayah melalui;
  - i. Meningkatkan konektivitas regional via darat, air, dan udara;
  - ii. Mengupayakan keselamatan dan keamanan dalam bertransportasi;
  - iii. Mengupayakan infrastruktur transportasi yang tahan bencana;
  - iv. Merancang pelayanan transportasi terpadu dan berkualitas (service level);
- b. Menyediakan aksesibilitas untuk mendukung aktivitas di IKN mengikuti masterplan pembangunan IKN dengan pengintegrasian sistem transportasi perkotaan ke perumahan dan permukiman yang memadai, aman dan terjangkau (BRT, LRT, MRT);
- c. Mengembangkan transportasi berbasis digital dengan pengintegrasian sistem transportasi dan sistem teknologi informasi dan komunikasi;
- d. Mengembangkan transportasi hijau dan ramah lingkungan melalui penggunaan transportasi umum berbasis ramah lingkungan dan mendukung penggunaan charging station.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1401 -

Upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penerapan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), pelaksanaan;
2. Program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan/ penyederhanaan organisasi;
3. Digitalisasi serta adaptasi terhadap perubahan lingkungan strategis yang terjadi;
4. Dukungan terhadap aksesibilitas pariwisata;
5. Penguatan rantai logistik;
6. Dukungan aksesibilitas pada Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK);
7. Pembangunan sistem transportasi di IKN baru.

Rencana ke depan yang akan dilaksanakan Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut.

1. Melaksanakan langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan anggaran, melalui:
  - a. Melakukan evaluasi untuk melakukan lelang tidak mengikat;
  - b. Melakukan percepatan pada kegiatan - kegiatan yang dapat segera dilaksanakan;
  - c. Melakukan optimalisasi penyerapan anggaran melalui revisi anggaran untuk pemanfaatan sisa kontrak dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan;
  - d. Melakukan evaluasi untuk mengidentifikasi anggaran sisa kegiatan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain yang lebih prioritas;
  - e. Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, serta tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun;
  - f. Melakukan perpanjangan terhadap kegiatan kontrak tahun jamak yang mengalami kendala dalam pelaksanaan di lapangan ataupun kendala dalam ketersediaan anggaran;
  - g. Berkoordinasi dengan instansi terkait terhadap permasalahan lahan maupun hal lain terkait pihak eksternal;
  - h. Memonitor Rencana Penarikan Dana sesuai jadwal/termin.
2. Dalam kondisi ruang fiskal negara yang semakin terbatas, Kementerian Perhubungan akan mengoptimalkan sumber pendanaan alternatif yang berasal dari PNB/BLU, SBSN, PHLN serta KPBU, KSP dan bentuk kerjasama lainnya dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur transportasi.
3. Terkait pencapaian target Indikator Kinerja Kementerian Perhubungan, perlu mempertahankan kinerja yang telah mencapai target, dan juga penetapan target mengacu pada realisasi pada tahun sebelumnya. Selain itu juga diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Dalam masa normal pasca pandemi COVID-19, penyediaan layanan transportasi harus mengedepankan penggunaan teknologi informasi, micalnya penerapan online ticketing pada



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1402 -

- seluruh moda transportasi yang dapat meningkatkan efisiensi waktu dan kualitas layanan transportasi kepada masyarakat;
- b. Meminimalisir waktu tunggu melalui pengaturan kedatangan dan keberangkatan moda transportasi secara efektif;
  - c. Meningkatkan kualitas SDM transportasi, baik dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, monitoring hingga evaluasi;
  - d. Pemenuhan SOP layanan transportasi;
  - e. Melaksanakan pemeriksaan pada seluruh sarana transportasi agar berfungsi optimal;
  - f. Mengembangkan kerjasama dengan perusahaan jasa transportasi baik dalam negeri bahkan luar negeri, dan meningkatkan kompetensi SDM Perhubungan sesuai kebutuhan pasar;
  - g. Mendorong pengembangan dan pemanfaatan moda transportasi yang ramah lingkungan (green transport);
4. Meningkatkan komitmen Pimpinan unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam penerapan manajemen berbasis kinerja khususnya dalam hal perencanaan kinerja, maupun monitoring dan evaluasi capaian kinerja;
  5. Secara berkesinambungan terus diupayakan penciptaan inovasi guna mendukung perbaikan kinerja di masa mendatang, termasuk optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan kinerja;
  6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi perjanjian kinerja melalui aplikasi kinerja secara berkesinambungan guna meningkatkan kualitas pengukuran kinerja, termasuk melakukan penyempurnaan sistem perangkat monitoring yang relevan.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1403 -



**Kementerian Kelautan dan Perikanan**

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2022, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan 8 sasaran strategis dengan 21 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2022, dari 21 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, 11 indikator kinerja (52,38%) memiliki capaian melebihi target, 5 indikator kinerja (23,81%) sesuai target, 5 indikator kinerja (23,81%) tidak mencapai target.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2022.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat	Indeks Kesejahteraan Masyarakat KP	61,47	61,38	99,85%
2	Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	72	61,71	120,00%
		Luas kawasan konservasi perairan	28,9	28,9	100,00%
3	Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat	Pertumbuhan Produk Domestik Bruto	4	2,79	69,75%
		Nilai ekspor hasil perikanan	7,13	6,24	87,52%
		Konsumsi ikan	59,53	56,48	94,88%
		Nilai PNB Sektor KP	1,87	1,87	100,00%
		Tenaga kerja yang terlibat	651.018	1.133.510	120,00%
4	Kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap dunia usaha dan dunia industri / DUDI	65	66,01	101,55%
5	Tata Kelola SDKP bertanggung jawab	WPPNRI yang melaksanakan penangkapan ikan terukur	11	11	100,00%
		Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir	27	34	120,00%



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1404 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		Persentase Kepatuhan (compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	96	96,56	100,58%
		Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan pemanfaatan SKDP	100	101,79	101,79%
6	Industrialisasi KP berdaya saing	Produksi perikanan	27,09	24,85	91,73%
		Produksi garam	0,7	0,7	100,00%
		Dana yang disalurkan untuk pelaku usaha KP	9,48	10,62	112,03%
		Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor	98	99,58	101,61%
7	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang Integratif	Persentase penanganan pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan	93	99,38	106,86%
		WPPNRI rawan kegiatan kelautan dan perikanan ilegal yang diawasi	6	6	100,00%
8	Reformasi Birokrasi KKP yang berkualitas	Nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP	73	77,79	106,56%
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KKP	89	93,49	105,04%

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

No	Eselon I	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Sekretariat Jenderal	534.535.057.000	522.851.228.283	97,81%
2	Inspektorat Jenderal	73.801.484.000	73.623.936.137	99,76%
3	Ditjen Perikanan Tangkap	733.810.783.000	721.340.693.780	98,30%
4	Ditjen Perikanan Budidaya	953.833.625.000	944.650.891.776	99,04%
5	Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	777.246.625.000	775.747.149.360	99,81%
6	Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan	318.841.301.000	314.524.616.688	98,65%
7	Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	359.411.191.000	350.776.773.122	97,60%
8	Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1.270.431.801.000	1.251.690.152.765	98,52%
9	Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	446.967.317.000	442.587.187.822	99,02%
Jumlah		5.468.879.184.000	5.397.792.629.733	98,70%

Hambatan atau permasalahan dalam pencapaian kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

1. Tantangan untuk peningkatan produksi kelautan dan perikanan saat ini diantaranya adalah: a). produktivitas armada penangkapan ikan yang masih belum optimal dan struktur armada penangkapan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1405 -

ikan masih didominasi skala kecil dan tradisional; b). kegiatan usaha budidaya ikan di Indonesia masih didominasi oleh pembudidaya skala kecil, teknologi tradisional, produktivitas yang rendah, penurunan daya dukung perairan dan lingkungan, dampak perubahan iklim, nilai tambah yang masih relatif kecil, serta pemanfaatan lahan yang belum optimal, dan biaya produksi yang tinggi; c). ketersediaan bahan baku yang tidak stabil untuk mendukung industrialisasi kelautan dan perikanan; d). akses permodalan untuk peningkatan skala usaha; e). daya saing dan mutu produk perikanan untuk ekspor yang masih perlu ditingkatkan; f). sarana prasarana pendukung di daerah belum seluruhnya memadai seperti pelabuhan perikanan, balai benih, pertambakan garam, budidaya ikan, dan lain lain;serta g). degradasi ekosistem, perubahan iklim, dan cuaca ekstrim.

2. Tantangan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, antara lain: a).pengelolaan sumber daya ikan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), termasuk optimalisasi kelembagaan WPPNRI; b). harmonisasi ruang laut dan ruang darat untuk penguatan melalui penyelarasan Rencana Tata Ruang (RTR) menurut klasifikasinya dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZKSNT), Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW), dan Rencana Tata Ruang Laut (RTRL); c). akselerasi pengendalian pemanfaatan ruang laut dan pulau-pulau kecil serta perairan di sekitarnya; d). masih terjadinya praktek IUU fishing dan destructive fishing; e). penerapan good aquaculture practices masih belum dilaksanakan secara optimal dalam pelaksanaan kegiatan perikanan budidaya; dan f). sinergi stakeholders dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
3. Saat ini produksi garam nasional masih belum dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri baik secara kuantitas maupun kualitas, yang antara lain dikarenakan usaha pergaraman masih tradisional, infrastruktur yang minim, dan tata niaga garam yang belum mendukung.
4. Permasalahan lainnya yang masih dihadapi Indonesia adalah masih adanya masyarakat yang kekurangan gizi (undernutrition) dan kerdil (stunting). Penyelesaian permasalahan ini membutuhkan peran sektor kelautan dan perikanan, khususnya dalam menyediakan sumber pangan bergizi berbasis protein ikan dengan jumlah dan aksesibilitas yang memadai.
5. Permasalahan daya saing industri perikanan nasional untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki masih perlu dioptimalkan untuk menjawab permintaan global yang terus berubah dan semakin ketat.
6. Masih sering terjadinya praktik IUU (Illegal, Unregulated, Unreported) Fishing di WPPNRI, baik dalam bentuk pencurian ikan oleh kapal ikan asing (KIA) maupun penangkapan ikan dengan cara merusak (destructive fishing) yang tidak sesuai ketentuan oleh kapal ikan Indonesia (KII).
7. Pertumbuhan ekonomi pasar negara tujuan ekspor dunia yang termasuk negara kategori advance economy mengalami kontraksi pada tahun 2022; Inflasi yang terjadi di negara-negara utama tujuan





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1406 -

ekspor produk perikanan seperti di AS telah mempengaruhi daya beli masyarakat; Diversifikasi pasar produk ekspor belum optimal dikarenakan adanya hambatan ekspor di beberapa negara tujuan baik tarif maupun non tarif. Beberapa kendala ekspor non-tarif antara lain adanya hambatan registrasi dan penambahan eksportir terdaftar di negara tujuan ekspor antara lain: Uni Eropa, Rusia, RRT, Arab Saudi, dan Brazil.

8. Terjadi penurunan daya beli masyarakat karena adanya inflasi sepanjang tahun 2022 sebesar 5,51%. Inflasi ini dipacu oleh kenaikan bahan bakar minyak yang mempengaruhi sektor transportasi dan penyediaan makanan minuman.
9. Faktor terbesar yang menyebabkan terjadinya penurunan jumlah produksi perikanan tangkap pada akhir tahun 2022 adalah peningkatan biaya operasional karena naiknya harga BBM serta kesulitan akses nelayan terhadap BBM bersubsidi, dan cuaca dan gelombang tinggi di beberapa daerah di Indonesia pada akhir tahun 2022 di beberapa daerah.
10. Upaya penguatan sistem karantina ikan serta penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. terkendala oleh belum optimalnya penerapan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan hulu hilir (kapal, tambak, supplier, dan unit pengolah ikan), kurangnya sarana dan prasarana inspeksi dan laboratorium pengujian, sarana layanan dan pengawasan di sentra-sentra produksi, serta di pintu pos lintas batas negara dan di bandara/pelabuhan baru.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mencapai target kinerja adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan produksi perikanan baik tangkap dan budidaya serta garam rakyat melalui penyediaan sarana peningkatan produksi dan mutu.
2. Meningkatkan daya saing hasil kelautan dan perikanan melalui penjaminan kualitas mutu untuk peningkatan konsumsi dalam negeri dan ekspor.
3. Meningkatkan pengelolaan ruang laut, perairan umum, pesisir dan pulau -pulau kecil sebagai landasan pemanfaatan dan pengusahaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
4. Meningkatkan penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan karantina ikan.
5. Penguatan kebijakan dan peningkatan kapasitas SDM untuk pengembangan usaha kelautan dan perikanan, diseminasi teknologi, serta peningkatan tata kelola pembangunan kelautan dan perikanan nasional.
6. Keikutsertaan dalam beberapa pameran internasional yang diselenggarakan pada tahun 2022, antara lain : Seafood Expo Global (SEG) di Barcelona, Spanyol; Interzoo di Nuremberg, Jerman; Seafood Expo North America (SENA) di Boston; Seaweed Fest and Festival (SIFEST) di Surabaya; Food Ingredients Europe (FIE) di Paris; dan SIAL Interfood 2022 di JIEXPO Kemayoran.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1407 -

7. Diplomasi dengan negara tujuan ekspor antara lain : Uni Eropa dalam rangka akses pasar dan tindak lanjut penanganan EU approval number, Jepang dalam rangka pemenuhan Japan Catch Documentation Scheme;
8. Penyusunan profil pasar ekspor dan strategi perluasan akses pasar negara tujuan ekspor sebanyak 5 (lima) rekomendasi kebijakan : Fasilitasi pemenuhan persyaratan Japan Catch Documentation Scheme; Fasilitasi pemenuhan sertifikasi udang (wild caught) tangkapan Amerika Serikat; Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Ekspor US Marine Mammals Protection Act (MMPA); Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Akses Pasar Uni Emirat Arab (UEA); Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Akses Pasar Tunisia.
9. Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) Kegiatan Gemarikan pada tahun 2022 telah dilaksanakan sebanyak 131 promosi di 13 provinsi, 33 kabupaten/kota, 33 kecamatan.
10. Penyaluran alat penangkapan ikan (API) dan/atau alat bantu penangkapan ikan sejumlah 14.632 unit di 30 Provinsi dengan 157 Kab./Kota; Sertifikat keahlian awak kapal perikanan bagi 28.833 orang awak kapal perikanan dari target 23.600 orang; Pengembangan kawasan kampung nelayan maju di 11 lokasi ; Pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan di 30 lokasi.

Rencana ke depan yang akan dilaksanakan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut.

1. Percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 dan Renstra KKP 2020-2024;
2. Pembangunan kelautan dan perikanan yang berbasis ekonomi biru yaitu (1) Perluasan Kawasan konservasi perairan; (2) Penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota dan zona penangkapan; (3) Pengembangan perikanan budidaya berkelanjutan di laut, pesisir, dan tawar yang berorientasi ekspor dan berbasis kearifan lokal; (4) Pengelolaan berkelanjutan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; (5) Penanganan sampah plastik di laut melalui gerakan nasional Bulan Cinta Laut yang diperkuat dengan peningkatan daya saing hasil kelautan dan perikanan, penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan peningkatan kapasitas SDM kelautan dan perikanan.
3. Memperkuat peningkatan daya saing hasil kelautan dan perikanan yang didukung dengan penjaminan kualitas mutu untuk peningkatan konsumsi dalam negeri dan ekspor, pengelolaan ruang laut, perairan umum, pesisir dan pulau - pulau kecil sebagai landasan pemanfaatan dan pengusaha sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan karantina ikan, penguatan kebijakan dan peningkatan kapasitas SDM untuk pengembangan usaha kelautan dan perikanan.
4. Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator kinerja tahun 2022 akan menjadi fokus perbaikan kinerja dalam pencapaian target RPJMN 2020-2024. KKP akan berkoordinasi



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1408 -

dengan K/L terkait, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kab/Kota serta lembaga terkait lainnya secara lebih intensif, mengingat target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap jajaran di seluruh KKP serta dukungan dari stakeholder terkait.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1409 -



**Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2022, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menetapkan 7 sasaran strategis dengan 15 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2022, dari 15 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, 9 indikator kinerja (60,00%) memiliki capaian melebihi target, 5 indikator kinerja (33,33%) sesuai target, dan 1 indikator kinerja (6,67%) belum dihitung capaian kinerjanya

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2022.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi	Nilai devisa pariwisata	0,86 – 1,71	6,72*	781,39%*
		Kontribusi PDB pariwisata	3,6	3,6	100%*
		Nilai ekspor produk ekonomi kreatif	25,33	27,04*	106,75%*
2	Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif nasional	Nilai tambah ekonomi kreatif	1.236	1.280*	103,56%*
3	Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan	Jumlah wisatawan mancanegara (wisman)	1,8 – 3,6	5,47	303,89%
		Rata-Rata spending wisman	477-570	477*	100%*
		Jumlah wisatawan nusantara (wisnus)	633-703	633*	100%*
4	Meningkatnya indeks pembangunan kepariwisataan Indonesia	Peringkat Travel and Tourism Development Index (TTDI)	n.a.	n.a. (dinilai dua tahunan)	
		Jumlah destinasi pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan	19	19	100%
5	Bertumbuhnya investasi dan akses pembiayaan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah investasi pariwisata dan ekonomi kreatif	2,42	2,42*	100%*
		Pembiayaan yang tersalurkan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	103,25	142,08	137,61%



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1410 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
6	Terwujudnya perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual produk kreatif	Persentase peningkatan HKI yang dikomersialisasikan	-	-	-
7	Meningkatnya kapabilitas SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif	Jumlah tenaga kerja Pariwisata	21,64	22,89*	105,78%*
		Jumlah tenaga Kerja Ekonomi Kreatif	22,29	23,98*	107,58%*
		Jumlah lulusan perguruan tinggi vokasi pariwisata	2.694	3.051	113,25%
8	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Nilai RB Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	79	79,73	100,92%

\*) Data Sementara

Catatan: SS.6 tidak diukur, karena belum ada target kinerja untuk Tahun 2022

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	1.008.721.254.000	963.634.063.982	95,53%
2	Program Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	1.617.502.941.000	1.587.399.163.330	95,53%
3	Program Dukungan Manajemen	968.684.992.000	940.549.805.214	97,08%
Jumlah		3.594.909.187.000	3.491.583.032.526	97,13%

Hambatan atau permasalahan dalam pencapaian kinerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

1. Kebijakan Automatic Adjustment dan realokasi belanja Kemenparekraf/Baparekraf di Tahun 2022, serta pergeseran jabatan yang mengakibatkan adanya perubahan pada rencana kegiatan dan pencapaian output di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf;
2. Adanya pandemi Covid-19 masih dirasakan dan sangat berdampak pada industri pariwisata dan ekonomi kreatif dan pelaksanaan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara maksimal;
3. Perlunya peningkatan jumlah ketersediaan dan peningkatan kualitas SDM yang profesional, yang mendukung good governance di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf;
4. Kolaborasi, koordinasi dan hubungan kerjasama antara Kemenparekraf/ Baparekraf dengan para stakeholders, baik Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, pakar dari perguruan tinggi, pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif maupun masyarakat masih perlu ditingkatkan untuk pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif kedepannya;
5. Penyusunan perencanaan kerja Kemenparekraf/Baparekraf harus dilakukan dengan cermat dan akurat sehingga pelaksanaan program dan kegiatan nantinya dapat diukur kinerjanya secara objektif dan dilaksanakan tepat waktu, tentunya dengan adanya komitmen Kemenparekraf/Baparekraf di tahun yang akan datang.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1411 -

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mencapai target kinerja antara lain adalah sebagai berikut.

1. Melaksanakan program-program prioritas dalam pengembangan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif, pengembangan destinasi yang berkualitas dan berkelanjutan, pengembangan industri dan investasi, pengembangan pemasaran parekraf serta MICE.
2. Koordinasi dan hubungan kerjasama yang baik antara Kemenparekraf/Baparekraf dengan para stakeholders, baik Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah/instansi terkait, akademisi, pelaku industri pariwisata komunitas, maupun masyarakat dalam rangka pemulihan sektor pariwisata.
3. Strategi Kemenparekraf/Baparekraf menerapkan 3G, yaitu GERCEP (Gerak Cepat), GEBER (Gerak Bersama), dan GASPOL (Garap Semua Potensi Lapangan Kerja); serta Inovasi, Adaptasi, Kolaborasi.
4. Komitmen, kerjasama, serta konsistensi serta inovasi Kemenparekraf/Baparekraf untuk mengimplementasikan program kerja sesuai dengan perencanaan untuk sektor ekonomi kreatif.
5. Partisipasi aktif Indonesia dalam berbagai kegiatan promosi pariwisata internasional baik secara hybrid maupun offline, kolaborasi kegiatan promosi dan pemasaran pariwisata Indonesia oleh Kemenparekraf/Baparekraf dalam mendukung event-event pertemuan Internasional (khususnya Presidensi G20).
6. Mempertahankan dan meningkatkan eksistensi Indonesia di negara-negara originasi pasar maupun di lokasi-lokasi strategis yang merupakan sumber pasar utama produk pariwisata dan ekonomi kreatif. Guna melakukan penguatan dan ekstensifikasi kehadiran representasi Indonesia dilakukan melalui Visit Indonesia Tourism Office yang selanjutnya disebut VITO.

Rencana ke depan yang akan dilaksanakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk meningkatkan pencapaian kinerja antara lain adalah sebagai berikut.

1. Optimalisasi pelaksanaan program-program pemulihan sektor pariwisata melalui program-program yang lebih inovatif menyesuaikan dengan sumberdaya yang tersedia.
2. Optimalisasi pelaksanaan program-program pemulihan dan percepatan pembangunan sektor pariwisata melalui program-program yang lebih inovatif untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman), rata-rata lama tinggal (length of stay) wisman selama di Indonesia, perjalanan wisatawan nusantara (wisnus), serta investasi pariwisata dengan menyesuaikan dengan sumberdaya yang tersedia.
3. Melakukan akselerasi dan perluasan upaya reskilling dan upskilling SDM dan pelaku usaha kreatif yang semakin berdaya saing; meningkatkan dan memperluas jangkauan pembinaan UMKM ekonomi kreatif menuju transformasi digital untuk meningkatkan daya saing; serta upaya pengembangan inovasi program lainnya untuk membantu pelaku ekonomi kreatif dalam meningkatkan kapasitas usaha



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1412 -

dan/atau produksinya dalam menghadapi persaingan yang lebih luas, serta mendorong nilai ekspor produk ekonomi kreatif.

4. Perluasan jangkauan pembinaan dan peningkatan daya saing melalui program inkubasi bagi pelaku usaha kreatif di Destinasi Prioritas Super Prioritas (DPSP), maupun Destinasi Pariwisata strategis lainnya; Perluasan pasar yang disertai dengan program pendampingan untuk meningkatkan 'value' produk ekonomi kreatif, serta penguatan rantai nilai – ekosistem ekonomi kreatif di wilayah-wilayah strategis.
5. Perluasan pembukaan border untuk menarik kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia seiring dengan meredanya pandemi dan pulihnya kepariwisataan internasional; Relaksasi regulasi bagi pelaku perjalanan dari luar negeri (contoh: ketentuan karantina dan kemudahan VISA bagi wisatawan, perluasan Visa on Arrival secara selektif); Perluasan partisipasi Kemenparekraf/Baparekraf pada pameran (travel mart) dan event internasional secara online atau hybrid dan offline, seiring dengan pulihnya kepariwisataan internasional; Perluasan program joint-marketing dengan mitra strategis untuk program pemasaran (Kerja Sama Terpadu, Co- branding), serta publikasi pariwisata Indonesia dalam berbagai media (multimedia), seiring dengan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
6. Konsistensi dalam pengembangan diversifikasi dan kualitas produk wisata di destinasi pariwisata super prioritas nasional, maupun destinasi pariwisata strategis lainnya; Optimalisasi program peningkatan kualitas dan kuantitas amenities pariwisata serta sarana dan prasarana, khususnya di 5 DPSP dan destinasi strategis lainnya; peningkatan kemudahan transaksi belanja wisatawan pada mata rantai usaha kepariwisataan di destinasi pariwisata.
7. Peningkatan program joint-marketing dengan lintas sektor untuk program pemasaran (Kerja Sama Terpadu, Co-branding) untuk mendorong perjalanan wisnus; Peningkatan dan perluasan penyelenggaraan kegiatan pameran dan event nasional maupun daerah secara hybrid maupun offline seiring dengan meredanya pandemic covid dan pencabutan PPKM dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan/CHSE; Optimalisasi promosi dan pemasaran pariwisata untuk mendorong perjalanan wisnus, perluasan pasar, diversifikasi produk wisata secara daring dan luring.
8. Perluasan jangkauan wilayah sasaran pengembangan destinasi pariwisata berkualitas dan desa wisata, baik di 10 Destinasi Prioritas Nasional maupun destinasi pariwisata strategis lainnya; Penyelenggaraan ADWI secara berkelanjutan dengan peningkatan inovasi program serta tindak lanjut implementasi untuk peningkatan kualitas dan pemberdayaan desa wisata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar; Peningkatan kualitas produk dan standar layanan dalam mata rantai usaha pariwisata melalui mekanisme evaluasi dan standarisasi; Peningkatan dan perluasan program carbon footprint di destinasi pariwisata strategis dan prioritas nasional; Implementasi model Tata Kelola Destinasi Pariwisata yang berkelanjutan.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1413 -

9. Program kerja Investment Project Ready to Offer; Pendampingan Pendaftaran Perizinan Berusaha hingga Realisasi Investasi; Promosi Investasi Parekraf; Penguatan Iklim Investasi.
10. Peningkatan inovasi program serta tindak lanjut implementasi untuk peningkatan kualitas dan daya saing serta resiliensi usaha pariwisata dan ekonomi kreatif dalam masa krisis dan post krisis akibat pandemi; Monitoring dan evaluasi program secara reguler.
11. Perencanaan yang lebih matang dan adanya rencana cadangan bila terjadi perubahan nomenklatur atau hal lain yang berpotensi mengakibatkan terhambatnya program dan kegiatan; Percepatan pelaksanaan kegiatan untuk mengantisipasi hal-hal berpotensi menghambat realisasi capaian; Percepatan penyusunan SKKNI dalam berbagai bidang kompetensi profesi dalam mata rantai usaha kepariwisataan dan implementasi pelaksanaan kegiatan sertifikasi dalam wilayah yang lebih luas pada destinasi pariwisata strategis.
12. Perlunya upaya konsisten terkait dengan Optimalisasi program pendidikan di PTNP yang berada di bawah pembinaan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, agar menghasilkan jumlah lulusan yang tinggi dan berkualitas.
13. Pelaksanaan secara konsisten dan berkelanjutan Sosialisasi core value ASN Berakhlak serta budaya kerja 4AS (Kerja Cerdas, Kerja Keras, Kerja Ikhlas, Kerja Tuntas) dan 3G (Geber, Gercep, Gaspol); Optimalisasi implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf diturunkan berdasarkan roadmap reformasi birokrasi nasional sesuai Permenpan RB No. 25/2020; Monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf.





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1414 -



**Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal**

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2022, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 7 (tujuh) indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2022, dari 7 (tujuh) indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, 3 (tiga) indikator kinerja (42,86%) memiliki capaian melebihi target, 1 (satu) indikator kinerja (14,29%) sesuai target, 2 (dua) indikator kinerja (28,57%) tidak mencapai target dan 1 (satu) indikator kinerja (14,29%) tidak terdapat angka capaian karena Bank Dunia telah mengumumkan penghentian Survei Kemudahan Berusaha pada tanggal 16 September 2021.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2022.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya realisasi penanaman modal	Nilai realisasi penanaman modal (Rp Triliun)	968,4	1207,2	120
		Nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder (Rp Triliun)	352,5	497,7	120
		Sebaran penanaman modal berkualitas (di Luar Jawa) (%(Persen))	49,7	52,73	106,10
		Kontribusi penanaman modal dalam negeri/PMDN termasuk UMKM (%(Persen))	50,3	45,80	91,05
2	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal	Peringkat kemudahan berusaha ( <i>ease of doing business</i> ) (Peringkat EoDB)	51	N/A*	N/A*
3	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani	Nilai Reformasi Birokrasi BKPM (Predikat/(Nilai))	A (80)	BB (78,20)	97,75
		Opini atas laporan keuangan BKPM (Opini BPK)	WTP	WTP	100

Catatan: \*) Indikator Peringkat Kemudahan Berusaha tidak terdapat angka capaian karena Bank Dunia telah mengumumkan penghentian Survei Kemudahan Berusaha pada tanggal 16 September 2021

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

No.	Program/Sasaran/Indikator	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Program Dukungan Manajemen	316.255.038.000	306.756.234.512	97,00
2	Program Penanaman Modal	942.187.007.000	919.040.693.765	97,54
	Total	1.258.442.045.000	1.225.796.928.277	97,41



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1415 -

Hambatan atau permasalahan dalam pencapaian kinerja Kementerian Investasi/BKPM antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

1. Kementerian Investasi/BKPM menghadapi beberapa permasalahan umum pada tahun 2022, antara lain :  
Pertumbuhan ekonomi global yang belum pulih; Pandemi Covid-19 gelombang ketiga yang menghambat proses pelaksanaan kegiatan; Kondisi infrastruktur daerah yang belum merata; dan Permasalahan pengadaan lahan di daerah;
2. Disharmoni peraturan-peraturan baik di tingkat pusat atau kementerian/lembaga dan daerah sehingga perlu disimplifikasi, di harmonisasi dan di sinkronisasi;
3. Cepatnya perubahan regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah, sehingga membutuhkan sosialisasi secara menyeluruh baik di tingkat Kementerian/Lembaga maupun di daerah;
4. Implementasi peraturan pelaksana turunan UU Cipta Kerja yang akan ditanam ke dalam sistem OSS RBA masih perlu sinkronisasi antar sektor;
5. Sulitnya mendapatkan data perusahaan besar (PMDN/PMA) yang membutuhkan pasokan bahan baku atau menampung barang produksi (supply chain), mendapatkan data pelaku usaha nasional khususnya UMKM yang potensial untuk menjadi mitra usaha yang siap untuk melakukan kemitraan serta belum tervalidasinya data perusahaan besar (PMDN/PMA) yang wajib bermitra;
6. Insentif fiskal/non fiskal yang ditawarkan selama ini belum cukup menarik untuk investor;
7. Kehadiran UMKM belum dimanfaatkan secara maksimal oleh perusahaan besar PMA dan PMDN sebagai mitra usaha;
8. Sulitnya pengadaan lahan karena kurangnya validitas data tanah di Indonesia dan ketidaksesuaian antara pemanfaatan ruang daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di daerah;

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Investasi/BKPM dalam mencapai target kinerja antara lain adalah sebagai berikut.

1. Kementerian Investasi/BKPM telah melakukan terobosan pada tahun 2022 melalui penguatan kemitraan bersama UMKM.
2. Kementerian Investasi/BKPM dalam upaya pencapaian target realisasi penanaman modal juga melakukan eksekusi terhadap proyek-proyek mangkrak di wilayah barat dan wilayah timur. Proyek-proyek yang menjadi objek eksekusi realisasi investasi mangkrak di wilayah barat berada di wilayah Sumatera dan Jawa.
3. Melakukan penguatan fungsi penanaman modal pada satuan kerja perangkat daerah, yaitu DPMPPTSP provinsi, dan DPMPPTSP kabupaten/kota melalui penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik.
4. Upaya strategis yang telah dilakukan Kementerian Investasi/BKPM di antaranya pengawalan proyek-proyek investasi besar mulai dari tahap perizinan hingga penyelesaian permasalahan investasi di lapangan.
5. Terus menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui implementasi berbagai kebijakan strategis yang telah disiapkan, salah satunya dengan mengawal proses penanaman modal oleh investor strategis secara end-to-end



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1416 -

serta melakukan berbagai upaya transformasi ekonomi untuk menarik investasi dengan fokus mendorong sektor energi hijau (green energy) dan hilirisasi industri.

6. Optimalisasi serta perluasan promosi pada level internasional. Salah satunya melalui penguatan dan/atau peningkatan kinerja IIPC.
7. Pada tahun 2022, Kementerian Investasi/BKPM melakukan penayangan iklan promosi investasi pada 6 (enam) media elektronik internasional, yaitu Al Jazeera, Reuters, BBC, CNBC, Wall Street Journal, dan Bloomberg. Strategi promosi melalui penayangan iklan di media internasional bertujuan sebagai sarana persebaran informasi masif kepada dunia usaha nasional dan internasional berupa kebijakan terbaru, prosedur investasi, pelayanan kepada investor, OSS-RBA, peluang dan potensi investasi baik berdasarkan sektor maupun wilayah dan kawasan industri, serta dukungan dari Pemerintah.
8. Beberapa inisiatif perbaikan yang dilakukan mencakup penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk membangun ekosistem industri yang sinergi, kolaborasi antara industri besar dan UMKM, penguatan fungsi penanaman modal pada satuan kerja perangkat daerah, pengawalan proyek investasi besar, forum kemitraan UMKM/IKM dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Usaha Besar, pameran UMKM dalam acara G20, partisipasi dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda), penyusunan peta jalan, Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi, forum kemitraan investasi, dan pemeliharaan sistem kepegawaian yang terintegrasi dengan aplikasi perkantoran.

Rencana ke depan yang akan dilaksanakan Kementerian Investasi/BKPM untuk meningkatkan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut.

1. Pembenahan kemudahan berusaha :
  - a. Meningkatkan koordinasi dengan instansi di daerah, sehingga mempercepat proses dalam melakukan update data potensi investasi daerah.
  - b. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pada level pelaksana melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) serta Tugas Belajar. Peningkatan upaya koordinasi dengan kementerian/lembaga/daerah dan stakeholder terkait dalam melakukan simplifikasi, harmonisasi dan sinkronisasi terhadap peraturan perizinan di tingkat pusat atau kementerian/lembaga.
  - c. Pelaksanaan kegiatan diseminasi kebijakan perlu memperhatikan perkembangan regulasi yang terjadi dan menyesuaikan dengan kegiatan unit sehingga tujuan kegiatan dapat tercapai optimal tanpa mengabaikan kegiatan yang lain.
  - d. Fasilitasi kompetensi bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ada di daerah agar dapat memiliki standar yang dibutuhkan oleh usaha besar.
  - e. Diperlukan upaya melakukan monitoring terhadap tindak lanjut (follow up) dari pelaksanaan kemitraan antara perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA)/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1417 -

- pelaku usaha nasional di daerah sehingga diperoleh informasi tentang hasil kerja sama, kesulitan bermitra, ataupun peningkatan naik kelas bagi Usaha Kecil Menengah (UKM).
- f. Melakukan monitoring secara berkala kepada para pelaku usaha besar dan UMKM terkait kesepakatan kemitraan yang telah dilakukan.
2. Eksekusi realisasi penanaman modal besar
    - a. Melakukan pendampingan realisasi penanaman modal besar secara end to end services.
    - b. Melakukan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan dengan melibatkan stakeholder pusat dan daerah secara komprehensif dan tuntas yang dilakukan secara formal maupun informal.
    - c. Koordinasi dengan berbagai instansi terkait di pusat maupun daerah melalui pertemuan dan koordinasi yang lebih sering, lebih efektif dan intensif dengan instansi teknis terkait lainnya di pusat dan daerah.
    - d. Melakukan pendekatan secara intensif melalui sosialisasi tentang pemanfaatan sistem pelaporan kegiatan penanaman modal secara online (LKPM Online) berbasis Risiko.
    - e. Pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko yang terintegrasi dan terkoordinasi antar kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK dan/atau badan pengusahaan KPBPB melalui subsistem Pengawasan pada Sistem OSS.
    - f. Peningkatan penyelenggaraan kegiatan pengawasan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan bagi pelaku usaha melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk percepatan realisasi penanaman modal.
  3. Formulasi strategi penanaman modal besar bermitra dengan usaha mikro, kecil dan menengah
    - a. Melakukan pembaharuan data perusahaan besar (PMA/PMDN) yang wajib bermitra secara berkala.
    - b. Penyusunan regulasi terkait: 1) Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. 2) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara.
    - c. Melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dengan K/L, pemerintah daerah dan asosiasi nasional, untuk pembaharuan data perusahaan besar (PMA/PMDN) dalam rangka: 1) Pemenuhan kebutuhan rantai pasok produksi (supply chain). 2) Penguatan data pelaku usaha nasional (PMDN) khususnya UMKM untuk menjadi mitra usaha potensial. 3) Pengoptimalan pengaruh kegiatan Usaha Besar agar signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di lokasi proyek. 4) Pemberdayaan dan pengembangan sektor usaha mikro dan kecil. 5) Peningkatan pengembangan usaha nasional (PMDN) khususnya UMKM agar mampu naik kelas.
    - d. Fasilitasi kompetensi bagi para pelaku usaha UMKM yang ada di daerah agar dapat memiliki standar yang dibutuhkan oleh usaha besar.
    - e. Diperlukan upaya melakukan monitoring terhadap tindak lanjut (follow up) dari pelaksanaan kemitraan antara perusahaan PMA/PMDN dengan pelaku usaha nasional di daerah sehingga diperoleh informasi tentang hasil kerja sama, kesulitan bermitra, ataupun peningkatan naik kelas bagi UMKM.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1418 -

4. Diseminasi penanaman modal berkualitas.
  - a. Mendorong percepatan penerbitan peraturan daerah mengenai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
  - b. Melakukan kegiatan workshop penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi dan evaluasi dokumen RUPM.
  - c. Fasilitasi percepatan penanaman modal Proyek Strategis Nasional (PSN), baik melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) maupun swasta nasional.
  - d. Fasilitasi percepatan proyek-proyek infrastruktur serta pengembangan kawasan ekonomi khusus di daerah
  - e. Menyusun analisis kebijakan penanaman modal terkait pemberian insentif fiskal/non fiskal kepada perusahaan.
  - f. Pemanfaatan teknologi informasi dalam diseminasi hasil penanaman modal.
5. Promosi penanaman modal terfokus berdasarkan sektor dan negara
  - a. Melaksanakan promosi terfokus pada sektor dan negara melalui pengembangan bisnis yang akan dieksekusi.
  - b. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pameran terpadu bekerja sama dengan K/L, pemerintah daerah dan asosiasi usaha baik dalam maupun luar negeri.
  - c. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah terutama untuk mendukung ketersediaan sarana dan prasarana (infrastruktur) promosi melalui teknologi digital yang andal.
  - d. Berkolaborasi dengan asosiasi bisnis dan perbankan untuk menyiapkan daftar calon mitra yang sudah diseleksi.
  - e. Mendapatkan data informasi terkait proyek yang siap ditawarkan secara langsung dengan mendatangi lokasi proyek serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah juga berkomunikasi langsung dengan pengusaha lokal.
  - f. Memanfaatkan perjanjian Indonesia dengan negara-negara mitra dan Memorandum of Understanding (MoU) Indonesia dengan dunia usaha di bidang investasi untuk mendorong peningkatan investasi asing ke Indonesia dan pengembangan kapasitas investasi dalam negeri.
  - g. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah terkait penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal untuk penyusunan video promosi investasi daerah.
6. Peningkatan penanaman modal dalam negeri khususnya usaha mikro, kecil dan menengah
  - a. Memberikan insentif yang menarik bagi pelaku UMKM.
  - b. Melakukan simplifikasi akses pembiayaan untuk pelaku usaha mendapatkan kredit dengan bunga rendah.
  - c. Melaksanakan pembinaan kompetensi pelaku usaha melalui pelatihan teknis dan kewirausahaan.
  - d. Memperluas jaringan dan perluasan akses pasar.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1419 -



**Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral**

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2022, Kementerian ESDM telah menetapkan 12 sasaran strategis dengan 19 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2022, dari 19 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, 12 indikator kinerja (63,16%) memiliki capaian melebihi target, 1 indikator kinerja (5,26%) sesuai target, 6 indikator kinerja (31,58%) tidak mencapai target.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2022.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi	Indeks Kemandirian Energi Nasional	59,95	61,04	101,81%
		Indeks Ketahanan Energi Nasional	72,44	78,58	108,47%
2	Optimalisasi Ketersediaan Produk Mineral	Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri	77,63	77,07	99,27%
3	Meningkatnya Pelayanan Mitigasi Bencana Geologi	Indeks Mitigasi Bencana Geologi	60,49	62,20	102,82%
4	Meningkatnya Kompetensi SDM	Jumlah Pengembangan SDM yang Kompeten dan Profesional	60.012 orang	77.704 orang	129,48%
5	Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan	Persentase Realisasi Penerimaan PNBPN	92%	138,2%	150,21%
		Persentase Realisasi Investasi	87%	86,74%	99,7%
6	Layanan Sektor ESDM yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Sektor ESDM	3,3	3,48	105,45%
7	Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor ESDM yang Berkualitas	Indeks Kualitas Kebijakan	70	82,81	118,3%
		Indeks Implementasi Kebijakan	75,6	64,9	85,84%
8	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan	77,5	84,2	108,64%
		Indeks Maturitas SPIP	3,7	3,679	99,43%
		Nilai SAKIP ESDM	81,0	78,39	96,97%
9	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Layanan Prima	Indeks RB	85,5	86,15	100,76%



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1420 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
10	Organisasi yang Fit dan SDM Unggul	Nilai Evaluasi Kelembagaan	74	74,13	100,17%
		Indeks Profesionalitas ASN	75	81,71	108,95%
11	Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	4,1	3,51	85,61%
12	Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90,5	91,25	100,82%
		Opini BPK RI atas Laporan Keuangan KEMENTERIAN ESDM	WTP	WTP	100%

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2022\* adalah sebagai berikut.

No	Eselon I	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Sekretariat Jenderal	359,05	355,948	99,14
2	Inspektorat Jenderal	80,52	80,46	99,93%
3	Ditjen Migas	1.973,76	1.901,14	96,32%
4	Ditjen Ketenagalistrikan	255,86	254,08	99,30%
5	Ditjen Minerba	593,63	584,59	98,48%
6	Setjen DEN	48,13	48,08	99,89%
7	Badan Litbang ESDM	290,58	290,48	99,97%
8	BPSDM ESDM	601,56	598,08	99,42%
9	Badan Geologi	438,10	404,31	92,29%
10	BPH Migas	256,15	254,89	99,51%
11	Ditjen EBTKE	788,37	769,37	97,59%
12	BPMA	72,27	71,93	99,52%
Jumlah		5.757,98	5.613,36	97,49%

\*) Dalam Milyar Rupiah

Hambatan atau permasalahan dalam pencapaian kinerja Kementerian ESDM antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

1. Pemenuhan kebutuhan energi listrik untuk daerah terpencil di perbatasan antara Kalimantan Barat dan Sarawak masih terkendala sulitnya penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan sementara kondisi sistem tenaga listrik di wilayah Sarawak jauh lebih baik. Hal ini menimbulkan terjadinya kesenjangan yang cukup signifikan.
2. Terdapat ketidakcocokan antara harga ataupun spesifikasi dari BBM yang diminta oleh Badan Usaha Niaga.
3. Kemampuan industri penunjang migas dalam negeri belum optimal.
4. Masih terbatasnya Perusahaan Modal Dalam Negeri (PMDN). Hal ini terjadi karena kebutuhan modal besar dan peralatan berteknologi tinggi serta akses pasar yang terbatas, baik dalam negeri maupun luar negeri.
5. Kondisi naiknya harga minyak dunia dan adanya krisis energi global sehingga mempengaruhi dalam penyediaan Cadangan Operasional BBM oleh Badan Usaha.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1421 -

6. Tidak semua kualitas batubara produksi dalam negeri dapat diserap oleh industri/pasar domestik dan harga batubara ekspor yang lebih tinggi dibandingkan harga jual domestik yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
7. Belum adanya penetapan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN) sebagai pelaksanaan amanat Permen ESDM Nomor 4 Tahun 2018 tentang pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir yang akan dijadikan dasar untuk melakukan lelang ruas transmisi maupun Wilayah Jaringan Distribusi (WJD) Gas Bumi.
8. Lokasi calon penerima BPBL yang tersebar dan berjauhan termasuk ke dalam daerah Terluar, Tertinggal dan Terdepan (3T) dan pulau terluar serta kondisi cuaca menyebabkan distribusi material dan petugas pemasangan di lapangan terkendala.
9. Infrastruktur jaringan internet yang handal belum tersebar secara merata di Indonesia khususnya pelatihan masyarakat pada daerah 3T (terdepan, terluar dan terbelakang).
10. Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT PLN (Persero) untuk melaksanakan program listrik pedesaan tidak sesuai dengan rencana yang dibutuhkan.
11. Rekonsiliasi data capaian kinerja karena banyaknya subparameter dan sub indikator di dalam setiap indeks, terkadang menimbulkan perbedaan data capaian kinerja yang dilaporkan.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian ESDM dalam mencapai target kinerja adalah sebagai berikut.

1. Monitoring ketat secara berkala atas kepatuhan perusahaan dalam melaporkan investasi pada aplikasi investasi minerba;
2. Menyusun rencana aksi untuk menindaklanjuti Peta Indikasi Tumpang Tindih yang telah disusun di bawah koordinasi Sekretariat Kabinet;
3. Memfasilitasi penyelesaian kendala perusahaan terkait perizinan, pembebasan lahan dan tata ruang;
4. Memfasilitasi market sounding proyek smelter yang terkendala (menawarkan peluang pendanaan dalam forum bisnis internasional).
5. Pemberian bantuan berupa konverter kit untuk mengurangi penggunaan BBM pada kapal nelayan kecil, dengan mengalihkan dari konsumsi BBM dalam hal ini premium yang lebih mahal ke LPG yang lebih murah dan bersih ditargetkan sekitar 100.000 paket pada periode 2020-2024
6. untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik di daerah perbatasan dengan Timor Leste, tengah dilakukan kerja sama antara PT PLN (Persero) dengan perusahaan listrik Timor Leste (EDTL).
7. Pada tahun 2022, Kementerian ESDM telah dan akan terus melakukan usaha-usaha dalam rangka pencapaian target dan peningkatan produksi migas dengan cara antara lain: Optimasi lapangan-lapangan eksisting dengan melakukan program Work Over/ Well Services (WO/WS) & Drilling sesuai





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1422 -

target ; Akselerasi transformasi Resource to Production ; Akselerasi proyek Waterflood & EOR ; Akselerasi eksplorasi untuk penemuan-penemuan baru yang besar ; Akselerasi pengembangan Migas Non Konvensional.

8. Perbaiki iklim investasi industri hulu migas melalui rumusan insentif dan fasilitas perpajakan yang lebih baik untuk pelaku industri.
9. Melakukan pemantauan lapangan dan koordinasi/konsinyering untuk inventarisasi data cadangan dan produksi minyak dan gas bumi dari lapangan eksisting untuk diketahui sisa cadangan (remaining reserves);
10. Evaluasi perhitungan ulang cadangan minyak bumi sehingga diperoleh tingkat kepastian besaran cadangan yang dapat diproduksi.
11. Meningkatkan penggunaan gas bumi di sektor rumah tangga, untuk mendukung diversifikasi energi, tercapainya target bauran energi, dan penurunan subsidi LPG 3 kg untuk mewujudkan ketahanan energi nasional.
12. Mengeluarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Bantuan Pasang Baru Listrik Bagi Rumah Tangga Tidak Mampu.
13. Untuk pengaturan transisi energi diterbitkan salah satunya berupa Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan EBT Untuk Penyediaan Tenaga Listrik menjelang akhir tahun 2022.
14. Beberapa langkah yang telah ditempuh pada sub sektor hulu migas untuk mencapai realisasi investasi agar sesuai target adalah carry over dari periode sebelumnya TW-3 ke TW-4 tahun 2021 sebesar USD1,6 miliar, pemboran sekitar 850 sumur development, 725 proyek work over, dan 2700 well service pada Tahun 2022, daily monitoring and weekly pit stop meeting, identifikasi kandidat sumur pengeboran.
15. Memfasilitasi badan usaha dan menerbitkan rekomendasi kepada Kementerian Keuangan untuk pemberian fasilitas perpajakan insentif fiskal bagi para pengembang dalam bentuk tax allowance, fasilitas bea masuk dan tax holiday.

Rencana ke depan yang akan dilaksanakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk meningkatkan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut.

1. Beberapa strategi untuk meningkatkan produksi migas antara lain Optimasi produksi lapangan eksisting dan percepatan pengembangan lapangan baru; Peningkatan kualitas dan kuantitas data; Penawaran WK yang berkesinambungan dan peningkatan eksplorasi (termasuk KP/KKP); Penerapan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) dan Carbon Captured and Storage/Carbon Captured Utilization and Storage (CCS/CCUS).



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1423 -

2. Optimalisasi PLTU eksisting dan tambahan PLTU yang telah tercantum dalam RUPTL dengan penerapan Clean Coal Technology dan CCUS.
3. Mendorong kegiatan eksplorasi pada greenfield area maupun eksplorasi lanjutan pada brownfield area untuk menemukan potensi mineral strategis, khususnya nikel.
4. Efisiensi energi peralatan dengan potensi penurunan konsumsi energi sebesar 50- 60%; Strategi Elektrifikasi pada industri yang menggunakan low-temperature processes seperti makanan & minuman, tekstil dan kulit, perangkat elektronik; Penetrasi kendaraan listrik dalam transportasi; Penggunaan hidrogen untuk truk; E-fuel (berasal dari biosyngas dan green hydrogen) untuk kendaraan.
5. Monitoring ketat secara berkala atas kepatuhan perusahaan dalam melaporkan investasi pada aplikasi investasi minerba;
6. Menyusun rencana aksi untuk menindaklanjuti Peta Indikasi Tumpang Tindih yang telah disusun di bawah koordinasi Setkab;
7. Memfasilitasi penyelesaian kendala perusahaan terkait perizinan, pembebasan lahan dan tata ruang;
8. Memfasilitasi market sounding proyek smelter yang terkendala (menawarkan peluang pendanaan dalam forum bisnis internasional).
9. Percepatan penerbitan dukungan regulasi untuk mendorong percepatan hilirisasi batubara diantaranya: Rancangan Perpres, Rancangan Permen Pengenaan Insentif Royalti Batubara 0%, dan Harga Khusus Batubara.
10. Berkoordinasi dengan Direktorat Industri Hulu Kimia - Kementerian Perindustrian dan K/L terkait lainnya untuk proses sinkronisasi data dan monitoring pencapaian target peningkatan nilai tambah batubara di dalam negeri.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1424 -



**Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia**

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2022, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) telah menetapkan 2 sasaran strategis dengan 5 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2022, dari 5 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, 1 indikator kinerja (20%) memiliki capaian melebihi target, 2 indikator kinerja (40%) sesuai target, dan 2 indikator kinerja (40%) tidak mencapai target.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2022.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatkan tata Kelola LPP RRI yang transparan dan akuntabel	Penilaian dan Evaluasi Reformasi Birokrasi di LPP RRI	BB	CC	100%
		Opini BPK RI atas Laporan Keuangan LPP RRI	WTP	WTP	100%
2.	Terwujudnya peningkatan kualitas layanan siaran radio publik modern berbasis multiplatform yang bersifat informatif, edukatif dan hiburan yang sehat kepada seluruh masyarakat di wilayah NKRI dan Mancanegara	Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran Informasi dan Hiburan yang Sehat	90%	90,34%	100,38%
		<i>Audience share</i> RRI	90%	88,64%	98,49%
		Layanan Media <i>Multiplatform</i> yang mempunyai standar kualitas yang Bagus	80%	79%	98,75 %

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Dukungan Manajemen	835.123.247.000	799.762.744.127	95,77
2.	Program Penyiaran Publik	151.785.116.000	141.835.729.601	93,45
	Jumlah	986.908.363.000	941.598.473.728	95,41

Hambatan atau permasalahan dalam pencapaian kinerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

1. Audience Share LPP RI

Tren pendengar radio konvensional terus menurun sejak Tahun 2015, Namun berdasarkan data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, media konvensional seperti TV dan radio mengalami pertumbuhan 10,42 persen pada Tahun 2020 silam. Hasil dari Analisa yang dilakukan oleh Nielsen juga menunjukkan hingga kuartal ketiga Tahun 2016, terlihat 57% dari total pendengar radio justru berasal dari generasi milenial dan Gen Z. kenaikan tersebut tidak dapat ditampik bahwa pendengar radio masih kalah dengan jumlah peminat medsos, oleh karena itu diharapkan LPP RRI lebih dapat mengoptimalkan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1425 -

penggunaan multiplatform sebagai media penyiaran modern yang tidak meninggalkan identitas radio yang membentuk Theatre Of Mind untuk pendengarnya.

2. Layanan Media Multiplatform yang Mempunyai standar Kualitas yang bagus  
LPP RRI belum optimal memanfaatkan media multiplatform yang dimiliki dikarenakan terkendala dengan minimnya anggaran pengembangan Teknologi informasi, dan juga salah satunya karena kebijakan pemerintah terkait Automatic Adjustment sehingga pengadaan yang sebelumnya direncanakan tidak dapat direalisasikan dan target penerimaan PNBPN yang tidak tercapai sehingga mengakibatkan LPP RRI tidak dapat mengajukan Surat Edaran Maksimum Pencairan PNBPN dari Kementerian Keuangan RI.
3. Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi dan hiburan yang sehat  
Berdasarkan data laporan statistik yang dilakukan oleh Direktorat Teknologi dan Media Baru masih terdapat sejumlah 19.573.085 Masyarakat yang belum dapat mengakses informasi dan hiburan yang LPP RRI sediakan, hal tersebut dikarenakan terdapat blank spot area di sejumlah wilayah NKRI (69 Kabupaten/Kota) yang masih perlu disediakan tower dan pemancar di wilayah tersebut. Terkait dengan kualitas informasi dan hiburan yang sehat LPP RRI sudah berupaya meningkatkan melalui berbagai inovasi konten serta event lokal hingga nasional yang melibatkan Ratusan Ribu Pelajar di Seluruh Indonesia melalui Festival Pelajar Nusantara.
4. Opini BPK atas Laporan Keuangan  
Opini WTP LPP RRI telah diperoleh sebanyak 3 (Tiga) Kali berturut-turut Sejak Tahun 2019, hal tersebut merupakan pembuktian bagi LPP RRI bahwa dalam pelaksanaan anggaran telah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Penilaian Evaluasi Birokrasi LPP RRI  
Pada Tahun 2022 LPP RRI memperoleh nilai RB 58,7 dengan kategori "CC" (Cukup), sehingga masih perlu banyak perbaikan untuk dapat meningkatkan nilai menjadi "B". Rekomendasi dari hasil evaluasi Kemenpan RB masih belum ditindaklanjuti dengan maksimal, dikarenakan tim Reformasi Birokrasi terdiri dari Kepala Satuan Kerja LPP RRI di Seluruh Indonesia sehingga belum optimal untuk secara fokus melaksanakan rencana kerja dan menindaklanjuti rekomendasi yang harus ditindaklanjuti.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1426 -



### Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2022, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) telah menetapkan 2 sasaran strategis dengan 6 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2022, dari 6 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, 2 indikator kinerja (33,33%) sesuai target, 3 indikator kinerja (50%) tidak mencapai target, dan 1 indikator kinerja (16,67%) belum dihitung capaian kerjanya.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2022.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kualitas konten (meliputi pendidikan, budaya, Pendidikan agama, dan infrastruktur) penyiaran TV Publik	<i>Public Value</i>	3,68	3,6	97,83%
		<i>Coverage Population</i>	76%	70,18%	92,34%
		Interaksi Publik melalui Media Baru	153.501.574 Interaksi	457.816.935 Interaksi	100%
		Persentase Peningkatan Layanan Usaha	100%	51,22	51,22%
2.	Meningkatnya kualitas Internal kelembagaan	Opini BPK	WTP	WTP	100%
		Indeks RB LPP TVRI	55,59	N/A	N/A

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

No	Tahun	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	2022	1.625.093.315.000	1.535.371.076.122	94,48%

Hambatan atau permasalahan dalam pencapaian kinerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

1. Masih adanya Rekomendasi Hasil Audit BPK tahun tahun sebelumnya yang belum selesai Tindak Lanjutnya.
2. Masih adanya saldo saldo lama di Neraca yang belum tuntas, misalnya Saldo Aset Lain lain yang merupakan Saldo Panjar Uang Muka Kerja.
3. Kemampuan SDM penyusun Laporan Keuangan yang belum merata
4. Neraca SAIBA masih menunggu kiriman data SIMAK sehingga memperlambat proses penyusunan Laporan Keuangan, misalnya data SIMAK Aset Tetap.
5. Akun-akun masih terdapat yang belum teregister.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1427 -

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) dalam mencapai target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Membentuk *Task Force* Tindak Lanjut.
2. Reviu SPI untuk saldo saldo lama secara rutin.
3. Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan oleh Direktorat APK dan DJKN Kemenkeu.
4. Untuk mengatasi keterlambatan penyusunan Laporan keuangan antara lain:
  - a. Rekonsiliasi antara Neraca SAIBA dan SIMAK.
  - b. Merevisi anggaran jika pagu minus.
5. Untuk penyelesaian Akun-akun belum diregister dilakukan Langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Merevisi Akun sesuai dengan BASnya.
  - b. Memanfaatkan Surat Dispensasi dari DJA.
  - c. Melakukan Jurnal Koreksi dengan konsultasi terlebih dahulu kepada APK kemudian berdasarkan persetujuan APK maka dibuatkan Surat Permohonan koreksi kepada Direktur Keuangan

Rencana ke depan yang akan dilaksanakan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) untuk meningkatkan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan peran SPI dalam melakukan Reviu dan Tindak Lanjut BPK.
2. Untuk akun yang belum teregister akan dilakukan pemberitahuan kepada para user pada tiap-tiap unit kerja untuk memperbaiki akun pada Pengajuan DIPA Awal.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1428 -



**Badan Pangan Nasional**

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2022, Badan Pangan Nasional (BPN) telah menetapkan 7 sasaran strategis dengan 17 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2022, dari 17 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, 9 indikator kinerja (52,94%) melebihi target, 2 indikator kinerja (11,76%) sesuai target, dan 6 indikator kinerja (35,29%) tidak mencapai target.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2022.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai Reformasi Birokrasi	Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan	113%	116%	102,65%
		Rasio Angka Kecukupan Protein (AKP) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan	135,27%	132,30%	97,81%
		Rasio Angka Kecukupan Energi (AKE) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan	121,80%	138,58%	113,78%
		Rasio komoditas cadangan pangan yang dikuasai pemerintah terhadap komoditas yang menjadi kewenangan	10%	10%	100%
2.	Terwujudnya stabilisasi pasokan dan harga pangan Inflasi pangan bergejolak Inflasi pangan bergejolak Inflasi pangan bergejolak Inflasi pangan bergejolak	Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat produsen maksimum 5% di bawah dan/atau 10% di atas HAP/HPP/Harga Keekonomian	65%	33,33%	51,28%
		Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat konsumen maksimum 10% di atas HAP/HET/Harga Keekonomian	70%	69,23%	98,90%



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1429 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		Jumlah provinsi dengan disparitas harga komoditas (yang menjadi kewenangan) di tingkat konsumen rata-rata provinsi terhadap rata-rata nasional per-kuartal, maksimum 10%	25 Provinsi	27 Provinsi	108,00%
		Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata nasional di tingkat konsumen per-kuartal perbedaan maksimum 10%	70%	46,15%	65,93%
		Inflasi pangan berkejang	4,0±1	5,61	87,80%
3.	Terentaskannya kerawanan pangan dan gizi	Persentase kabupaten/kota rentan pangan	14,4%	14,4%	100%
		Prevalence of Undernourishment (PoU)	5,5%	10,21%	14,36%
4.	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar	Persentase produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	85%	93,87%	110,43%
		Persentase lembaga keamanan dan mutu pangan provinsi yang terstandarisasi	15%	17,65%	117,67%
5.	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat	Rasio realisasi skor PPH terhadap target yang ditetapkan	95%	100,11%	105,38%
6.	Pengembangan data dan informasi pangan	Tingkat kepuasan pengguna layanan data dan informasi pangan	3,0	3,10	103,33%
7.	Terwujudnya birokrasi Badan Pangan Nasional yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Reformasi Birokrasi	76	80*	105,26%
		Nilai Kinerja Anggaran	85	92,29	108,57%

\*) Berdasarkan penilaian internal (penilaian dari instansi penilai belum diterima)

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Ketersediaan, Akses dan Komsumsi Pangan Berkualitas	187.086.278.000	155.070.786.746	82,89
2.	Dukungan Manajemen	90.279.388.000	86.445.785.744	95,75
	Jumlah	277.365.666.000	241.516.572.522	87,08

Hambatan atau permasalahan dalam pencapaian kinerja Badan Pangan Nasional (BPN) antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Dampak perubahan iklim berpengaruh terhadap pola tanam, potensi produksi, serangan OPT dan ketersediaan air.
2. Skala usaha pertanian yang didominasi oleh usaha tani kecil disertai oleh laju konversi lahan yang cukup tinggi.





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1430 -

3. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang belum merata.
4. Inovasi dan diseminasi teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan adaptasi tanaman terhadap lingkungan belum dilaksanakan secara masif.
5. Regenerasi petani berjalan lambat, sehingga pengelolaan pertanian saat ini didominasi oleh sumber daya manusia yang relatif tua.
6. Ketersediaan kelompok pangan sumber protein hewani serta sayur dan buah masih relatif rendah.
7. Akses pangan yang tidak merata karena faktor ekonomi (daya beli) dan fisik, termasuk pasokan pangan bagi masyarakat dari wilayah surplus ke wilayah defisit, daerah rentan rawan pangan, dan daerah terdampak bencana alam.
8. Konektivitas antar wilayah yang masih lemah karena kondisi infrastruktur yang belum memadai.
9. Sebaran wilayah produksi di daerah-daerah tertentu menyebabkan arus distribusi pangan searah dari wilayah produsen ke konsumen.
10. Rantai distribusi yang panjang menyebabkan biaya perdagangan dan disparitas harga antara produsen dan konsumen yang tinggi.
11. Pertumbuhan penduduk Indonesia yang tinggi dan disertai dengan meningkatnya jumlah penduduk usia produktif dan laju urbanisasi membawa pergeseran dalam gaya hidup dan preferensi terhadap makanan.
12. Meningkatnya Nilai indeks pembangunan manusia yang mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat lebih beragam dan memilih lebih banyak protein, buah, dan sayuran.
13. Belum idealnya Pola Pangan Harapan masyarakat. Konsumsi pangan masyarakat masih didominasi sumber karbohidrat, sementara konsumsi sayur dan buah serta pangan hewani masih relatif rendah.
14. Masih terdapat 3 (tiga) masalah gizi (triple burden malnutrition) yang memerlukan penanganan dan perhatian.
15. Keamanan pangan, terutama akibat penggunaan bahan berbahaya pada saat produksi pangan (khususnya pestisida yang meninggalkan residu pada sayuran dan buah), residu logam berat pada perairan tertentu yang berakibat pada tidak amannya pangan yang diproduksi setempat, atau penggunaan bahan kimia berbahaya untuk ditambahkan pada makanan seperti pewarna tekstil, boraks, formalin, dan lain-lain masih menjadi masalah serius di sebagian besar wilayah di Indonesia. Pada sisi yang lain kesadaran masyarakat untuk hidup sehat semakin meningkat.
16. Meningkatnya permintaan pangan yang mudah diolah dan praktis memerlukan olahan pangan yang inovatif.
17. Meningkatnya permintaan jaminan pangan yang halal sebagai keyakinan masyarakat atas makanan yang dikonsumsi

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Badan Pangan Nasional (EPN) dalam mencapai target kinerja adalah sebagai berikut:



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1431 -

1. Menugaskan Perum Bulog untuk melakukan impor daging sapi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan industri pangan, serta Horeka (Hotel, Restoran dan Kantin).
2. Telah dilaksanakan juga beragam kegiatan aksi dalam pengendalian kerawanan pangan dan pematapan kewaspadaan pangan dan gizi, seperti: 1) Bantuan pangan untuk masyarakat yang mengalami rawan pangan dan gizi; 2) Penanganan daerah rentan rawan pangan; 3) Komunikasi informasi dan edukasi kerawanan pangan; 4) Pencegahan dan kesiapsiagaan rawan pangan dan gizi; 5) Pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan; dan 6) Intervensi kewaspadaan pangan dan gizi.
3. Promosi penganeekaragaman konsumsi pangan, pengembangan desa B2SA serta pengembangan Dapur B2SA.

Rencana ke depan yang akan dilaksanakan Badan Pangan Nasional untuk meningkatkan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan kualitas perencanaan;
2. Meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan;
3. Melakukan akselerasi pelaksanaan program dan kegiatan;
4. Melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
5. Meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja;
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang menangani keuangan;
7. Meningkatkan monitoring dan evaluasi.

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

**JOKO WIDODO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**  
Deputi Bidang Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



**Lydia Silvanna Djaman**